



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku Pencipta Arsip.
8. Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
16. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
17. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
18. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
19. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
20. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
21. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
22. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
23. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
24. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

BAB II

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia;
- b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 3

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu:

- a. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Umum;
- b. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
- c. arsip dinamis dari Perangkat Daerah Kabupaten lainnya.

Pasal 4

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Unit Layanan Pengadaan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Hukum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dokumen lainnya.

Pasal 6

Penetapan tingkat klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengamanan Arsip Dinamis

Pasal 7

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia disimpan pada lemari besi.

Pasal 8

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan Pengelola Arsip Aktif di *Central File* masing masing Unit Pengolah.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di Pusat Arsip dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan tanggungjawab mengelola arsip di *Central File* dan/atau di *Records Center*.

Pasal 9

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Keamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman dalam pengaturan akses arsip dinamis.
- (2) Pengaturan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pengaturan akses arsip aktif dan arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, dimuat dalam Standard Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten masing-masing; dan
 - b. Pengaturan akses arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun dimuat dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pengamanan fisik Arsip dan informasi Dinamis

Pasal 11

- (1) Pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi.
- (2) Pengamanan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memparhatikan media arsip.

Bagian Kelima

Penyampaian fisik Arsip dan informasi Dinamis

Pasal 12

- (1) Penyampaian fisik arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi.
- (2) Penyampaian fisik arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi.

Bagian Keenam

Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 13

- (1) Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi meliputi
 - a. Penentu Kebijakan yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah.
 - b. Pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.
 - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal.
- (2) Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi meliputi :
 - a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal.
 - c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat,
Pada tanggal 22 Maret 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat,
Pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tabel Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

NO.	TINGKAT KLASIFIKA SI KEAMANA N	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	<i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus

2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasikhusus 3. <i>Firewall</i> dan sistem- sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia 	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut 4. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 5. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasikhusus 5. <i>Firewall</i> serta sistem- sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak

							untuk mengakses komputer atau jaringan kita
4.	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawasan, dan Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses 2. Penerapan kebijakan "Meja harus bersih" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus 3. Firewall dan sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

Tabel Prosedur Pengiriman Informasi

NO.	TINGKAT/ DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan lain-lain.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik

3.	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> 3. Menggunakan amplop dobel 4. Amplop segel, stempel rahasia. 5. Konfirmasi tanda terima. 6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. 	<p>atau emailrahasia.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Menggunakan persandianatau kriptografi.
4.	Sangat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menggunakanwarna kertas yangberbeda. 2. Menggunakanamplop dobelbersegel. 3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal:tandatangan). 4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadappengendalian arsip/dokumen rahasia. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesanelektronik atauemail. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau emailrahasia. 3. Menggunakanpersandian ataukriptografi 4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatupesan elektronik atauemail.

Tabel Pengguna yang Berhak Akses Arsip Dinamis

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses	Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal/ Eksternal	Publik	Penegak Hukum
1.	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√
2.	Terbatas	√	-	√	-	√

3.	Rahasia	√	-	√	-	√
4.	Sangat Rahasia	√	-	√	-	√

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	LH	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
1.	LH.	1	TATA LINGKUNGAN							Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
2.	LH.		1 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
3.	LH.		Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan							Unit pelaksana urusan
4.	LH.		1 Dokumentasi Inventarisasi			√		Tk. Eselon	Resiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
5.	LH.		2 Pedoman Inventarisasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
6.	LH.		3 Penetapan Ekoregion				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
7.	LH.			4	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
8.	LH.			5	Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
9.	LH.		2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam								
10.	LH.			1	Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
11.	LH.			2	Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
12.	LH.		2	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor								
13.	LH.			1	Evaluasi Penerapan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
14.	LH.			2	Perencanaan Lingkungan Hidup				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
15.	LH.		3	Ekonomi Lingkungan								
16.	LH.			1	Perencanaan Evaluasi Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
17.	LH.			2	Perencanaan Internalisasi Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											lingkungan hidup	
18.	LH.			3	Insentif dan Pendanaan Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
19.	LH.		4	Dampak Lingkungan								
20.	LH.			1	Bimtek Dampak Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
21.	LH.			2	Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Penilaian dokumen lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
22.	LH.			3	Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Pemeriksaan dokumen lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
23.	LH.			4	Evaluasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
24.	LH.			5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi				√	Staff		Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
25.	LH.	2	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN									
26.	LH.		1	Pemantauan dan Pengawasan								
27.	LH.			1	Industri Kimia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
28.	LH.			2	Industri Logam, Elektronika dan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Mesin						urusan lingkungan hidup	
29.	LH.			3	Aneka Industri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
30.	LH.			4	Prasarana dan Jasa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
31.	LH.			5	Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
32.	LH.			6	Peternakan dan Perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
33.	LH.			7	Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
34.	LH.			8	Kehutanan dan Holtikultura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
35.	LH.			9	Usaha Skala Kecil				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
36.	LH.			10	Transportasi Air dan Udara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
37.	LH.			11	Transportasi Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
38.	LH.			12	Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
39.	LH.		2	Evaluasi dan Pengembangan								
40.	LH.			1	Industri Kimia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
41.	LH.			2	Industri Logam, Elektronika dan Mesin				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
42.	LH.			3	Aneka Industri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
43.	LH.			4	Prasarana dan Jasa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
44.	LH.			5	Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
45.	LH.			6	Peternakan dan Perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
46.	LH.			7	Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												lingkungan hidup
47.	LH.			8	Kehutanan dan Holtikultura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
48.	LH.			9	Usaha Skala Kecil				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
49.	LH.			10	Transportasi Air dan Udara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
50.	LH.			11	Transportasi Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
51.	LH.			12	Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
52.	LH.	3	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM									
53.	LH.		1	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan								
54.	LH.			1	Pengembangan Sumber Daya Genetik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
55.	LH.			2	Pengembangan Keamanan Hayati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
56.	LH.			3	Pemanfaatan Sumber Daya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Genetik						urusan lingkungan hidup	
57.	LH.			4	Pengelolaan Sumber Daya Genetik /Pengembangan dan Pemanfaatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
58.	LH.			5	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Genetik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
59.	LH.			6	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Hayati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
60.	LH.			7	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Hayati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
61.	LH.			8	Pengendalian Kerusakan Lahan Budidaya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
62.	LH.			9	Lahan Non Budidaya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
63.	LH.		2	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat								
64.	LH.			1	Kerusakan Ekosistem Sungai				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
65.	LH.			2	Pengelolaan Kualitas Air Sungai				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											hidup	
66.	LH.			3	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Danau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
67.	LH.			4	Pengelolaan Kualitas Air Danau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
68.	LH.			5	Kerusakan Ekosistem Rawa gambut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
69.	LH.			6	Kerusakan Ekosistem Rawa bukan gambut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
70.	LH.		3	Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut								
71.	LH.			1	Pencegahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
72.	LH.			2	Penanggulangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
73.	LH.			3	Pemulihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
74.	LH.		4	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer								
75.	LH.			1	Perangkat Mitigasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											lingkungan hidup	
76.	LH.			2	Laporan inventarisasi GRK nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
77.	LH.			3	Data bidang inventarisasi GRK				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
78.	LH.			4	Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
79.	LH.			5	Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan Ozon				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
80.	LH.			6	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
81.	LH.		5	Adaptasi Perubahan Iklim								
82.	LH.			1	Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
83.	LH.			2	Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim				√			Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
84.	LH.			3	Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim				√			Unit pelaksana urusan lingkungan hidup

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
85.	LH.			4	Media kliring kerentanan perubahan iklim				√			Unit pelaksana urusan lingkungan hidup
	PBLS	PBL S	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH									
86.	PBLS		1	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun								
87.	PBLS			1	Registrasi			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
88.	PBLS			2	Notifikasi			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
89.	PBLS			3	Pemantauan Sektor industri			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
90.	PBLS			4	Pemantauan Sektor non industri			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
91.	PBLS			5	Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor industri			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
92.	PBLS			6	Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor non industri			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pengelola B3, limbah dan sampah
93.	PBLS		2	Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun								
94.	PBLS			1	Pengumpulan dan Pemanfaatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
95.	PBLS			2	Pengangkutan dan Pengolahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
96.	PBLS			3	Penimbunan dan Dumping			√				Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
97.	PBLS			4	Notifikasi Limbah Lintas Batas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
98.	PBLS			5	Rekomendasi Limbah Lintas Batas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
99.	PBLS		3	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3								
100.	PBLS			1	Pemantauan Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3,

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												limbah dan sampah
101.	PBLS			2	Pemantauan Manufaktur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
102.	PBLS			3	Pemantauan Agroindustri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
103.	PBLS			4	Pemantauan Prasarana, Jasa, dan Non Institusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
104.	PBLS			5	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
105.	PBLS			6	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Manufaktur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
106.	PBLS			7	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Agroindustri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
107.	PBLS			8	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Prasarana, Jasa, dan Non Institusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3,

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												limbah dan sampah
108.	PBLS		4		Pengelolaan Sampah							
109.	PBLS			1	Pembatasan Sampah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
110.	PBLS			2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
111.	PBLS			3	Pembentukan Dewan Adipura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
112.	PBLS			4	Penetapan Pemenang Adipura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
	PBLS		HUKUM LINGKUNGAN									
113.	PBLS		1		Hukum Administrasi Lingkungan							
114.	PBLS			1	Pengelolaan Pengaduan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
115.	PBLS			2	Pengembangan Pengaduan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											sampah	
116.	PBLS			3	Penerapan hukum administrasi lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
117.	PBLS			4	Pengembangan hukum administrasi Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
118.	PBLS		2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan								
119.	PBLS			1	Administrasi Gugatan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan		√			Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
120.	PBLS			2	Gugatan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan		√			Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
121.	PBLS			3	Kerugian Negara dan Masyarakat Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
122.	PBLS			4	Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
123.	PBLS		3	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan								
124.	PBLS			1	Administrasi Penyidikan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											urusan pengelola B3, limbah dan sampah	
125.	PBLS			2	Pelaksanaan Penyidikan		√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah	
126.	PBLS			3	Koordinasi penuntutan		√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah	
127.	PBLS			4	Evaluasi dan tindak lanjut Kordinasi Penuntutan		√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah	
128.	PBLS			5	Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
129.	PBLS		4	Perjanjian Internasional Lingkungan								
130.	PBLS			1	Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
131.	PBLS			2	Tindak Lanjut Perjanjian Internasional			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
132.	PBLS			3	Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
133.	PBLS			4	Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah
	KM		KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
134.	KM		1	Komunikasi Lingkungan								
135.	KM			1	Program Pengembangan Komunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
136.	KM			2	Evaluasi Pengembangan Komunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
137.	KM			3	Publikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
138.	KM			4	Kampanye				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
139.	KM		2	Penguatan Inisiatif Masyarakat								
140.	KM			1	Pengembangan dan Bimbingan Komunitas Pendidikan Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
141.	KM			2	Evaluasi Komunitas Pendidikan Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
142.	KM			3	Inventarisasi Kearifan Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
143.	KM			4	Revitalisasi Kearifan Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												n masyarakat
144.	KM		3	Peningkatan Peran Masyarakat								
145.	KM			1	Masyarakat Kawasan Permukiman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
146.	KM			2	Masyarakat Kawasan Rentan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
147.	KM			3	Masyarakat Petani				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
148.	KM			4	Masyarakat Nelayan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
149.	KM		4	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan								
150.	KM			1	Organisasi Sosial Dan Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
151.	KM			2	Organisasi Profesi dan Dunia Usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
			PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS									
152.	PS		1	Data dan Informasi Lingkungan								
153.	PS			1	Pengumpulan dan Pengolahan Data			√		Tk. Eselon	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
154.	PS			2	Manajemen Basis Data			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
155.	PS			3	Analisis Data dan Penyajian Informasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											lingkungan dan peningkatan kapasitas	
156.	PS			4	Pengelolaan Informasi melalui Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
157.	PS			5	Pengembangan Instrumen Layanan Informasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
158.	PS			6	Pengembangan Instrumen Analisis Data				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
159.	PS			7	Pengembangan Sistem Jaringan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												kapasitas
160.	PS			8	Pemeliharaan Jaringan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
161.	PS		2	Kelembagaan Lingkungan								
162.	PS			1	Pengembangan Kelembagaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
163.	PS			2	Tata Laksana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
164.	PS			3	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
165.	PS			4	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
166.	PS		3		Standarisasi dan Teknologi							
167.	PS			1	Standarisasi Perangkat Manajemen Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
168.	PS			2	Standarisasi Pengujian Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
169.	PS			3	Standarisasi Kompetensi Keahlian Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
170.	PS			4	Standarisasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
171.	PS			5	Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
172.	PS			6	Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
173.	PS		4	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan								
174.	PS			1	Pemantauan Kualitas Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
175.	PS			2	Kajian Kualitas Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas	
176.	PS			3	Laboratorium Rujukan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
177.	PS			4	Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
	PUS	URUSAN PERPUSTAKAAN										
178.	PUS	1	DEPOSIT BAHAN PUSTAKA									
179.	PUS		1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
180.	PUS		2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
										lingkungan dan peningkatan kapasitas
181.	PUS		3	Terbitan Badan Internasional dan Regional			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
182.	PUS		4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
183.	PUS		5	Bibliografi dan Katalog						
184.	PUS			1 Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
185.	PUS			2 Katalog Induk Nasional (KIN)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
186.	PUS			3 Katalog Dalam Terbitan (KDT)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
187.	PUS		6	Pendaftaran <i>International Standard Book Number</i> (ISBN)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
188.	PUS		7	Pendaftaran <i>International Standard Music Number</i> (ISMN)					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
189.	PUS	2	PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA									
190.	PUS		1	Akuisisi								
191.	PUS			1	Pembelian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
192.	PUS			2	Hibah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
193.	PUS			3	Hadiah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
194.	PUS			4	Tukar Menukar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
195.	PUS			5	Implementasi Undang-Undang KCKR				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
196.	PUS			6	Terbitan Internal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
197.	PUS			7	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
198.	PUS			8	Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
											saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
199.	PUS		2	Pengolahan Bahan Pustaka				√	Staff		Tidak beresiko
200.	PUS		3	Pangkalan Data Katalog Koleksi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
201.	PUS		4	Kajian Pengembangan Bahan Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
202.	PUS		5	Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
203.	PUS	3	JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI								
204.	PUS		1	Keanggotaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
205.	PUS		2	Sirkulasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
											kapasitas
206.	PUS		3	Referensi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
207.	PUS		4	Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Kajian Naskah Nusantara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
208.	PUS		5	Kerja Sama Perpustakaan							
209.	PUS			1 MoU		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
210.	PUS			2 Perjanjian Kerja Sama		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
211.	PUS			3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
212.	PUS		6	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan								
213.	PUS			1	Pengembangan <i>Situs Web</i>			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
214.	PUS			2	Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
215.	PUS			3	Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
216.	PUS			4	Pengembangan Pangkalan Data			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Kepustakaan Digital							urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
217.	PUS			5	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
218.	PUS	4	PRESERVASI BAHAN PUSTAKA									
219.	PUS		1	Konservasi								
220.	PUS			1	Perawatan Bahan Pustaka				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
221.	PUS			2	Perbaikan Bahan Pustaka				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
222.	PUS			3	Penjilidan Bahan Pustaka				√	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan
223.	PUS		2	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
224.	PUS		3	Kurasi Digital					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
225.	PUS	5	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
226.	PUS		1	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca								
227.	PUS			Pengembangan Perpustakaan								
228.	PUS			1	Perpustakaan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
229.	PUS			2	Perpustakaan Khusus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
230.	PUS			3	Perpustakaan Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
231.	PUS			4	Perpustakaan Perguruan Tinggi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
232.	PUS		2	Pembakuan Perpustakaan								
233.	PUS			1	Standar Nasional Perpustakaan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
234.	PUS			2	Standar Nasional Perpustakaan Khusus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
235.	PUS			3	Standar Nasional Perpustakaan Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
236.	PUS			4	Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
237.	PUS			5	Pedoman Perpustakaan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
238.	PUS			6	Pedoman Perpustakaan Khusus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
239.	PUS			7	Pedoman Perpustakaan Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
240.	PUS			8	Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
241.	PUS		3	Akreditasi Perpustakaan								
242.	PUS			1	Permintaan akreditasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												lingkungan dan peningkatan kapasitas
243.	PUS			2	Pemberian akreditasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
244.	PUS			3	Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
245.	PUS		4	Pangkalan Data Perpustakaan								
246.	PUS			1	Nomor Pokok Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
247.	PUS			2	Perpustakaan Berbasis Wilayah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												peningkatan kapasitas
248.	PUS		5	Pengkajian Perpustakaan								
249.	PUS		6	Pemasyarakatan Minat Baca								
250.	PUS			1	Pedoman Pembudayaan Minat Baca				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
251.	PUS			2	Kajian Pembudayaan Minat Baca				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
252.	PUS			3	Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
253.	PUS		7	Organisasi Perpustakaan								
254.	PUS			1	Forum Perpustakaan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												dan peningkatan kapasitas
255.	PUS			2	Forum Perpustakaan Khusus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
256.	PUS			3	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
257.	PUS			4	Forum Perpustakaan Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
258.	PUS			5	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
259.	PUS			6	Organisasi Perpustakaan Lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
260.	PUS	6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
261.	PUS		1	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan								
262.	PUS			1	Perencanaan Program Diklat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
263.	PUS			2	Sistem dan Metode			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
264.	PUS			3	Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar/Modul				√			
265.	PUS			4	Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												peningkatan kapasitas
266.	PUS			5	Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
267.	PUS		2	Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan								
268.	PUS			1	Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
269.	PUS			2	Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
270.	PUS			3	Teknis Pimpinan Lembaga Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												kapasitas
271.	PUS			4	Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
272.	PUS			5	Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
273.	PUS			6	Evaluasi Pasca Diklat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
274.	PUS	7	PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN									
275.	PUS		1	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan					√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
276.	PUS		2	Pembinaan Tenaga Perpustakaan				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
277.	PUS		5	Penerbitan Jurnal					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
278.	PUS		6	Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan								
279.	PUS			1	Tim Penilai Instansi (Perpustakaan Nasional)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
280.	PUS			2	Tim Penilai Pusat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
281.	PUS		7	Pemasyarakatan					√	Staff	Tidak beresiko	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
282.	PUS		8	Evaluasi Tenaga Perpustakaan			√	Staff	Tidak beresiko	
283.	PUS		9	Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan		√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
284.	PUS		10	Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan		√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
	KH	URUSAN KEHUTANAN								
285.	KH	1	PENYULUHAN							
286.	KH		1	PROGRAM KERJA PENYULUHAN			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
287.	KH		2	MATERI PENYULUHAN			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
288.	KH		3	PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
289.	KH		4	SARANA PENYULUHAN			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
290.	KH		5	TENAGA PENYULUHAN			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
291.	KH		6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
292.	KH		7	PELAKSANAAN PENYULUHAN				√	Staff		Unit pelaksana urusan kehutanan
293.	KH		8	DISEMINASI				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
294.	KH		9	EVALUASI, DESIMINASI DAN LAPORAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
295.	KH	2	PLANOLOGI KEHUTANAN								
296.	KH		1	PERENCANAAN KAWASAN HUTAN							
297.	KH			1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
298.	KH			2	Penataan Ruang Kawasan Hutan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
299.	KH			3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
300.	KH		2	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN							
301.	KH			1	Pengukuhan Kawasan Hutan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
302.	KH			2	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
303.	KH			3	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
											kehutanan
304.	KH		3	INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN							
305.	KH			1	Inventarisasi Sumber Daya Hutan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kehutanan
306.	KH			2	Pemantauan Sumber Daya Hutan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan kehutanan
307.	KH			3	Pemetaan Sumber Daya Hutan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kehutanan
308.	KH			4	Jaringan Data Spasial			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kehutanan
309.	KH		4	PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN							
310.	KH			1	Penggunaan Kawasan Hutan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan kehutanan
311.	KH			2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan kehutanan
312.	KH			3	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan kehutanan
313.	KH		5	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL PEMANFAATAN HUTAN							
314.	KH			1	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan kehutanan
315.	KH			2	Penyiapan Areal Pemantapan kawasan Hutan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
316.	KH			3	Informasi Wilayah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
317.	KH	3	BINA USAHA KEHUTANAN									
318.	KH		1	HPH / HTI / IUPHHK								
319.	KH			1	Data Areal HPH				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
320.	KH			2	SK HPH / HTI / IUPHHK				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
321.	KH			3	Kerjasama			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
322.	KH			4	Pembatalan/Penolakan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
323.	KH			5	Perpanjangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
324.	KH		2	MODAL DAN PERALATAN								
325.	KH			1	Investasi Industri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
326.	KH			2	Peralatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
327.	KH			3	Tenaga Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
328.	KH			4	Pemegang Saham			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
329.	KH			5	Neraca Perusahaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
330.	KH		3	RENCANA KARYA								
331.	KH			1	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
332.	KH			2	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
333.	KH			3	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
334.	KH			4	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
335.	KH		4	PERPANJANGAN HPH								
336.	KH		5	PRODUKSI								
337.	KH			1	Target Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
338.	KH			2	Produksi Kayu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
339.	KH			3	Produksi Non Kayu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
340.	KH		6	INDUSTRI								Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
341.	KH			1	Industri Kayu HPH				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
342.	KH			2	Industri Kayu Non HPH				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
343.	KH			3	Industri Non Kayu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
344.	KH		7	PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI								Tidak beresiko
345.	KH			1	Hutan Tanaman Industri Pulp				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
346.	KH			2	Hutan Tanaman Industri Pertukangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
347.	KH		8	PELANGGARAN DAN SANKSI								
348.	KH			1	Pemblokiran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
349.	KH			2	Denda			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
350.	KH			3	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
351.	KH		9	PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI								
352.	KH			1	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
353.	KH			2	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
354.	KH			3	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
355.	KH			4	Pengembangan Investasi Usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
356.	KH		10	PENGEMBANGAN HUTAN ALAM								
357.	KH			1	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
358.	KH			2	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
359.	KH			3	Produksi Hutan Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
360.	KH			4	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
361.	KH		11	PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN								
362.	KH			1	Hutan Tanaman Industri							
363.	KH			2	Hutan Tanaman Rakyat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
364.	KH			3	Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
365.	KH			4	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
366.	KH			5	Pembiayaan Hutan Tanaman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
367.	KH		12	IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN								
368.	KH			1	Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi							
369.	KH			2	Peredaran Hasil Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
370.	KH			3	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
371.	KH			4	Penertiban Peredaran Hasil Hutan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
372.	KH		13	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN								
373.	KH			1	Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
374.	KH			2	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
375.	KH			3	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
376.	KH		14	PEMBINAAN HUTAN								
377.	KH			1	Pembinaan HPH				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
378.	KH			2	Pembinaan TPTI				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
379.	KH	4	STANDARISASI DAN LINGKUNGAN									
380.	KH		1	STANDARISASI								
381.	KH			1	Kayu				√	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan kehutanan
382.	KH			2	Non Kayu				√	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan kehutanan
383.	KH			3	Produk				√	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan kehutanan
384.	KH			4	Proses				√	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											kehutanan	
385.	KH		2	SARANA PENGUJIAN HASIL HUTAN					√	Staff	Tidak beresiko	
386.	KH		3	PENGEMBANGAN								
387.	KH			1	Pengembangan Perusahaan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
388.	KH			2	Pengembangan Pemasaran							
389.	KH		4	PEMASARAN HASIL HUTAN					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
390.	KH		5	PENGENDALIAN LINGKUNGAN								
391.	KH			1	Amdal di Dalam Kawasan Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
392.	KH			2	Amdal di Luar Kawasan Hutan				√	Staff		Unit pelaksana urusan kehutanan
393.	KH		6	ANGKUTAN HASIL HUTAN								
394.	KH			1	Sarana dan Prasarana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
395.	KH			2	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
396.	KH		7	TATA USAHA HASIL HUTAN								
397.	KH			1	Tanda Pengenal Perusahaan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
398.	KH			2	Legalitas				√	Unit pelaksana urusan		Unit pelaksana urusan kehutanan
399.	KH			3	Palu Tok Kualitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan kehutanan
400.	KH			4	Pass Angkutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
401.	KH			5	Sertifikat Eksport Hasil Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
402.	KH	5	PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM									
403.	KH		1	KONSERVASI JENIS DAN GENETIK								
404.	KH			1	Flora dan Fauna yang Dilindungi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
405.	KH			2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
406.	KH			3	Lembaga Konservasi /Kebun Binatang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
407.	KH			4	Konvensi Keanekaragaman Hayati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
408.	KH		2	KAWASAN KONSERVASI								
409.	KH			1	Cagar Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
410.	KH			2	Suaka Margasatwa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
411.	KH			3	Taman Wisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
412.	KH			4	Taman Buru				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
413.	KH			5	Taman Nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
414.	KH			6	Taman Hutan Raya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
415.	KH			7	Hutan Lindung dan Suaka Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
416.	KH			8	Lahan Basah dan Konservasi Laut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
417.	KH			9	Gua/Karst				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
418.	KH		3	PENGAMANAN HUTAN								
419.	KH			1	Pelanggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
420.	KH			2	Bencana Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
421.	KH			3	Kebakaran Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
422.	KH			4	Sengketa Hutan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
423.	KH			5	Hama dan Penyakit				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
424.	KH		4	PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN								
425.	KH			1	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan		√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kehutanan		
426.	KH			2	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah		√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kehutanan		
427.	KH			3	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan	
428.	KH		5	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM								
429.	KH			1	Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
430.	KH			2	Pemanfaatan Jasa Lingku				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
431.	KH			3	Pemanfaatan Wisata Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
432.	KH		6	BINA CINTA ALAM								
433.	KH			1	Cinta Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
434.	KH			2	Kader Konservasi Sumber Daya Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
435.	KH			3	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
436.	KH	7	BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
437.	KH		1	PERBENIHAN								
438.	KH			1	Pemuliaan Benih			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kehutanan	
439.	KH			2	Kebun Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
440.	KH			3	Tegakan Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
441.	KH			4	Pengadaan Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
442.	KH			5	Pengujian dan Penyimpanan Benih			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
443.	KH			6	Lalu Lintas Angkutan Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
444.	KH			7	Pembibitan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
445.	KH			8	Pengembangan Sumber Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
446.	KH			9	Pengembangan Usaha Perbenihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
447.	KH			10	Pengendalian Peredaran Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
448.	KH		2	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN								
449.	KH			1	Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												kehutanan
450.	KH			2	Rehabilitasi Hutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
451.	KH			3	Rehabilitasi Lahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
452.	KH			4	Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa, dan Gambut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
453.	KH			5	Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
454.	KH		3	TANAMAN REBOISASI								
455.	KH			1	Reboisasi Lahan Kritis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
456.	KH			2	Reboisasi Areal HPH				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
457.	KH		4	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
458.	KH			1	Pemolaan Pengelolaan DAS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
459.	KH			2	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
460.	KH			3	Teknik Pengelolaan DAS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
461.	KH			4	Evaluasi Pengelolaan DAS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
					SR	R	T	B					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		
462.	KH		5	PERHUTANAN SOSIAL									
463.	KH			1	Pemolaan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
464.	KH			2	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
465.	KH			3	Pengembangan Hutan Desa					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
466.	KH			4	Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
467.	KH			5	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
468.	KH			6	Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
469.	KH		6	PENGENDALIAN PERLADANGAN									
470.	KH			1	Penentuan Lokasi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
471.	KH			2	Pemupukan Lokasi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
472.	KH			3	Pengelolaan Tanah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
473.	KH			4	Pemindahan Penduduk					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
474.	KH			5	Pembuatan Sarana					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											kehutanan	
475.	KH	8	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN									
476.	KH		1	PERENCANAAN PROGRAM PENELITIAN								
477.	KH		1	Penyusunan rencana anggaran penelitian dan pengembangan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
478.	KH		2	Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
479.	KH		2	PELAKSANAAN PENELITIAN								
480.	KH		1	Ijin Penelitian					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
481.	KH		2	Data Mentah Hasil Penelitian					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
482.	KH		3	Analisa Hasil Penelitian					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
483.	KH		4	Laporan Hasil Penelitian					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kehutanan
484.	KH		3	MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN								
485.	KH		1	Monitoring Penelitian					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
486.	KH		2	Evaluasi Penelitian					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
487.	KH		3	Rekomendasi					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												kehutanan
488.	KH		4	DISEMINASI								
489.	KH			1	Publikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
490.	KH			2	Gelar Teknologi/Seminar/Lokakarya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
491.	KH			3	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kehutanan
	AR	URUSAN KEARSIPAN										
492.	AR	1	Kebijakan									
493.	AR		1	Peraturan Daerah								
494.	AR			1	Pengkajian dan Pengusulan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
495.	AR			2	Penyusunan Raperda				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
496.	AR			3	Pembahasan Raperda dan Persetujuan Raperda				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
497.	AR			4	Penetapan Perda				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
498.	AR			5	Sosialisasi Perda				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
499.	AR		2	Tata Naskah Dinas								
500.	AR			1	Pengkajian dan pembahasan Rapergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
501.	AR			2	Pengusulan dan Penetapan Pergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
502.	AR			3	Sosialisasi Pergub tentang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
503.	AR		3	Klasifikasi Arsip								
504.	AR			1	Pengkajian dan pembahasan Rapergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
505.	AR			2	Pengusulan dan Penetapan Pergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
506.	AR			3	Sosialisasi Pergub tentang Tata Naskah Dinas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
507.	AR		4	Jadwal Retensi Arsip								
508.	AR			1	Pengkajian dan pembahasan Rapergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
509.	AR			2	Pengusulan dan Penetapan Pergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
510.	AR			3	Sosialisasi Pergub tentang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
511.	AR		5	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis								
512.	AR			1	Pengkajian dan pembahasan Rapergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
513.	AR			2	Pengusulan dan Penetapan Pergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
514.	AR			3	Sosialisasi Pergub tentang Sistem Kalsifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis				√	Staff	Tidak beresiko	
515.	AR		6		Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis							
516.	AR			1	Pengkajian dan pembahasan Rapergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
517.	AR			2	Pengusulan dan Penetapan Pergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
518.	AR			3	Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
519.	AR		7		Pedoman Pengelolaan Arsip Statis							
520.	AR			1	Pengkajian dan pembahasan Rapergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
521.	AR			2	Pengusulan dan Penetapan Pergub				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
522.	AR			3	Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
523.	AR		8		Penetapan Organisasi Kearsipan							
524.	AR			1	Unit Pengolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
525.	AR			2	Unit Kearsipan Perangkat Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
526.	AR			3	Unit Kearsipan Pemerintah Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
527.	AR	2	PEMBINAAN KEARSIPAN									
528.	AR		1	Akreditasi Kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Kearsipan,								
529.	AR			1	Proses Akreditasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	
530.	AR			2	Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	
531.	AR			3	Data Base Akreditasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	
532.	AR		2	Sertifikasi Arsiparis								
533.	AR			1	Proses Sertifikasi Arsiparis			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	
534.	AR			2	Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	
535.	AR			3	Data Base Sertifikasi Arsiparis			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	
536.	AR		3	BINA ARSIPARIS								
537.	AR			1	Formasi Jabatan Arsiparis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
538.	AR			2	Standar Kompetensi Arsiparis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
539.	AR			3	Bimbingan Konsultasi Arsiparis			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kearsipan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
540.	AR			4	Penilaian Arsiparis			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
541.	AR			5	Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
542.	AR			6	Berkas Penetapan Arsiparis Teladan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
543.	AR			7	Data Base Arsiparis			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
544.	AR		4	Bimbingan dan Konsultasi								
545.	AR			1	Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
546.	AR			2	Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
547.	AR			3	Unit Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
548.	AR			4	Sumberdaya Manusia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
549.	AR		5	SUPERVISI DAN EVALUASI								
550.	AR			1	Perencanaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
551.	AR			2	Pelaksanaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
552.	AR			3	Laporan hasil supervisi dan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Evaluasi						urusan kearsipan	
553.	AR		6		DATA BASE BIMBINGAN DAN KONSULTASI DAN SUPERVISI				√	Staff	Unit pelaksana urusan kehutanan	
554.	AR		7		FASILITAS KEARSIPAN							
555.	AR			1	SDM Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
556.	AR			2	Prasarana dan Sarana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
557.	AR		8		LEMBAGA/UNIT KEARSIPAN TELADAN							
558.	AR			1	Penyelenggaraan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
559.	AR			2	Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
560.	AR	3			PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS							
561.	AR		1		Penciptaan							
562.	AR			1	Pencatatan (Buku Agenda, Kartu Kendali dan Lembar Pengantar/Ekspedisi)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
563.	AR			2	Pendistribusian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
564.	AR		2		Penggunaan					Staff		
565.	AR			1	Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
566.	AR			2	Peminjaman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
						SR	R	T	B					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10		
												kearsipan		
567.	AR		3	Pemeliharaan										
568.	AR			1	Pemberkasan : Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
569.	AR			2	Penataan Arsip Inaktif : Pengaturan Fisik, Pengolahan Informasi Arsip, Penyusunan daftar arsip inaktif						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
570.	AR		4	Penyimpanan										
571.	AR			3	Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif					√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
572.	AR			4	Pengamanan					√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
573.	AR		5	Alih Media						√	Staff			
574.	AR			1	Kebijakan alih media						Staff		Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
575.	AR			2	Autentikasi						Staff		Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
576.	AR			3	Berita acara						Staff		Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
577.	AR			4	Daftar arsip yang alih mediakan						Staff		Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
578.	AR		6	Program Arsip vital										
579.	AR			1	Identifikasi						√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan kearsipan
580.	AR			2	Pelindungan dan pengamanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
581.	AR			3	Penyelamatan dan pemulihan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
582.	AR		7	Autentikasi Arsip Dinamis								
583.	AR			1	Pembuktian Autentisitas		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
584.	AR			2	Pendapat tenaga ahli		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
585.	AR			3	Pengujian		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
586.	AR			4	Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
587.	AR		9	Penyusutan								
588.	AR			1	Pemindahan Arsip Inaktif (Berita Acara dan Daftar Arsip Yang Dinindahkan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
589.	AR			2	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna							
590.	AR				- Panitia penilai							
591.	AR				- Penilaian panitia penilai							
592.	AR				- Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)							
593.	AR				- Penetapan arsip yang dimusnahkan							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
594.	AR				- Berita Acara Pemusnahan Arsip							
595.	AR				- Daftar arsip yang dimusnahkan							
596.	AR			3	Penyerahan arsip statis :				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
597.	AR				- Pembentukan Panitia Penilai							
598.	AR				- Notulen Rapat Panitia							
599.	AR				- Surat pertimbangan Panitia Penilai							
600.	AR				- Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan							
601.	AR				- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip							
602.	AR				- Keputusan Penetapan Penyerahan							
603.	AR				- Berita Acara Penyerahan Arsip							
604.	AR				- Daftar arsip yang diserahkan							
605.	AR		10		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis							
606.	AR			1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
607.	AR			2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
608.	AR	4			Pengelolaan Arsip Statis							
609.	AR		1		Akuisisi							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
610.	AR			1	Monitoring fisik dan daftar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
611.	AR			2	Verifikasi terhadap daftar arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
612.	AR			3	Menetapkan status arsip statis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
613.	AR			4	Persetujuan untuk Penyerahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
614.	AR			5	Penetapan arsip yang diserahkan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
615.	AR			6	Berita Acara Penyerahan Arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
616.	AR			7	Daftar arsip yang diserahkan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
617.	AR		2	Sejarah Lisan								
618.	AR			1	Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan				√			
619.	AR			2	Hasil Wawancara Sejarah Lisan :			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
620.	AR				- Berita Acara wawancara Sejarah Lisan							
621.	AR				- Laporan Kegiatan							
622.	AR				- Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip							
623.	AR		3	Daftar Pencarian Arsip Statis								
624.	AR			1	Pengumuman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan kearsipan
625.	AR			2	Akuisisi daftar pencarian arsip statis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
626.	AR		4	Penghargaan dan Imbalan								
627.	AR		5	Pengolahan								
628.	AR			1	Menata Informasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
629.	AR			2	Menata Fisik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
630.	AR			3	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik :Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis dan Guide				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
631.	AR		6	Preservasi Preventif								
632.	AR			1	Penyimpanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
633.	AR			2	Pengendalian hama terpadu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
634.	AR			3	Reproduksi (Alih Media) : Berita Acara Alih Media dan Daftar Arsip yang dialihmediakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
635.	AR			4	Perencanaan dan Penanggulangan Bencana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
636.	AR		7	Prefentif Kuratif								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
637.	AR			1	Perawatan Arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
638.	AR			2	Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
639.	AR		8	Autentikasi Arsip Statis								
640.	AR			1	Pembuktian Autentisitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
641.	AR			2	Pendapat tenaga ahli				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
642.	AR			3	Pengujian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
643.	AR			4	Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
644.	AR		5	Akses Arsip Statis								
645.	AR			1	Layanan Arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
646.	AR			2	Administrasi dan proses penyusunan Penerbitan Naskah Sumber				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
647.	AR			3	hasil naskah sumber arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
648.	AR			3	Pameran arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
649.	AR	5	JASA KEARSIPAN									
650.	AR		1	Konsultasi Kearsipan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
											urusan kearsipan
651.	AR		2	Manual Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
652.	AR		3	Penataan Arsip				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
653.	AR		4	Otomasi Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
654.	AR		5	Penyimpanan Arsip/Dokumen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
655.	AR		6	Perawatan Arsip/Dokumen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
656.	AR		7	Data Base Jasa Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
657.	AR	7	Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan								
658.	AR		1	Pembinaan Internal							
659.	AR			1 Kegiatan pembinaan terhadap Perangkat Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
660.	AR			2 Laporan hasil Pembinaan terhadap Perangkat Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
661.	AR		2	Pembinaan Eksternal							
662.	AR			1 Kegiatan pembinaan terhadap LKD Kabupaten/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Swasta dan Masyarakat							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
663.	AR			2	Laporan Hasil Pembinaan Eksternal				√	Staff	Unit pelaksana urusan kearsipan	Unit pelaksana urusan
664.	AR		3	Pengawasan Internal				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
665.	AR			1	Kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah				√			
666.	AR			2	Laporan Audit Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
667.	AR		4	Pengawasan Eksternal								
668.	AR			1	Kegiatan pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap LKD Kabupaten/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Swasta dan Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kearsipan
669.	AR			2	Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kearsipan
	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT										
670.	HM		1	Penerangan dan Publikasi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
671.	HM		2	Dengar pendapat/ <i>hearing</i>					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
672.	HM		3	Hubungan Antar Lembaga								
673.	HM			1	Forkompimda			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan Kemuasan
674.	HM			2	Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional				√	Staff		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												Kemuasan
675.	HM			3	Instansi Vertikal			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan Kemuasan
676.	HM			4	Organisasi Kemasyarakatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
677.	HM			5	Perguruan Tinggi/Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
678.	HM			6	Partai Politik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
679.	HM			7	Swasta				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
680.	HM			8	Bakohumas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
681.	HM		4	Keprotokolan								
682.	HM			1	Upacara/Acara Kedinasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
683.	HM			2	Kunjungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
684.	HM			3	Agenda Pimpinan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
685.	HM			5	Dokumentasi dan Penerbitan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan
686.	HM			6	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											Kemuasan	
687.	HM		7	Ucapan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan	
688.	HM		8	Dokumen Hosting				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan Kemuasan	
	HK	HUKUM										
689.	HK		1	Program Legislasi								
690.	HK			1	Perencanaan Program Legislasi daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
691.	HK			2	Evaluasi Program Legislasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
692.	HK		2	Produk Hukum								
693.	HK			1	Proses Penyusunan Peraturan Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
694.	HK			2	Proses Penyusunan Peraturan Bupati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
695.	HK			3	Proses Penyusunan Keputusan Bupati			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
696.	HK		2	Perjanjian Kerjasama								
697.	HK			1	Kerjasama Dalam Negeri			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
698.	HK			2	Kerjasama Luar Negeri			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
699.	HK		3	Bantuan Hukum								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
700.	HK			1	Bantuan Hukum Kasus Perdata		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
701.	HK			2	Bantuan Hukum Kasus Pidana		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
702.	HK			3	Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
703.	HK		4	Telaah Hukum								
704.	HK			1	Telaah Hukum Internal		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
705.	HK			2	Telaah Hukum Eksternal		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
706.	HK		5	Sosialisasi Hukum					√	Staff		
707.	HK		6	Dokumentasi Hukum								
708.	HK			1	Kegiatan Pengembangan Dokumentasi Hukum				√			Unit pelaksana urusan hukum
709.	HK			2	Data Base Dokumentasi HUKUM			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan hukum
710.	HK		7	Hak Atas Kekayaan Intelektual					√	Staff	Tidak beresiko	
711.	HK		8	Penegakan Hukum								
712.	HK			1	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
713.	HK			2	Tindak lanjut Kegiatan Penegakan Hukum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
714.	HK		9	Penyidik Pegawai Negeri Sipil							
715.	HK			1	Program Pengembangan PPNS			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
716.	HK			2	Pembinaan Personal PPNS			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan hukum
	TU	KETATAUSAHAAN									
717.	TU		1	Persuratan							
718.	TU			1	Pengurusan Surat Masuk			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan ketatausahaan
719.	TU			2	Pengurusan Surat Keluar			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan ketatausahaan
720.	TU			3	Korespondensi Internal			√	Staff	Unit pelaksana urusan hukum	Unit pelaksana urusan ketatausahaan
721.	TU		2	Penggandaan Surat Masuk			√	Staff			Unit pelaksana urusan hukum
722.	TU		3	Agenda Kegiatan			√	Staff			Unit pelaksana urusan hukum
723.	TU		4	Rapat/Rakor/Rakernis			√	Staff			Unit pelaksana urusan hukum
724.	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA									
725.	OT		1	Organisasi							
726.	OT			1	Struktur Organisasi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan ketatausahaan
727.	OT			2	Uraian Tugas			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan ketatausahaan
728.	OT			3	Analisis Jabatan dan Beban Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan ketatausahaan
729.	OT		2		Hubungan / Mekanisme Kerja				√	Staff		Tidak beresiko
730.	OT		3		Ketatalaksanaan				√	Staff		Tidak beresiko
	PL	PERLENGKAPAN										
731.	PL		1		Analisa Kebutuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
732.	PL		2		Tata Ruang		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perlengkapan
733.	PL		2		Daftar Perkenalan Mampu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
734.	PL		3		Penerimaan / Realisasi Pengadaan							
735.	PL			0	Alat Tulis Kantor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
736.	PL			1	Perlengkapan Kantor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
737.	PL			2	Tanah dan Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
738.	PL			3	Kendaraan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
739.	PL			4	Instalasi/Jaringan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
740.	PL			5	Peralatan Kearsipan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
741.	PL		4		Penyimpanan/ pergudangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
742.	PL		5		Distribusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
743.	PL		6		Pemeliharaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
744.	PL		7		Inventarisasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
745.	PL		8		Penghapusan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perlengkapan
746.	RT		KERUMAHTANGGAAN									
747.	RT		1		Perjalanan Dinas Pimpinan							
748.	RT			1	Dalam Negeri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
749.	RT			2	Luar Negeri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
750.	RT		2		Rapat Pimpinan							
751.	RT			1	Sarana dan Prasarana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
752.	RT			2	Jamuan Rapat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												an
753.	RT		3	Kantor								
754.	RT			1	Pemeliharaan gedung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
755.	RT			2	Perlengkapan Kantor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
756.	RT			3	Air, Listrik dan Telekomunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
757.	RT			4	Keamanan Kantor			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
758.	RT			5	Kebersihan Kantor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
759.	RT			6	Jamuan Tamu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
760.	RT			7	Halaman dan Taman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
761.	RT		4	Rumah Dinas								
762.	RT			1	Pemeliharaan gedung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												an
763.	RT			2	Perlengkapan Rumah Dinas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
764.	RT			3	Air, Listrik dan Telekomunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
765.	RT			4	Keamanan Rumah Dinas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
766.	RT			5	Kebersihan Rumah Dinas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
767.	RT			6	Jamuan Tamu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
768.	RT			7	Halaman dan Taman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
769.	RT		5	Fasilitas Pimpinan								
770.	RT			1	Kendaraan Dinas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
771.	RT			2	Pengawasan dan Pengamanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kerumahtanggan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
772.	RT			3	Telekomunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kerumahtanggan
		PERENCANAAN										
773.	PR		1	Usulan Perencanaan								
774.	PR			1	Aspirasi DPRD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
775.	PR			2	Usulan langsung Masyarakat On Line dan manual				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
776.	PR			3	Usulan Perangkat Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
777.	PR			4	Usulan Unit Kerja dalam Perangkat Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
778.	PR		3	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)								
779.	PR			1	Musrenbang RPJP/RPJM				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
780.	PR			2	Musrenbang RKPD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
781.	PR			3	Forum Perangkat Daerah							
782.	PR		2	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
783.	PR			1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)				√	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
784.	PR			2	Rencana Pembangunan				√	Tidak	Unit pelaksana	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Jangka Menengah Daerah (RPJMD)					beresiko	urusan perencanaan	urusan
785.	PR			3	Rencana Strategis Perangkat Daerah				√	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
786.	PR		3	Rencana Kerja Tahunan								Unit pelaksana urusan perencanaan
787.	PR			1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
788.	PR			2	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
789.	PR			3	Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja pada Perangkat Daerah				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
790.	PR			4	Penetapan Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
791.	PR			5	Penetapan Kinerja Pejabat Esselon 3 dan Esselon 4				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan
792.	PR		4	Rencana Pembangunan Wilayah Startegis								
793.	PR			1	Pusat Pertumbuhan Nasional dan Regional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
794.	PR			2	Metro Politan Bandung dan Bodebekkapur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
795.	PR			3	Pembangunan Bagian Wilayah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
796.	PR			4	Pembangunan Tematik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan perencanaan
797.	PR			5	Pembangunan Sektoral				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
798.	PR		5	Pembangunan Daerah Perbatasan Kabupaten Bandung Barat								
799.	PR			1	Kajian Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
800.	PR			2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
801.	PR			3	Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perencanaan
802.	PR		6	Indikator Keberhasilan Pembangunan								Unit pelaksana urusan
803.	PR			1	Kajian penetapan Indikator Keberhasilan Pembangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
804.	PR			2	Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Pembangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
805.	PR		7	Kerjasama Perencanaan								
806.	PR			1	Kegiatan Komite				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana
807.	PR			2	Rekomendasi Komite Perencana			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perencanaan
808.	PR			3	Kerjasama Perencanaan dengan Perguruan Tinggi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perencanaan
809.	PR			4	Kerjasama Perencanaan dengan Pemerintah Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												perencanaan
810.	PR			5	Kerjasama Perencanaan dengan Luar Negeri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perencanaan
811.	PR			8	Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana)							
812.	PR			1	Kajian Pengembangan Perencana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
813.	PR			2	Pembinaan Perencana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
814.	PR			9	Laporan							
815.	PR			1	Laporan Berkala (Laporan Triwulan dan Semesteran)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
816.	PR			2	Laporan Tahunan Esselon 3				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
817.	PR			3	Laporan Tahunan Perangkat Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
818.	PR			4	Laporan Khusus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perencanaan
819.	PR			5	Progress Report				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
820.	PR			6	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
821.	PR			10	Evaluasi Program / Kegiatan							
822.	PR			1	Unit Kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												perencanaan
823.	PR			2	Lembaga/Instansi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan perencanaan
824.	PR		11	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan					√	Staff	Tidak beresiko	
825.	PR		12	Konsultasi perencanaan pembangunan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
826.	PR		13	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan perencanaan
827.	PR		14	Perencanaan Pendanaan Pembangunan								Unit pelaksana urusan perencanaan
828.	PR			1	Pendanaan Luar Negeri dan Hibah				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan perencanaan
829.	PR			2	Pendanaan Dalam Negeri				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan perencanaan
830.	PR			3	Kerjasama Pembangunan Internasional				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan perencanaan
831.	PR			4	Surat Berharga Syariah Negara				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan perencanaan
832.	PR			5	Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan perencanaan
833.	PR			6	Corporate Social Responcibility (CSR)				√	Staff	Unit pelaksana urusan perencanaan	Unit pelaksana urusan perencanaan
	PP	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
834.	PP		1	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah							
835.	PP			1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
836.	PP			2	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
837.	PP		2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi							
838.	PP			1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
839.	PP			2	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
840.	PP		3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya							
841.	PP			1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
842.	PP			2	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												n
843.	PP		4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi								
844.	PP			1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembagan
845.	PP			2	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembagan
846.	PP		5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna								
847.	PP			1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembagan
848.	PP			2	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembagan
849.	PP			3	Pemasyarakatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembagan
850.	PP		6	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
851.	PP			1	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Antar Pemerintah Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
852.	PP			2	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dengan Peguruan Tinggi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
853.	PP			3	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Swasta dan Masyarakat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
854.	PP			4	Dewan Research Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
855.	PP		7	Hasil Penelitian dan Pengembangan								
856.	PP			1	Data Base Hasil Penelitian dan Pengembangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
857.	PP			2	Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
858.	PP			3	Penerbitan jurnal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pengembangan
859.	PP		8	Pengembangan Inovasi Daerah								
860.	PP			1	Bantuan Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah				√	Staff		Unit pelaksana urusan
861.	PP			2	Penghargaan Inovasi Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
862.	PP		9	Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan								
863.	PP			1	Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
864.	PP			2	Pembinaan Peneliti				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan
	PW	PENGAWASAN										
865.	PW		1	Rencana Kegiatan Pengawasan								
866.	PW			1	Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
867.	PW			2	Rencana Kegiatan Pengawasan Khusus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
868.	PW		2	Pengawasan Tahunan						Tk. Eselon		
869.	PW			1	Kegiatan Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan			√		Staff		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pengawasan
870.	PW			2	Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja Tahu Berjalan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
871.	PW			3	Tindak Lanjut Hasil Audit			√		Staff		Unit pelaksana urusan pengawasan
872.	PW		3	Pengawasan Khusus								
873.	PW			1	Kegiatan audit khusus		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
874.	PW			2	Laporan Hasil Audit Khusus		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
875.	PW			3	Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
876.	PW		4	Pengaduan Masyarakat								
877.	PW			1	Pusat Pengaduan Masyarakat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
878.	PW			2	Penanganan / Tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
879.	PW			3	Evaluasi Penanganan / Tindak Lanjut				√	Staff		Unit pelaksana urusan pengawasan
880.	PW		5	Pengawasan Melekat								
881.	PW			1	Sosialisasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
882.	PW			2	Kegiatan Pengawasan Melekat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
883.	PW			3	Evaluasi Kegiatan Pengawasan Melekat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
884.	PW		6	Pemantauan								
885.	PW		7	1	Pemantauan pelaksanaan kegiatan/program				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
886.	PW			2	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
887.	PW			3	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengawasan
888.	PW		8	Sumberdaya Manusia Pengawasan (Auditor)								
889.	PW			1	Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
890.	PW			2	Pembinaan Auditor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
891.	PW		9	Pengembangan Akuntabilitas Publik								
892.	PW			1	Desk Akuntabilitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
893.	PW			2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
894.	PW			3	Pemantauan Akuntabilitas Instansi Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan
895.	PW			4	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengawasan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
	KU	KEUANGAN									
896.	KU	1	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN								
897.	KU		1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)							
898.	KU			1	Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
899.	KU			2	Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
900.	KU			3	KUA beserta Nota Kesepakatanny			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
901.	KU			4	Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
902.	KU			5	Nota Kesepakatan PPA			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
903.	KU			6	Prioritas Plafon Anggaran			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
904.	KU			7						
905.	KU		2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)							
906.	KU			1	Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
907.	KU			2	Dokumen RKA-SKPD			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
908.	KU			3							
909.	KU		3		Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan							
910.	KU			1	Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD:				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
911.	KU			2	Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
912.	KU			3	Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
913.	KU			4	Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
914.	KU			5	Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
915.	KU			6	Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
916.	KU			7	Penetapan Perda APBD oleh Bupati beserta Penjabarannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
917.	KU			8	Peraturan Daerah (PERDA)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					tentang APBD							urusan keuangan
918.	KU		4		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)							
919.	KU			1	Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
920.	KU			2	Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
921.	KU			3	KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
922.	KU			4	Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
923.	KU			5	Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
924.	KU			6	Prioritas Plafon Anggaran Perubahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
925.	KU		5		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan							
926.	KU			1	Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
927.	KU			2	Dokumen RKA-SKPD Perubahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												keuangan
928.	KU		6	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan								
929.	KU			1	Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan : Nota Keuangan Pemerintah dan Materi RAPBD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
930.	KU			2	Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
931.	KU			3	Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
932.	KU			4	Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
933.	KU			5	Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
934.	KU			6	Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
935.	KU			7	Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Bupati beserta Penjabarannya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
936.	KU			8	Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
		PENYUSUNAN ANGGARAN										
937.	KU		1		Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
938.	KU		2		Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
939.	KU		3		Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
940.	KU		4		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
941.	KU	3	PELAKSANAAN ANGGARAN								Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
942.	KU		1		Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
943.	KU		2		Pendapatan Asli Daerah					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
944.	KU			1	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Kendaraan Bermotor			√				Unit pelaksana urusan keuangan
945.	KU			2	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			√				Unit pelaksana urusan keuangan
946.	KU			3	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			√				Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					(PBBKB)							
947.	KU			4	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Air Permukaan			√				Unit pelaksana urusan keuangan
948.	KU			5	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Rokok			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
949.	KU			6	Surat Ketetapan Retribusi Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
950.	KU			7	Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Umum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
951.	KU			8	Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
952.	KU			9	Bukti Pembayaran Retribusi Perijinan Tertentu			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
953.	KU			10	Bukti Pembayaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
954.	KU			11	Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
955.	KU			12	Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
956.	KU			13	Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
957.	KU			14	Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												keuangan
958.	KU			15	Bukti Penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
959.	KU			16	Bukti Penerimaan Bunga dan atau jasa Giro pada bank			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
960.	KU		3	Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan								
961.	KU			1	Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
962.	KU			2	Dana Bagi Hasil Untuk Kabupaten /Kota				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
963.	KU			3	Dana Alokasi Umum (DAU)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
964.	KU			4	Daerah yang Menerima DAU				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
965.	KU			5	Dana Alokasi Khusus (DAK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
966.	KU		4	Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah						Staff		
967.	KU			1	Alokasi Dana Penyesuaian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
968.	KU			2	Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Operasional Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
969.	KU			3	Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
970.	KU			4	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
971.	KU			5	Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga				√	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan	Unit pelaksana urusan keuangan
972.	KU		5		Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
973.	KU		6		Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
974.	KU		7		Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
975.	KU		8		Dokumen Piutang Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
976.	KU		9		Dokumen Pengelolaan Investasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
977.	KU		10		Dokumen Belanja Langsung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
978.	KU			1	Belanja Pegawai			√		Staff	Unit pelaksana urusan	Unit pelaksana urusan keuangan
979.	KU			2	Belanja Barang Jasa			√		Staff	Unit pelaksana urusan	Unit pelaksana urusan keuangan
980.	KU			3	Belanja Modal			√		Staff	Unit pelaksana urusan	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
					SR	R	T	B					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		
981.	KU		11	Dokumen Belanja tidak langsung					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
982.	KU			1	Pegawai					√	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
983.	KU			2	Hibah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
984.	KU			3	Belanja Bagi Hasil					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
985.	KU			4	Subsidi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
986.	KU			5	Bunga					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
987.	KU			6	Bantuan Sosial					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
988.	KU			7	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
989.	KU			8	Belanja Tidak Terduga					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
990.	KU	4	Pembiayaan Daerah										
991.	KU		1	Bukti Penerimaan Pembiayaan									
992.	KU			1	SiLPA					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
993.	KU			2	Dana Cadangan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
994.	KU			3	Dana Bergulir					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
995.	KU			4	Pinjaman Daerah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
996.	KU			5	Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
997.	KU		2	Bukti Pengeluaran Pembiayaan							
998.	KU			1	Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
999.	KU			2	Penyertaan Modal Pada BUMD			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1000.	KU			3	Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1001.	KU			4	Pengeluaran Dari Dana Cadangan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1002.	KU			5	Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1003.	KU			6	Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1004.	KU	5	Dokumen Penatausahaan Keuangan								
1005.	KU		1	Surat Penyediaan Dana (SPD)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1006.	KU		2	Surat Permohonan Pembayaran (SPP)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1007.	KU		3	Surat Perintah Membayar (SPM)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1008.	KU		4	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1009.	KU	6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
1010.	KU		1	Buku Kas Umum (BKU)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1011.	KU		2	Buku Kas Pembantu (BKP)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1012.	KU		3	Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1013.	KU		4	Rekening Koran Bank			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1014.	KU		5	Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1015.	KU		6	Bukti Penyetoran Pajak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1016.	KU		7	Register Penutupan Kas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1017.	KU		8	Berita Acara Pemeriksaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1018.	KU		9	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Arsip			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1019.	KU		10	Laporan Pendapatan Negara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1020.	KU		11	Laporan Keadaan Kredit Anggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1021.	KU	7		Daftar Gaji				√			

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1022.	KU	8	Kartu Gaji				√			
1023.	KU	9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1024.	KU	10	Laporan Keuangan Tahunan							
1025.	KU		1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1026.	KU		2 Neraca				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1027.	KU		3 Laporan Arus Kas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1028.	KU		4 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1029.	KU	11	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI							
1030.	KU		1 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1031.	KU		2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1032.	KU		3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1033.	KU		4 Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat Menyurat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1034.	KU		5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana			√		Staff		Unit pelaksana urusan keuangan
1035.	KU		6 Aplikasi Penarikan Dana BLN							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
				berikut Lampirannya							
1036.	KU		1	Reimbursement			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1037.	KU		2	Direct Payment/Transfer Procedure			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1038.	KU		3	Special Commitment/ L/C Opening			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1039.	KU		4	Special Account/Imprest Fund			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1040.	KU		7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1041.	KU		8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1042.	KU		9	Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : No			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1043.	KU		10	Staff Appraisal Report			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1044.	KU		11	Report/Laporan yang terdiri dari :							
1045.	KU		1	Progress Report				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1046.	KU		2	Monthly Report				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1047.	KU		3	Quarterly Report				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH			
						SR	R	T	B						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
												keuangan			
1048.	KU		12	Laporan Hutang Daerah :											
1049.	KU			1	Laporan Pembayaran Hutang Daerah						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan	
1050.	KU			2	Laporan Posisi Hutang Daerah						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan	
1051.	KU		13	Completion Report/Annual Report							√	Tk. Eselon			
1052.	KU		14	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri							√				
1053.	KU	12	PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)												
1054.	KU		1	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:											
1055.	KU			1	Kuasa Pengguna Anggaran							√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1056.	KU			2	Kuasa Pengguna Barang/Jasa							√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1057.	KU			3	Pejabat Pembuat Komitmen							√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1058.	KU			4	Pejabat Pembuat Daftar Gaji							√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1059.	KU			5	Pejabat Penandatanganan SPM							√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1060.	KU			6	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran							√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												keuangan
1061.	KU			7	Pengelola Barang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1062.	KU			8	Berita Acara Serah Terima Jabatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1063.	KU	13	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)									
1064.	KU		1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1065.	KU		2	Kebijakan Akuntansi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1066.	KU		3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1067.	KU		4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1068.	KU	14	PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN									
1069.	KU		1	Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1070.	KU		2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya								
1071.	KU		1	SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1072.	KU			2	Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1073.	KU			3	Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1074.	KU		3		Buku Rekening Bank			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1075.	KU		4		Keputusan Pembukuan Rekening			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1076.	KU		5		Pembukuan anggaran terdiri dari :			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1077.	KU			1	Buku Kas Umum (BKU),							Unit pelaksana urusan keuangan
1078.	KU			2	Buku Pembantu							Unit pelaksana urusan keuangan
1079.	KU			3	Register dan Buku Tambahan							Unit pelaksana urusan keuangan
1080.	KU			4	Daftar Pembukuan Selama rekening masih aktif							Unit pelaksana urusan keuangan
1081.	KU			5	Pencairan/Pengeluaran (DPP)							Unit pelaksana urusan keuangan
1082.	KU			6	Daftar Pembukuan							Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Pencairan/Pengeluaran (DPP)							urusan keuangan
1083.	KU			7	Daftar Himpunan Pencairan (DHP)							Unit pelaksana urusan keuangan
1084.	KU			8	Rekening Koran							Unit pelaksana urusan keuangan
1085.	KU	15	PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN									
1086.	KU		1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1087.	KU		2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn, dan Denda					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1088.	KU	16	PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU									
1089.	KU		1	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD								
1090.	KU			1	Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1091.	KU			2	Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1092.	KU			3	Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					RKA KPUD dan Panwas							
1093.	KU			4	Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1094.	KU			5	Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1095.	KU			6	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1096.	KU			7	Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	
1097.	KU			8	Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1098.	KU			9	Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1099.	KU	10	PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU									
1100.	KU		1		Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
1101.	KU		2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1102.	KU		3	Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat,			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1103.	KU		4	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1104.	KU		5	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1105.	KU	11	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU								
1106.	KU		1	Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1107.	KU		2	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1108.	KU		3	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1109.	KU	12	PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH								
1110.	KU		1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1111.	KU		2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1112.	KU		3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1113.	KU			1	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1114.	KU			2	MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)			√				
1115.	KU			3	Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan keuangan
1116.	KU		4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:								
1117.	KU			1	Tuntutan Perbendaharaan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
1118.	KU			2	Tuntutan Ganti Rugi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan keuangan
	KP	URUSAN KEPEGAWAIAN										
1119.	KP	1	Formasi Pegawai									
1120.	KP		1	Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai analisa Jabatan dan Beban Kerja					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1121.	KP		2	Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1122.	KP		3	Persetujuan Menpan dan RB					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1123.	KP		4	Penetapan Formasi PNS					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1124.	KP		5	Penetapan Formasi Khusus				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1125.	KP	2	Pengadaan Pegawai									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1126.	KP		1	Proses Penerimaan Pegawai							
1127.	KP			a	Pengumuman			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1128.	KP			b	Seleksi Administrasi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1129.	KP			c	Pemanggilan Peserta Test			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1130.	KP			d	Pelaksanaan Ujian Tertulis			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1131.	KP			e	Keputusan Hasil Ujian			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1132.	KP			f	Wawancara			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1133.	KP		2	Penetapan Pengumuman Kelulusan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1134.	KP		3	Berkas Lamaran yang tidak diterima				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1135.	KP		4	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP :				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1136.	KP			a	Surat Lamaran					Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1137.	KP			b	Ijazah					Unit pelaksana urusan kepegawaian	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1138.	KP			c	SKCK						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1139.	KP			d	Kartu Kuning						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1140.	KP			e	Surat Keterangan Kesehatan						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1141.	KP		5		Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1142.	KP		6		SK CPNS/PNS Kolektif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1143.	KP	3			Pembinaan Karir Pegawai							
1144.	KP		1		Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai :				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1145.	KP				Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin							
1146.	KP				Laporan Kegiatan Pengembangan Diri							
1147.	KP		2		Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1148.	KP		3		Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Standar Kinerja Pegawai (SKP)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1149.	KP		4		Daftar Usul Penetapan Angka Kredit			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1150.	KP		5		Disiplin Pegawai :				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1151.	KP			Daftar Hadir							
1152.	KP			Rekapitulasi Daftar Hadir							
1153.	KP		6	Berkas Hukuman Disiplin		√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1154.	KP		7	Penghargaan dan Tanda Jasa			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1155.	KP	4		Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai			√	Tk. Eselon			
1156.	KP	5		Mutasi Pegawai							
1157.	KP		1	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1158.	KP		2	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1159.	KP		3	Mutasi Keluarga			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1160.	KP		4	Surat Izin Pernikahan/Perceraian						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1161.	KP			Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1162.	KP		5	Surat Nikah /Cerai						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1163.	KP		6	Akte Kelahiran Anak						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1164.	KP		7	Surat Keterangan Adopsi Anak						Unit pelaksana	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
										urusan kepegawaian	
1165.	KP		8	Surat Keterangan Meninggal Dunia						Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1166.	KP		9	Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1167.	KP		10	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1168.	KP		11	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1169.	KP		12	Peninjauan Masa Kerja			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1170.	KP		13	Berkas Baperjakat		√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1171.	KP	6	Administrasi Pegawai								
1172.	KP		1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1173.	KP		2	Cuti Besar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1174.	KP		3	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1175.	KP		4	Cuti Alasan Penting				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1176.	KP		5	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)				√	Staff	Unit pelaksana urusan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											kepegawaian	
1177.	KP		6	Dokumentasi Identitas								
1178.	KP			1	Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu				√	Staff	Tidak beresiko	
1179.	KP			2	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1180.	KP			3	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1181.	KP			4	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1182.	KP		7	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1183.	KP		8	Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1184.	KP	7	Kesejahteraan Pegawai					√	Staff			
1185.	KP		1	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1186.	KP		2	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1187.	KP		3	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1188.	KP		4	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	
1189.	KP		5	Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
											kepegawaian
1190.	KP		6	Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1191.	KP		7	Berkas tentang Pemberian Tali Kasih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1192.	KP		8	Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1193.	KP		9	Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi				√	Staff	Unit pelaksana urusan kepegawaian	Unit pelaksana urusan
1194.	KP	8		Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1195.	KP	9		Perselisihan /Sengketa Kepegawaian		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1196.	KP	10		Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Meninggal			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1197.	KP	11		Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1198.	KP		a	Berkas Lamaran yang diterima							
1199.	KP		b	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya							
1200.	KP		c	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN							
1201.	KP		d	SK Pengangkatan CPNS							
1202.	KP		e	Hasil Pengujian Kesehatan							
1203.	KP		f	SK Pengangkatan PNS							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1204.	KP		g	SK Peninjauan Masa Kerja						
1205.	KP		h	SK Kenaikkan Pangkat						
1206.	KP		i	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan						
1207.	KP		j	Surat Pernyataan Pelantikan						
1208.	KP		k	SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional						
1209.	KP		l	SK Perpindahan Wilayah Kerja						
1210.	KP		m	SK Perpindahan Antar Instansi						
1211.	KP		n	SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)						
1212.	KP		o	Berita Acara Pemeriksaan						
1213.	KP		p	SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS						
1214.	KP		q	SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk						
1215.	KP		r	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan						
1216.	KP		s	SK Pemberian Uang Tunggu						
1217.	KP		t	SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara						
1218.	KP		u	SK Pengalihan PNS						
1219.	KP		v	SK Pemberhentian sebagai PNS						
1220.	KP		w	SK Pemberhentian Sementara						
1221.	KP		x	Surat Keterangan Pernyataan Hilang						
1222.	KP		y	Surat Keterangan Kembalinya						

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				PNS yang dinyatakan hilang						
1223.	KP		z	SK Penggantian Nama						
1224.	KP		aa	Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran						
1225.	KP		bb	Akta Nikah/Cerai						
1226.	KP		cc	Akta Kelahiran						
1227.	KP		dd	Isian Formulir PUPPNEMSERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
1228.	KP		ee	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan						
1229.	KP		ff	Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol						
1230.	KP		gg	Surat Keterangan Mutasi Keluarga						
1231.	KP		hh	Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang						
1232.	KP		ii	Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan						
1233.	KP		jj	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional						
1234.	KP		kk	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus						
1235.	KP		ll	Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala						
1236.	KP		mm	Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri						
1237.	KP		nn	Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri						
1238.	KP		oo	Kartu Daftar Ulang (Kardaf) PNS						
1239.	KP		pp	Ijazah/Sertifikat						
1240.	KP		qq	SK Penempatan/Penarikan Pegawai						

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1241.	KP		rr	SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk						
1242.	KP		ss	Surat Pertimbangan Status PNS						
1243.	KP		tt	SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS						
1244.	KP		uu	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai						
1245.	KP		vv	SK Pensiun						
1246.	KP	12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara							
1247.	KP		Bupati dan Wakil Bupati Provinsi				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1248.	KP	13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kepegawaian
1249.	KP		a	Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1250.	KP		b	Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kepegawaian
1251.	KP		c	Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan kepegawaian
	KK	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								
1252.	KK	1	Pengendalian Penduduk							
1253.	KK		1	Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk						

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1254.	KK			1	Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Pengumpulan dan Pengolahan Data)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1255.	KK			2	Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Evaluasi dan Pelaporan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1256.	KK			3	Penyiapan fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1257.	KK			4	Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (Evaluasi dan Pelaporan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1258.	KK		2	Perencanaan pengendalian penduduk								
1259.	KK			1	Data dan Evaluasi data Profil dan Proyeksi Penduduk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1260.	KK			2	Penetapan parameter pengendalian penduduk (Penetapan sasaran parameter dan Evaluasi sasaran parameter)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1261.	KK			3	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk (Pemanfaatan profil dan proyeksi, Pemanfaatan Parameter)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1262.	KK		3	Kerja sama pendidikan kependudukan								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1263.	KK			1	Pengembangan sistem jalur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1264.	KK			2	Pengembangan Materi alur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1265.	KK			3	Monitoring dan evaluasi alur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1266.	KK		4	Analisis dampak kependudukan								
1267.	KK			1	Analisis Sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1268.	KK			2	Analisis Ekonomi							Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1269.	KK			3	Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1270.	KK			4	Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1271.	KK	2	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1272.	KK		1	Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah							
1273.	KK			1	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1274.	KK			2	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1275.	KK			3	Kualitas, Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1276.	KK		2	Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta							
1277.	KK			1	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1278.	KK			2	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1279.	KK			3	Kualitas, Standarisasi, monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1280.	KK		3	Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus							
1281.	KK			1	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal,			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					terpencil dan perbatasan							dan KB
1282.	KK			2	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1283.	KK			3	Peningkatan akses dan Partisipasi Kesertaan keluarga berencana pria				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1284.	KK		4	Kesehatan Reproduksi								
1285.	KK			1	Kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1286.	KK			2	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1287.	KK			3	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1288.	KK	3	Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga									
1289.	KK		1	Bina keluarga Balita dan Anak								
1290.	KK			1	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak (Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak , Pengembangan Kemitraan Bina Kelurga dan anak)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1291.	KK			2	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan dan evaluasi bina				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					keluarga Balita dan anak							kependudukan dan KB
1292.	KK		2		Bina ketahanan remaja							
1293.	KK			1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur Pendidikan dan Jalur masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1294.	KK			2	Monitoring dan Pelaporan dan evaluasi bina ketahanan Remaja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1295.	KK		3		Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan							
1296.	KK			1	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan keluarga Rentan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1297.	KK			2	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan (Pengembangan kelompok dan kemitraan Bina Ketahanan Keluarga lansia dan Renta)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1298.	KK			3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1299.	KK		4		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga							
1300.	KK			1	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1301.	KK			2	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					keluarga						kependudukan dan KB	
1302.	KK			3	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga (Pengembangan Administrasi, Keuangan dan pemasaran Kelompok Usaha Bersama)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1303.	KK			4	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1304.	KK		5	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera								
1305.	KK			1	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1306.	KK			2	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga sejahteraan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1307.	KK			3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1308.	KK	4	Advokasi dan Informasi									
1309.	KK		1	Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi								Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1310.	KK			1	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1311.	KK			2	Advokasi dan pencitraan				√	Staff		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1312.	KK			3	Promosi				√	Staff		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1313.	KK			4	Sarana Produksi Media komunikasi				√	Staff		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1314.	KK			5	Produk media komunikasi				√	Staff		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1315.	KK		2	Bina hubungan antar lembaga								Unit pelaksana urusan kepegawaian
1316.	KK			1	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi				√	Staff		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1317.	KK			2	Pengembangan dan Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				√	Staff		Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1318.	KK			3	Pengembangan dan Penguatan hubungan				√	Staff		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					dengan lembaga nonpemerintah						kependudukan dan KB	
1319.	KK		3		Bina lini lapangan							
1320.	KK			1	Pengembangan tenaga lini lapangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1321.	KK			2	Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1322.	KK			3	Pengembangan Institusi masyarakat pedesaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1323.	KK			4	Monitoring dan evaluasi Institusi masyarakat pedesaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1324.	KK			5	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan mekanisme operasional lini lapangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1325.	KK			6	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1326.	KK		4		Pelaporan dan statistik							
1327.	KK			1	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan (Perumusan pola ,Sistem pencatatan dan pelaporan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1328.	KK			2	Monitoring dan Evaluasi Sistem pencatatan dan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					pelaporan						kependudukan dan KB	
1329.	KK			3	Pengumpulan dan pengolahan data				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1330.	KK			4	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1331.	KK			5	Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga					Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1332.	KK		5	Teknologi Informasi dan Dokumentasi								
1333.	KK			1	Pengembangan sistem aplikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1334.	KK			2	Pengelolaan Bank data					Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1335.	KK			3	Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1336.	KK			4	Pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB
1337.	KK			5	Dokumentasi dan Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan kependudukan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
												dan KB	
1338.	KK			6	Pengelolaan situs BKKBN dan Media konferensi)								
	KUKM	URUSAN KOPERASI DAN UMKM											
1339.	KUKM	1	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM										
1340.	KUKM		0	ORGANISASI DAN BADAN HUKUM KOPERASI						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1341.	KUKM			0	Organisasi Koperasi dan UKM								
1342.	KUKM			1	Badan Hukum Koperasi (Penata usahaan badan hukum koperasi, Evaluasi Badan Hukum Koperasi)								
1343.	KUKM			2	Penelaahan Kasus Hukum (Kasus hukum Koperasi, kasus hukum UKM)								
1344.	KUKM		1	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1345.	KUKM			0	Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi								
1346.	KUKM			1	Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan UKM								
1347.	KUKM			2	Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan (Produk peraturan Perundang-undangan Pusat, Peraturan Daerah)								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1348.	KUKM		2	TATA LAKSANA KOPERASI DAN UKM				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1349.	KUKM			0	Tata Laksana Koperasi (tata laksana Koperasi Primer, Tata laksana Koperasi Sekunder)						
1350.	KUKM			1	Tata Laksana UKM (Tata laksana Usaha Kecil, tata Laksana Usaha Menengah)						
1351.	KUKM			2	Klasifikasi Koperasi dan UKM						
1352.	KUKM		3	KEANGGOTAAN KOPERASI				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1353.	KUKM			0	Partisipasi Usaha dan Permodalan						
1354.	KUKM			1	Partisipasi Pengawasan (Rapat Anggota, Pengawasan)						
1355.	KUKM			2	Pengembangan Anggota Kaderisasi, Penyuluhan)						
1356.	KUKM		4	PENGENDALIAN DAN AKUNTABILITAS KOPERASI DAN UKM							
1357.	KUKM			0	Pengendalian (pengendalian intern, tindak lanjut hasil pengendalian)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1358.	KUKM			1	Akuntabilitas dan Akuntansi (Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit)						
1359.	KUKM			2	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM						

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
1360.	KUKM				- Monitoring				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM	
1361.	KUKM				- Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM	
1362.	KUKM	2	PRODUKSI										
1363.	KUKM		0	PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
1364.	KUKM			0	Tanaman Pangan Padi, Palawija)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM	
1365.	KUKM			1	Hortikultura (Buah-buahan dan Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Sayur)								
1366.	KUKM			2	Sarana (Sarana produksi, Sarana Pengolahan)								
1367.	KUKM		1	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1368.	KUKM			0	Kehutanan (Hutan Produksi, Hutan Kemasyarakatan)								
1369.	KUKM			1	Perkebunan (Tanaman semusim dan rempah-rempah, Tanaman keras)								
1370.	KUKM			2	Sarana (Sarana produksi, Sarana Pengolahan)								
1371.	KUKM		2	PERIKANAN DAN PETERNAKAN						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1372.	KUKM			0	Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya)							
1373.	KUKM			1	Peternakan (Ternak besar, Ternak Kecil)							
1374.	KUKM		3		INDUSTRI, KERAJINAN DAN PERTAMBANGAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1375.	KUKM			0	Industri (Sandang, Logam dan Elektronik, Pangan, Kimia dan Aneka)							
1376.	KUKM			1	Kerajinan (Logam , Non Logam)							
1377.	KUKM			2	Pertambangan Umum dan Migas							
1378.	KUKM		4		KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1379.	KUKM			0	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (Listrik , Konstruksi)							
1380.	KUKM			1	Aneka Usaha (Jasa Umum , Angkutan)							
1381.	KUKM			2	Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi							
1382.	KUKM	3			PEMBIAYAAN							
1383.	KUKM		0		PROGRAM PENDANAAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1384.	KUKM			0	Program Pendanaan Jangka Pendek (Koperasi dan UKM Jangka pendek)							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1385.	KUKM			1	Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang							
1386.	KUKM			2	Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir							
1387.	KUKM		1	PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SIMPAN PINJAM								
1388.	KUKM			0	Pengembangan dan Pengendalian KSP				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1389.	KUKM			1	Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi							
1390.	KUKM			2	Pengembangan dan Pengendalian USP LKM							
1391.	KUKM		2	URUSAN PERMODALAN					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1392.	KUKM			0	Pengembangan Permodalan Sendiri (Koperasi dan UKM)							
1393.	KUKM			1	Pengembangan Permodalan Luar (Permodalan Bank , Non Bank)							
1394.	KUKM			2	Pengembangan Kredit Program (Bank, Non Bank)							
1395.	KUKM		3	ASURANSI DAN JASA KEUANGAN					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1396.	KUKM			0	Asuransi (Koperasi, UKM)							
1397.	KUKM			1	Perpajakan (Koperasi, UKM)							
1398.	KUKM			2	Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (Bank dan Non Komersial Bank)							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
1399.	KUKM		4	PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KREDIT				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM	
1400.	KUKM			0	Lembaga Pembiayaan (modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang)							
1401.	KUKM			1	Penjaminan Kredit (Penjaminan, Asuransi Kredit)							
1402.	KUKM			2	Pasar Modal (Obligasi, Modal Penyertaan)							
1403.	KUKM		5	LEMBAGA PENGELOLA DAN BERGULIR KUKM (LPDB)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM	
1404.	KUKM	4	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA									
1405.	KUKM		0	PERDAGANGAN DALAM NEGERI					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1406.	KUKM			0	Pengadaan Sektor Formal dan informal							
1407.	KUKM			1	Distribusi Sektor Formal dan Informal							
1408.	KUKM			2	Pengembangan Sektor formal dan in formal							
1409.	KUKM		1	EKSPOR DAN IMPOR					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1410.	KUKM			0	Ekspor (Koperasi dan UKM)							
1411.	KUKM			1	Impor (Koperasi dan UKM)							
1412.	KUKM			2	Hubungan Perdagangan							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Internasional (Perdagangan Multilateral, Regional dan Bilateral)							
1413.	KUKM		2		SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1414.	KUKM			0	Sarana (Pengembangan Pasar Tradisional dan Sentra Pemasaran)							
1415.	KUKM			1	Prasarana (Lembaga Perantara dan Fasilitas HAKI)							
1416.	KUKM			2	Pengembangan Potensi Pemasaran (Koperasi dan UKM)							
1417.	KUKM		3		KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1418.	KUKM				Kemitraan (Koperasi dan UKM							
1419.	KUKM			0	Jaringan Usaha (Usaha Koperasi dan UKM)							
1420.	KUKM			1	Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Koperasi dan UKM)							
1421.	KUKM		4		INFORMASI DAN PUBLIKASI BISNIS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1422.	KUKM			0	Pengumpulan Informasi Koperasi dan UKM							
1423.	KUKM			1	Pengolahan informasi Koperasi dan UKM							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1424.	KUKM			2	Publikasi dan Informasi (Koperasi dan UKM)							
1425.	KUKM		5		LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN LLP KOPERASI DAN UKM				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1426.	KUKM	5			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
1427.	KUKM		0		PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1428.	KUKM			0	Lembaga Kewirausahaan (Pengembangan Jaringan kewirausahaan dan Peningkatan Sumber daya Kewirausahaan)							Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1429.	KUKM			1	Penumbuhan Kewirausahaan (Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan dan Evaluasi Kewirausahaan)							Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1430.	KUKM			2	Sosialisasi Kewirausahaan (Perangkat Lunak dan Promosi Kewirausahaan)							
1431.	KUKM		1		KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOPERASI DAN UKM			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1432.	KUKM			0	Diklat Formal dan In Formal							
1433.	KUKM			1	Diklat Non Formal (Perangkat Lunak , Sarana dan Prasarana)							Unit pelaksana urusan koperasi dan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												UMKM
1434.	KUKM			2	Kerjasama Lembaga Diklat (Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah)							
1435.	KUKM		2	PERAN SERA MASYARAKAT					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1436.	KUKM			0	Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM							
1437.	KUKM			1	Peningkatan Dukungan LSM terhadap KUKM							
1438.				2	Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM							
1439.	KUKM		3	MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT KUKM								
1440.	KUKM			0	Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1441.	KUKM			1	Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal							
1442.	KUKM			2	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (Pemerintah dan Non Pemerintah)							
1443.	KUKM		4	ADVOKASI					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1444.	KUKM			0	Advokasi Organisasi dan Manajemen							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
1445.	KUKM			1	Advokasi Kemitraan dan Teknologi								
1446.	KUKM			2	Advokasi Peraturan Perundang-undangan (Kajian penerangan dan Sosialisasi Perundanga- undangan)								
1447.	KUKM	6	PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA										
1448.	KUKM		1		PRODUKTIVITAS DAN MUTU				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM	
1449.	KUKM			0	Produktivitas (Inkubator Teknologi dan Pengembangan klaster)								
1450.	KUKM			1	Peningkatan Mutu (Disain dan Standarisasi)								
1451.	KUKM			2	Sertifikasi Produk (Sertifikasi , Label dan Merek)								
1452.	KUKM		2	RESTRUKTURISASI USAHA						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1453.	KUKM			0	Restrukturisasi Manajemen (Koperasi dan UKM)								
1454.	KUKM			1	Restrukturisasi Pendanaan (Koperasi dan UKM)								
1455.	KUKM			2	Restrukturisasi Kelembagaan (Koperasi dan UKM)								
1456.	KUKM		3	PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (LPB)						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1457.	KUKM			0	Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) (Asosiasi dan Manajemen LPB, Akreditasi LPB)							
1458.	KUKM			1	Pengembangan Bisnis LPB (Peningkatan Kerjasama LPB dan Kerja Sama Layanan LPB)							
1459.	KUKM			2	Pengembangan Jaringan LPB (Kerja sama Kelembagaan dan Teknologi)							
1460.	KUKM		4	FASILITASI INVESTASI UKMK					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1461.	KUKM			0	Investasi Klaster UMKM (Fasilitasi investasi UMKM Argo Bisnis dan UMKM Non Agro Bisnis)							
1462.	KUKM			1	Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha (Pangan dan Non Pangan)							
1463.	KUKM			2	Fasilitas Investasi Aneka Usaha UMKM							
1464.	KUKM		5	PENGEMBANGAN SISTEM BISNIS					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1465.	KUKM			0	Fasilitasi Transaksi (Dalam dan Luar negeri)							
1466.	KUKM			1	Kerjasama Usaha (Pertukaran Koperasi dan UKM)							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1467.	KUKM			2	Jaringan Komunikasi Bisnis (Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis)							
1468.	KUKM	7			PENGAJIAN SUMBER DAYA UKMK				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1469.	KUKM		0		PENELITIAN KOPERASI							
1470.	KUKM			0	Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan)							
1471.	KUKM			1	Penyelenggaraan Kelembagaan (Koperasi dan Bisnis Koperasi)							
1472.	KUKM			2	Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana)							
1473.	KUKM		1		PENELITIAN UKM				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1474.	KUKM			0	Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan)							
1475.	KUKM			1	Penyelenggaraan Kelembagaan (Koperasi dan Bisnis Koperasi)							
1476.	KUKM			2	Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana)							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1477.	KUKM		2	PENELITIAN SUMBERDAYA				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1478.	KUKM			0	Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan)						
1479.	KUKM			1	Penyelenggaraan Kelembagaan (Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan)						
1480.	KUKM			2	Tatalaksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana)						
1481.	KUKM		3	PENGEMBANGAN PERKADERAN UKM				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
1482.	KUKM			0	Penyuluhan (Penyelenggara dan Materi Penyuluhan)						
1483.	KUKM			1	Perkaderan (Penilaian dan Pengembangan)						
1484.	KUKM			2	Kerjasama Jaringan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah)						
1485.	KUKM		4	KERJASAMA INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM
		PENGADAAN									
1486.		1	PELAKSANAAN PENGADAAN								
1487.			1	Penyusunan rencana umum pengadaan							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1488.				1	Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1489.				2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1490.				3	Penetapan Kebijakan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1491.				4	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1492.				5	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1493.			2	Pemilihan Penyedia								
1494.				1	Persiapan Pemilihan Penyedia(Kajian ulang pengadaan, menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menyusun dokumen pengadaan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1495.				2	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (pengumuman, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1496.				3	e- Purchasing				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												penagadaan
1497.				4	Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1498.			3	Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak								
1499.				1	Penandatanganan Kontrak (Surat penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ), Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1500.				2	Pelaksanaan Kontrak (Laporan pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima (BAST)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1501.			4	Swakelola								
1502.				1	Perencanaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1503.				2	Pelaksanaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1504.				3	Pengawasan dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1505.		2	PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN									
1506.			1	Pengembangan Strategi Pengadaan Umum								
1507.				1	Barang dan jasa (barang dan jasa lainnya, Jasa Konsultasi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1508.				2	Pekerjaan Konstruksi (Pelaksanaan Kontruksi, Perencanaan dan Pengawas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Konstruksi)							
1509.			2		Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus							
1510.				1	Kemitraan pemerintah dengan badan usaha (Kemitraan infrastruktur, Kemitraan non infrastruktur)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan penagadaan	
1511.				2	Badan usaha dan keadaan khusus (Badan Usaha, Bidang pertanahan keamanan dan keadaan khusus)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan penagadaan	
1512.			3		Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional							
1513.				1	Laporan Kegiatan Pengembangan pelaku usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1514.				2	Dokumen Kajian pengembangan pelaku usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1515.				3	Laporan Kegiatan Pengembangan kesempatan usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1516.				4	Dokumen Kajian pengembangan sempatan usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1517.				5	Kerjasama multilateral (Laporan kerjasama multilateral, dokumen kajian kegiatan kerjasama multilateral)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan penagadaan	
1518.				6	Kerjasama bilateral (Laporan kerjasama bilateral, dokumen kajian kerjasama bilateral)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan penagadaan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1519.		3	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI								
1520.			1	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan							
1521.			1	Perencanaan pengadaan (Perencanaan Pengadaan kementerian/Lembaga/instansi, perencanaan pengadaan pemerintahan daerah)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengadaan
1522.			2	Monitoring dan evaluasi (Pelakssanaan kebijakan pengadaan, kinerja pelaksanaan pengadaan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengadaan
1523.			2	Pengembangan Sistem Katalog							
1524.			1	Riset dan kontrak (Riset pasar dan industri, kontrak payung)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengadaan
1525.			2	Pengelolaan katalog (pengendalian pelaksanaan katalog, evaluasi katalog)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pengadaan
1526.			3	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik							
1527.			1	Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi(Pengembangan aplikasi SPSE, Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengadaan
1528.			2	Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik (Bimbingan Teknis LPSE, Monitoring dan evaluasi LPSE Nasional)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pengadaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1529.		4	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1530.			1	Pengembangan pengelola pengadaan							
1531.			1	Karir pengelola pengadaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1532.			2	Tata kelola pengelola pengadaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1533.			3	Unit layanan pengadaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1534.			4	Standar kompetensi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1535.			2	Pelatihan Kompetensi							
1536.			1	Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan diklat kompetensi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1537.			2	Perencanaan pelatihan kompetensi (peserta, pengajar, penjadwalan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1538.			3	Penyelenggara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1539.			4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1540.			5	Monitoring dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1541.			6	Sistem informasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1542.				7	Alumni				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1543.				8	Seleksi dan pengembangan pengajar/narasumber				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1544.				9	Sertifikasi pengajar/narasumber				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1545.				10	Monitoring dan Evaluasi pengajar/narasumber				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1546.				11	Sistem informasi pengajar /narasumber			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1547.				12	Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP) Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveilen)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1548.				13	Pembinaan Hubungan Kerjasama dengan LPP			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1549.				14	Kajian Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1550.				15	Sistem informasi Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1551.			3	Sertifikasi Profesi								
1552.				1	Sistem sertifikasi dokumen ISO				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1553.				2	Sistem sertifikasi kebijakan / reguler			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												penagadaan
1554.				3	Sarana sertifikasi dokumen inventaris dan pemeliharaan sarana				√			
1555.				4	Sarana master soal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1556.				5	Tata Kelola sertifikasi dokumen penyelenggaraan ujian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1557.				6	Evaluasi dan surveilen dokumen evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1558.				7	Evaluasi dan surveilen dokumen surveilen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan penagadaan
1559.		5	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH									
1560.			1	Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi								
1561.				1	Pemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
1562.			2	Penanganan Permasalahan Hukum								
1563.				1	Penanganan permasalahan kontrak (penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa, penanganan permasalahan kontrak pekerjaan kontruksi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1564.				2	Keterangan ahli (Keterangan ahli barang dan jasa, keterangan ahli pekerjaan kontruksi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan penagadaan
	UP	URUSAN PERTAHANAN										
1565.		1	STRATEGI PERTAHANAN									
1566.			1	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara								
1567.				1	Kebijakan Pengembangan Pertahanan Militer	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1568.				2	Kebijakan Pengembangan Pertahanan Nir Militer	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1569.			2	Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara								
1570.				1	Kebijakan Pembinaan Pertahanan Militer		√					Unit pelaksana urusan pertanahan
1571.				2	Kebijakan Pembinaan Pertahanan Nir Militer		√					Unit pelaksana urusan pertanahan
1572.			3	Kebijakan Pelaksanaan								
1573.				1	Kebijakan Umum		√					Unit pelaksana urusan pertanahan
1574.				2	Kebijakan Penyelenggaraan		√					Unit pelaksana urusan pertanahan
1575.				3	Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan Negara		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1576.			4	Doktrin								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1577.				1	Doktrin Dasar			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1578.				2	Doktrin Induk			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1579.				3	Doktrin Pelaksanaan			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1580.				4	Petunjuk Operasional			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1581.				5	Petunjuk Teknis			√				
1582.			5	Pengerahan (Penggunaan Kekuatan, Mobilisasi, Demobilisasi)								
1583.				1	Organisasi Komponen Pertahanan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1584.				2	Organisasi Susunan Tugas		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1585.				3	Penggunaan Pengerahan Komponen Utama			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1586.				4	Penggunaan Tata Kelola Komponen Utama			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1587.				5	Penggunaan Pengerahan Komponen Cadangan dan Pendukung			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1588.				6	Penggunaan Tata Kelola Komponen Cadangan dan Pendukung			√				Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1589.			6	Intelijen dan Pengamanan						
1590.				1	Intelstrategis	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1591.				2	Pengamanan LN/DN	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1592.				3	Pengamanan Nubika	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1593.				4	Pengamanan Komunikasi dan Elektronika	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1594.				5	Pengamanan Militer	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1595.				6	Pengamanan Sospolekbudhan	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1596.				7	SARA	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1597.				8	Pengamanan Personel	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1598.				9	Pengamanan Materiil	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1599.			7	Operasi Militer						
1600.				1	Pertahanan	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan
1601.				2	Keamanan Pertahanan	√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1602.				3	Intel Strategis	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1603.				4	Pengamanan Dalam Negeri	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1604.				5	Operasi Darat, Laut dan Udara	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1605.				6	Pemetaan Militer	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1606.				7	Ops Gabungan	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1607.				8	Ops Teror	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1608.				9	Ops Latihan	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1609.				10	Ops Khusus	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1610.				11	Evaluasi Ops	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1611.			8	Analisa Strategi								
1612.				1	Ideologi dan Politik Dalam Negeri				√			Unit pelaksana urusan pertanahan
1613.				2	Ekonomi dalam negeri				√			Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1614.				3	Sosial Budaya dalam negeri			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1615.				4	Militer dan Keamanan dalam negeri			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1616.			9	Asia dan Pasifik								
1617.				1	Australia, Oceania, dan Asia Timur			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1618.				2	Asia Tenggara			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1619.				3	Asia Tengah dan Selatan			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1620.				4	Asia Barat			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1621.			10	Amerika, Eropa dan Afrika								
1622.				1	Amerika Utara dan Tengah			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1623.				2	Amerika Selatan			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1624.				3	Eropa Barat dan Timur			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1625.				4	Afrika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1626.			11	Organisasi Internasional								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1627.				1	ASEAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1628.				2	Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1629.				3	Organisasi Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1630.				4	Organisasi Non Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1631.			12	Kawasan Global								
1632.				1	Senjata Strategis	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1633.				2	Elektronika dan Informasi			√				
1634.				3	Lingkungan Hidup				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1635.				4	Keamanan Global	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1636.			13	Kerja Sama Internasional								
1637.				1	Asia			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1638.				2	Eropa dan Afrika			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1639.				3	Amerika dan Pasifik			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1640.				4	Misi Perdamaian	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan pertanahan
1641.				5	Intra Kawasan			√				
1642.				6	Keamanan Internasional	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1643.				7	Bantuan Kemanusiaan			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1644.			14	Kerja Sama Pendidikan dan Materiil								
1645.				1	Pendidikan Luar Negeri			√				Unit pelaksana urusan pertanahan
1646.				2	Pendidikan Dalam Negeri			√				
1647.				3	Materiil			√				
1648.			15	Atase Pertahanan								
1649.				1	Atase Pertahanan Republik Indonesia	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1650.				2	Atase Pertahanan Luar negeri	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1651.			16	Protokoler dan Perijinan								
1652.				1	Protokoler				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1653.				2	Perijinan dan Konsuler			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1654.			17	Wilayah Pertahanan								
1655.				1	Survey			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
												pertanahan	
1656.				2	Pemetaan				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1657.				3	Bimbingan Teknis					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1658.				4	Evaluasi dan Dokumentasi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1659.				5	Perbatasan Darat Negara		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1660.				6	Perbatasan Darat Daerah		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1661.				7	Evaluasi dan Dokumentasi		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1662.				8	Perbatasan Laut		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1663.				9	Perbatasan Udara		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1664.				10	Evaluasi dan Dokumentasi								
1665.				11	Tata Ruang Pertahanan		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1666.				12	Kawasan Militer		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan pertanahan	
1667.				13	Sistem Informasi Geografi		√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1668.				14	Pembinaan Wilayah Teritorial			√				
1669.				15	Pembinaan Tetitorial			√				
1670.				16	Pembinaan Massa Teritorial			√				
1671.				17	Kirka Teritorial		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1672.				18	Operasi Teritorial			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1673.				19	Rehabilitasi Wilayah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1674.				20	Pengamanan Pembangunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1675.				21	Operasi Bhakti TNI/TMMD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1676.				22	Orang Asing		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1677.				23	Survey			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1678.				24	Pemetaan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1679.				25	Survey Non TNI		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1680.				26	Pemetaan Non TNI			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1681.				27	Meteorologi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1682.				28	Geofisika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1683.			18	Hukum Strategi Pertahanan								
1684.				1	Perencanaan Undang-Undang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1685.				2	Peraturan Pelaksanaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1686.				3	Program Legislasi Pertahanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1687.				4	Penelaahan Politik Hukum dan Keamanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1688.				5	Penelaahaaan Kesejahteraan Rakyat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1689.				6	Penelaahaan Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1690.				7	Hukum Humaniter			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1691.				8	Hukum Laut dan Hukum Dirgantara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1692.				9	Perjanjian Internasional		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1693.				10	Jaringan Informasi Hukum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1694.				11	Dokumentasi dan Publikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1695.		2	PERENCANAAN PERTAHANAN									
1696.			1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertahanan								
1697.			1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1698.			2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek								
1699.			2	Sistem dan Metode					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1700.			1	Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan Pertahanan			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1701.			2	Sistem dan Metode Perencanaan Program dan Anggaran			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1702.			3	Analisis dan Evaluasi Pembangunan								
1703.			1	Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1704.			2	Analisis dan Evaluasi Sistem dan Metode Perencanaan				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1705.			4	Penyerasian Penelitian dan Pengembangan Pembangunan								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1706.				1	Perencanaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1707.				2	Evaluasi dan Pemanfaatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1708.			5	Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran								
1709.				1	Analisis Perencanaan Program dan Anggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1710.				2	Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1711.			6	Perencanaan Program dan Anggaran A								
1712.				1	Anggaran Kementerian Pertahanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1713.				2	Anggaran Mabes TNI			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1714.			7	Perencanaan Program dan Anggaran B								
1715.				1	Anggaran TNI AD			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1716.				2	Anggaran TNI AL dan TNI AU			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1717.			8	Perencanaan Program dan Anggaran C								
1718.				1	Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan				√	Staff		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1719.				2	Bantuan Proyek dan Pinjaman			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1720.				3	Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak				√	Staff		
1721.			9	Administrasi Pelaksanaan Anggaran								
1722.				1	Analisis Administrasi Pelaksanaan Anggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1723.				2	Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1724.				3	Administrasi Pelaksanaan Anggaran A Kementerian Pertahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1725.				4	Administrasi Pelaksanaan Anggaran A Mabes TNI				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1726.				5	Administrasi Pelaksanaan Anggaran B TNI AD				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1727.				6	Administrasi Pelaksanaan Anggaran B TNI AL dan TNI AU				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1728.				7	Administrasi Pelaksanaan Anggaran C Devisa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1729.				8	Administrasi Pelaksanaan Anggaran C Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1730.			10	Pengendalian Program dan Anggaran								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1731.				1	Pengumpulan Data Sistem Pengendalian Program dan Anggaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1732.				2	Sistem Pengendalian dan Keuangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1733.				3	Pengendalian Anggaran A Kementerian Pertahanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1734.				4	Pengendalian Anggaran A Mabes TNI			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1735.				5	Pengendalian Anggaran B TNI AD			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1736.				6	Pengendalian Anggaran B TNI AL dan TNI AU			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1737.				7	Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran							
1738.				8	Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak			√	Tk. Eselon			
1739.			11	Perencanaan Kegiatan				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1740.				1	Rencana Operasi				√	Staff	Unit pelaksana urusan	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
											pertanahan	
1741.				2	Rencana Personel				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1742.				3	Rencana Materiil dan Logistik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1743.				4	Rencana Inspeksi dan Pengawasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1744.				5	Rencana Pendidikan dan Pelatihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1745.		3	POTENSI PERTAHANAN									
1746.			1	Bela Negara								
1747.				1	Materi dan Metode Lingkungan Pendidikan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1748.				2	Analisis dan Evaluasi Lingkungan Pendidikan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1749.				3	Materi dan Metode Lingkungan Pemukiman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1750.				4	Analisis dan Evaluasi Lingkungan Pemukiman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1751.				5	Materi dan Metode Lingkungan Pekerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1752.				6	Analisis dan Evaluasi Lingkungan Pekerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
					SR	R	T	B					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		
1753.			2	Komponen Cadangan									
1754.				1	Sumber Daya Manusia Matra Darat					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1755.				2	Sumber Daya Alam dan Buatan Matra Darat					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1756.				3	Kekuatan dan Kemampuan Matra Darat					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1757.				4	Sumber Daya Manusia Matra Udara					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1758.				5	Sumber Daya Alam dan Buatan Matra Laut					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1759.				6	Kekuatan dan Kemampuan Matra Laut					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1760.				7	Sumber Daya Manusia Matra Udara					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1761.				8	Sumber Daya Alam dan Buatan Matra Udara					√	Staff		Unit pelaksana urusan pertanahan
1762.				9	Kekuatan dan Kemampuan Matra Udara					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1763.			3	Komponen Pendukung									
1764.				1	Sumber Daya Manusia Garda Bangsa					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1765.				2	SDM Tenaga Ahli dan Profesi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1766.				3	SDM Warga Negara Lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1767.				4	Sumber Daya Alam dan Buatan Logistik Wilayah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1768.				5	Sumber Daya Alam dan Butan Cadangan Materiil Strategis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1769.				6	Sarana dan Prasarana Matra Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1770.				7	Sarana dan Prasarana Matra Laut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1771.				8	Sarana dan Prasarana Matra Udara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1772.			4	Teknologi dan Industri Pertahanan								
1773.				1	Pengembangan Teknologi Pertahanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1774.				2	Penerapan Teknologi Pertahanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1775.				3	Alat Utama Sistem Persenjataan Pertahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1776.				4	Non Alat Utama Sistem Persenjataan Pertanahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1777.				5	Industri Pertahanan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1778.				6	Optimasi dan Improvisasi Pendayagunaan Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1779.				7	Promosi dan Kerja Sama Pendayagunaan Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1780.				8	Tata Kelola				√	Staff		Unit pelaksana urusan pertanahan
1781.				9	Pengembangan Sistem	√				Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1782.			5	Veteran								
1783.				1	Pengembangan Komunikasi Sosial Veteran				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1784.				2	Kerja Sama Komunikasi Sosial Veteran				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1785.				3	Fasilitasi Administrasi Veteran				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1786.				4	Moril Veteran				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1787.				5	Data Inventarisasi				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1788.				6	Data Dokumentasi				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1789.			6	Sistem								
1790.				1	Sistem Ops			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan pertanahan
1791.			2	Sistem Pembinaan				√	Staff			Unit pelaksana urusan pertanahan
1792.			3	Sistem Persenjataan Teknologi		√			Tk. Eselon			Unit pelaksana urusan pertanahan
1793.			4	Sistem Persenjataan Sosial		√			Tk. Eselon			Unit pelaksana urusan pertanahan
1794.			5	Sistem Informasi Militer		√			Tk. Eselon			Unit pelaksana urusan pertanahan
1795.			6	Sistem Informasi Pembinaan			√		Tk. Eselon			Unit pelaksana urusan pertanahan
1796.		3	KEKUATAN PERTAHANAN									
1797.			1	Sumber Daya Manusia								
1798.			1	Perencanaan Penyediaan Tenaga				√	Staff	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan pertanahan
1799.			2	Perencanaan Penyediaan Perawatan				√	Staff	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan pertanahan
1800.			3	Pemisahan				√	Staff	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan pertanahan
1801.			4	Penyaluran				√	Staff	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan pertanahan
1802.			5	Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa				√	Staff	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1803.				6	Tunjangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1804.				7	Pengembangan dan Pendidikan Militer			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1805.				8	Pengembangan dan Pendidikan Non Militer			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1806.			2	Materiil								
1807.				1	Pengadaan Inventuri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1808.				2	Pengendalian Inventuri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1809.				3	Penghapusan Inventuri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1810.				4	Standarisasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1811.				5	Kelaikan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1812.				6	Kodifikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1813.				7	Sistem dan Metode Tata Kelola Materil			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1814.				8	Pengelolaan Materiil dan Barang Milik Negara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1815.				9	Pemeliharaan Alutsista				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1816.				10	Pemeliharaan Non Alutsista				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1817.			3	Fasilitas dan Jasa								
1818.				1	Sistem dan Metode Fasilitas Komponen Utama				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1819.				2	Pengendalian Fasilitas Inventori Komponen Utama				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1820.				3	Sistem dan Metode Listrik., gas dan Air				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1821.				4	Pengendalian Inventori Listrik, Gas dan Air				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1822.				5	Sistem dan Metode BBM dan Pelumas				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1823.				6	Pengendalian Inventori BBM dan Pelumas				√			Unit pelaksana urusan pertanahan
1824.				7	Sistem dan Metode Komunikasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1825.				8	Sisitem dan Metode Elektronik		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1826.				9	Pengendalian Inventori Komunikasi dan Elektronik				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1827.				10	Inventori Barang Tidak Bergerak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1828.				11	Pemanfaatan Barang Tidak Bergerak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1829.				12	Pemindahtanganan Barang Tidak Bergerak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1830.			4	Kesehatan								
1831.				1	Kekuatan Kesehatan Geomedik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1832.				2	Pengembangan Kekuatan Kesehatan Kesehatan Militer				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1833.				3	Pengembangan Kekuatan Kesehatan Kesehatan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1834.				4	Profesi Tenaga Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1835.				5	Pengembangan Kemampuan Tenaga Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1836.				6	Materiil Fasilitas Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1837.				7	Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1838.				8	Pengembangan Fasilitas Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1839.				9	Dukungan Bantuan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1840.				10	Kerjasama bantuan Kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1841.				11	Bantuan Kesehatan Nuklir, Biologi dan Kimia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1842.		4	SARANA PERTAHANAN									
1843.			1	Pengadaan								
1844.				1	Pengadaan Dalam Negeri Matra Darat				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1845.				2	Pengadaan Luar Negeri Matra Darat				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1846.				3	Pengawasan Pengendalian Matra Darat				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1847.				4	Pengadaan Dalam Negeri Matra Laut			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1848.				5	Pengadaan Luar Negeri Matra Laut			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1849.				6	Pengawasan Pengendalian Matra Laut			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1850.				7	Pengadaan Dalam Negeri Matra Udara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1851.				8	Pengadaan Luar Negeri Matra Udara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												pertanahan
1852.				9	Pengawasan Pengendalian Matra Udara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1853.			2	Konstruksi								
1854.				1	Perencanaan Konstruksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1855.				2	Analisis dan Estimasi Perencanaan Kontruksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1856.				3	Administrasi Kontrak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1857.				4	Pelaksana Lelang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1858.				5	Administrasi Permintaan Pembayaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1859.				6	Pengendalian Konstruksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1860.				7	Pengawasan Konstruksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1861.			3	Kelaikan								
1862.				1	Kelaikan Rancang Bangun Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1863.				2	Kelaikan Produksi dan Pemeliharaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1864.				3	Subbidang Kelaikan Konstruksi Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1865.				4	Kelaikan Rancang Bangun				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					laut						urusan	
1866.			5		Kelaikan Fasilitas dan Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1867.			6		Kelaikan Pemeliharaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1868.			7		Kelaikan Rancang Bangun Udara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1869.			8		Kelaikan Fasilitas dan Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1870.			9		Kelaikan Pemeliharaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1871.			10		Kelaikan Produksi dan Pemeliharaan							
1872.			4		Kodifikasi							
1873.			1		Tata Kelola Perencanaan Administrasi Kodifikasi							Unit pelaksana urusan pertanahan
1874.			2		Pengembangan Kodifikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1875.			3		Sistem Informasi Kodifikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1876.			4		Nomenklatur Operasional Kodifikasi dan Klasifikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1877.			5		Identifikasi dan Kodifikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan pertanahan
1878.			6		Validasi Data Kodifikasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan pertanahan
1879.			5		Dukungan Teknis Kodifikasi							
1880.			1		Kerja Sama Dukungan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Teknis dan Pelatihan Kodifikasi						urusan pertanahan
1881.				2	Publikasi Katalog Materiil Teknis Kodifikasi				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1882.			6	Barang Milik Negara							
1883.				1	Barang Milik Negara I A				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1884.				2	Barang Milik Negara I B				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1885.				3	Barang Milik Negara I C				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1886.				4	Barang Milik Negara II A				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1887.				5	Barang Milik Negara II B				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1888.				6	Barang Milik Negara II C				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1889.				7	Barang Milik Negara III A				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1890.				8	Barang Milik Negara III B				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1891.				9	Barang Milik Negara III C				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
	PB	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA									
1892.	PB	1	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN								
1893.	PB		1	Pengurangan Resiko Bencana							
1894.	PB			1	Pencegahan Pengkajian Resiko				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1895.	PB			2	Pencegahan Pengelolaan Resiko				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1896.	PB			3	Mitigasi Struktur				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
1897.	PB			4	Mitigasi Non Struktur				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
										urusan		
1898.	PB		2	Pemberdayaan Masyarakat								
1899.	PB			1	Peran Lembaga Usaha Padat Modal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1900.	PB			2	Peran Lembaga Usaha Padat Karya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1901.	PB			3	Peran Organisasi Internasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1902.	PB			4	Peran Organisasi Sosial Masyarakat Nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1903.	PB			5	Peran Peningkatan Kesadaran Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1904.	PB			6	Peran Peningkatan Ketahanan Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1905.	PB		3	Kesiapsiagaan								
1906.	PB			1	Peringatan Pemaduan Sistem Jaringan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1907.	PB			2	Pemantauan dan Peringatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1908.	PB			3	Perencanaan Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1909.	PB			4	Perencanaan Penerapan Rencana Strategis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1910.	PB			5	Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1911.	PB			6	Penyiapan Pengendalian Sumber Daya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1912.	PB	2	PENANGANAN DARURAT									
1913.	PB		1	Tanggap Darurat								
1914.	PB			1	Perencanaan Pendataan Darurat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1915.	PB			2	Perencanaan Operasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1916.	PB			3	Pengendalian Pengorganisasian Pos Komando				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1917.	PB			4	Pengendalian Sarana dan Prasarana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1918.	PB			5	Penyelamatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1919.	PB			6	Evakuasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1920.	PB		2	Bantuan Darurat								
1921.	PB			1	Bantuan Sandang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1922.	PB			2	Bantuan Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1923.	PB			3	Bantuan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1924.	PB			4	Bantuan Air Bersih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1925.	PB			5	Bantuan Pembangunan Hunian Sementara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1926.	PB			6	Bantuan Pendukung Hunian Sementara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1927.	PB		3	Perbaikan Darurat								
1928.	PB			1	Penyiapan Peralatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1929.	PB			2	Angkutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1930.	PB			3	Perbaikan Prasarana Sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1931.	PB			4	Perbaikan Prasarana Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1932.	PB			5	Pemantauan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1933.	PB			6	Pelaporan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
												urusan	
1934.	PB	3	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI										
1935.	PB		1	Penilaian Kerusakan									
1936.	PB			1	Inventarisasi Kerusakan Fisik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1937.	PB			2	Inventarisasi Kerusakan Sosial Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1938.	PB			3	Estimasi Pembiayaan Pembangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1939.	PB			4	Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1940.	PB		2	Pemulihan dan Peningkatan Fisik									
1941.	PB			1	Rehabilitasi Fasilitas Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1942.	PB			2	Rekonstruksi Fasilitas Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1943.	PB			3	Rehabilitasi Fasilitas Sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1944.	PB			4	Rekonstruksi Fasilitas Sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1945.	PB			5	Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Berat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1946.	PB			6	Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Ringan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1947.	PB		3	Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi									
1948.	PB			1	Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1949.	PB			2	Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1950.	PB			3	Pemulihan Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
1951.	PB			4	Peningkatan Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
						SR	R	T	B					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10		
												urusan		
1952.	PB		4	Penanganan Pengungsi										
1953.	PB			1	Perlindungan Pengungsi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1954.	PB			2	Pemberdayaan Pengungsi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1955.	PB			3	Kompensasi Pengungsi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1956.	PB			4	Pengembalian Hak Pengungsi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1957.	PB			5	Pemulangan dan Repatriasi Pengungsi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1958.	PB			6	Relokasi/Pengalihan Pengungsi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1959.	PB	4	LOGISTIK DAN PERALATAN											
1960.	PB		1	Logistik										
1961.	PB			1	Inventarisasi Analisis Kebutuhan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1962.	PB			2	Inventarisasi Pengadaan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1963.	PB			3	Penyimpanan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1964.	PB			4	Distribusi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1965.	PB		2	Peralatan										
1966.	PB			1	Inventarisasi Analisis Kebutuhan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1967.	PB			2	Inventarisasi Pengadaan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1968.	PB			3	Penyimpanan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1969.	PB			4	Pemeliharaan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
1970.	PB			5	Pengerahan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1971.	PB			6	Distribusi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	KS	URUSAN KESEHATAN											
1972.	KS	1	UPAYA KESEHATAN										
1973.	KS		1	Upaya Kesehatan Dasar									
1974.	KS			1	Pelayanan Kedokteran Keluarga					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1975.	KS			2	Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1976.	KS			3	Pelaksanaan Kesehatan Primer					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1977.	KS			4	Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1978.	KS			5	Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1979.	KS			6	ICD 10, Destistry & Stomatology					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1980.	KS			7	Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1981.	KS			8	Penyakit Mulut di Tingkat Primer					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1982.	KS			9	Pembiayaan Darah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1983.	KS			10	Penggunaan Darah Rasional					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1984.	KS			11	Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1985.	KS			12	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1986.	KS			13	Akreditasi Puskesmas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1987.	KS			14	Puskesmas Berprestasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1988.	KS		2	Upaya Kesehatan Rujukan								
1989.	KS			1	Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Bergerak, Pratama, Publik, Priovat dan Kusus)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1990.	KS			2	Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1991.	KS			3	Pelayanan Rumah Sakit Privat (SPGDT Call 119, Rekayasa Jaringan, Geriartri, Medical tourism, Hyperbarik)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1992.	KS			4	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain (Pelayanan Kanker, Rujukan Regional dan Pencegahan Froud)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1993.	KS			5	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pendidikan (Keselamatan Pasien, Jantung dan pembuluh darah, Ginjal, HIV/AIDS, Tim Reproduksi Penguatan Rumah sakit Vertikal dan PPDSBK))				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1994.	KS			6	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (Biaya Klaim)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
1995.	KS			7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1996.	KS			8	Badan Pengawas di Rumah Sakit				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
1997.	KS			9	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanaman Modal Asing (Usulan penetapan, Rekomendasi, Profil dan Data Rumah Sakit, Self Instrumen Assesment, Keputusan dan Sertifikat)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
1998.	KS			10	Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (Standar Nasional, Standar Internasional, Rumah Sakit Oasca Akreditasi Nasional dan Surveyor)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
1999.	KS		3	Keperawatan dan Keteknisian Medik								
2000.	KS			1	Pelayanan Keperawatan Dasar							
2001.	KS			2	Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit							
2002.	KS			3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum							
2003.	KS			4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus							
2004.	KS			5	Bina Pelayanan Kebidanan							
2005.	KS			6	Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik							
2006.	KS		4	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
2007.	KS			1	Mikrobiologi dan Imunologi (Laboratorium Kesehatan, Klinik, Puskesmas dan Moikrobiologi Kultur)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2008.	KS			2	Patologi dan Toksikologi (PNPME, Sarana Kesehatan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2009.	KS			3	Radiologi (Pelayanan, dosis Radiasi Nasional, Radioterapi, Telemedicine, radiologi Diagnostik, Teleradiologi)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2010.	KS			4	Perijinan dan Sertifikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2011.	KS			5	Sarana dan Prasarana Kesehatan (Bangunan Rumah Sakit Kelas A,B,C, Ruang Gawat darurat, Ruang Operasi,Ruang Perawatan Intensif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2012.	KS			6	Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK, Rumah Sakit, Puskesmas, Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Rumah sakit dan Puskesmas)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2013.	KS			7	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota)			√		Tk. Eselon	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2014.	KS		5	Kesehatan Jiwa								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2015.	KS			1	Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Jiwa, Kegawatdaruratan dan Promosi Kesehatan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2016.	KS			2	Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2017.	KS		6	Etikolegal dan Asesmen								
2018.	KS			1	Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2019.	KS			2	Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2020.	KS			3	Visum Et Repertum				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2021.	KS		7	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan								
2022.	KS			1	Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)				√	Staff	Tidak beresiko	
2023.	KS			2	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2024.	KS			3	Wajib Lapor Pecandu Narkotika				√			
2025.	KS			4	Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2026.	KS		8	Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko								
2027.	KS			1	Kesehatan Jiwa Di Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2028.	KS			2	Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial - Penanggulangan Bencana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2029.	KS			3	Penanggulangan Autisme				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2030.	KS			4	Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2031.	KS			5	Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2032.	KS	2	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN									
2033.	KS		1	Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra								
2034.	KS			1	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)(difteri, polio, penyelenggaraan kegiatan survei pre TAS filariasis, surveilans influenza, keracunan pangan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2035.	KS			2	Pekan Imunisasi Nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2036.	KS			3	Coldchain Bagi Petugas Imunisasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2037.	KS			4	Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2038.	KS			5	Imunisasi bagi Petugas Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2039.	KS			6	Imunisasi di Daerah Sulit				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2040.	KS			7	Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2041.	KS			8	Imunisasi bagi masyarakat umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2042.	KS			9	Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2043.	KS			10	Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2044.	KS			11	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2045.	KS			12	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Pemberian ICV (International Certificate Vaccine)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2046.	KS			13	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Hapus Serangga dan Hapus Tikus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2047.	KS			14	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2048.	KS			15	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Vaksinasi Meningitis pada RS, KKP, dan Poliklinik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2049.	KS			16	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2050.	KS			17	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Obat dan P3K Kapal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2051.	KS			18	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Nakoda/Pilot dan ABK/Pesawat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2052.	KS			19	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Air Bersih di Kapal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2053.	KS			20	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Fumigasi di kapal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2054.	KS			21	Kesehatan Matra Mudik Sehat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2055.	KS			22	Kesehatan Matra bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2056.	KS			23	Kesehatan Matra Migran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2057.	KS			24	Kesehatan Matra Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2058.	KS			25	Kesehatan matra Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2059.	KS			26	Kesehatan Matra Transmigrasi bagi tenaga kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2060.	KS		2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung								
2061.	KS			1	Pengendalian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Tuberkulosis/pengendalian penyakit TB							urusan
2062.	KS			2	Pengendalian TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2063.	KS			3	Laboratorium TB				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2064.	KS		3	Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual								Tidak beresiko
2065.	KS			1	Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance (IBBS)</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2066.	KS			2	<i>Human Immuno Deficiency Virus (HIV)</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2067.	KS			3	Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2068.	KS			4	Obat <i>Anti Retro Viral (ARV)</i> dan reagen tes HIV				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2069.	KS		4	Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut								
2070.	KS			1	<i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV)</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2071.	KS			2	Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2072.	KS		5	Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan								
2073.	KS			1	Diare				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2074.	KS			2	Tifoid				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2075.	KS			3	Hepatitis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2076.	KS		6		Pengendalian Kusta dan Frambusia							
2077.	KS			1	Kusta				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2078.	KS			2	Frambusia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2079.	KS			3	Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2080.	KS		7		Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang							
2081.	KS			1	Pengendalian Malaria (kelmbu berinsektisida (LLINs), Malaria, Crosscheker mikroskopis malaria)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2082.	KS			2	Pengendalian Arbovirolosi (DBD, Chikungunya, Ebola)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2083.	KS		8		Pengendalian Zoonosis							
2084.	KS			1	Penyakit flu burung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2085.	KS			2	Vaksin Anti Rabies (VAR) baru				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2086.	KS			3	Penyakit Pes				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2087.	KS			4	Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2088.	KS		9		Pengendalian Filariasis dan Kecacingan							
2089.	KS			1	Filariasis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2090.	KS			2	Kecacingan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
2091.	KS			3	Schistosomiasis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2092.	KS		10	Pengendalian Vektor					√			
2093.	KS		11	Pengendalian Penyakit Tidak Menular								
2094.	KS		12	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah								
2095.	KS			1	Penyakit Jantung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2096.	KS			2	Penyakit Pembuluh darah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2097.	KS			3	Penyakit Hipertensi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2098.	KS			4	Penyakit Stroke				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2099.	KS		13	Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik								
2100.	KS			1	Penyakit Diabetes Mellitus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2101.	KS			2	Penyakit gangguan Metabolik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2102.	KS			3	Penyakit gangguan Tiroid				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2103.	KS			4	Gangguan Obesitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2104.	KS			5	Pengendalian Penyakit Kanker				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2105.	KS		14	Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif								
2106.	KS											
2107.	KS			1	Penyakit Akibat produk tembakau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
2108.	KS			2	Asma, Lupus, Thalassemia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2109.	KS		15	Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan								
2110.	KS			1	Pengendalian Cidera				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2111.	KS			2	Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2112.	KS			3	Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2113.	KS		16	Penyehatan Lingkungan								
2114.	KS			1	Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitas Air Minum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2115.	KS			2	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2116.	KS		17	Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum								
2117.	KS			1	Higiene sanitasi dan Bangunan Umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2118.	KS			2	Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2119.	KS			3	Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2120.	KS		18	Penyehatan kawasan dan sanitasi darurat								
2121.	KS			1	Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2122.	KS			2	Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2123.	KS			3	Pelabuhan Sehat, Pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Sehat, dan Kota Sehat						urusan	
2124.	KS			4	Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2125.	KS		19	Higiene Sanitasi Pangan								
2126.	KS			1	Makanan Jajanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2127.	KS			2	Restoran / Rumah Makan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2128.	KS			3	Jasa Boga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2129.	KS			4	Depot Air Minum				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2130.	KS		20	Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi								
2131.	KS			1	Medis Fasyankes				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2132.	KS			2	Limbah Medis (Free Mercury)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2133.	KS			3	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2134.	KS			4	Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2135.	KS		21	Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan								
2136.	KS			1	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2137.	KS			2	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Laboratorium Pengendali Penyakit				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2138.	KS			3	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Laboratorium Kesehatan Lingkungan							
2139.	KS			4	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Laboratorium Kesehatan Matra				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2140.	KS			5	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Model dan Teknologi Tepat Guna				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2141.	KS			6	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Uji kendali mutu dan kalibrasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2142.	KS			7	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2143.	KS		22	Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan								
2144.	KS			1	Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2145.	KS			2	Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2146.	KS			3	Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2147.	KS		23	Sertifikat								
2148.	KS			1	Health Certificate				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2149.	KS			2	International Certificate of Vaccination				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2150.	KS			3	Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2151.	KS			4	Kapal/Pesawat Udara			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2152.	KS			5	Sertifikat Air Bersih			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2153.	KS			6	Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2154.	KS			7	Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2155.	KS	3	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK									
2156.	KS		1	Gizi Makro								
2157.	KS			1	Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2158.	KS			2	Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2159.	KS		2	Gizi Mikro								
2160.	KS			1	Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi))				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2161.	KS			2	Manajemen Taburia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2162.	KS			3	Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2163.	KS		3	Gizi Klinik dan Dietetik								
2164.	KS			1	Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
						SR	R	T	B				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	
2165.	KS			2	Tatalaksana Anak Gizi Buruk					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2166.	KS			3	Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2167.	KS		4	Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan									
2168.	KS			1	Makanan Pendamping ASI					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2169.	KS			2	ASI Eksklusif					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2170.	KS			3	Pedoman Gizi Seimbang					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2171.	KS			4	Makanan Bayi dan Anak					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2172.	KS			5	Buffer Stock Makanan Pendamping ASI					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2173.	KS			6	Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g Makanan Tambahan Anak Sekolah					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2174.	KS		5	Kewaspadaan Gizi									
2175.	KS			1	Surveilans Gizi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2176.	KS			2	Epidemiologi Kasus Gizi Buruk					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2177.	KS			3	Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2178.	KS			4	Jejaring Informasi Pangan dan Gizi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2179.	KS	4	KESEHATAN IBU										
2180.	KS		1	Kesehatan Ibu Hamil									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2181.	KS			1	Pelayanan Antenatal Terpadu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2182.	KS			2	Pelayanan Kelas Ibu Hamil				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2183.	KS			3	Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2184.	KS		2	Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas								
2185.	KS			1	Kemitraan Bidan dan Dukun			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2186.	KS			2	Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2187.	KS			3	Supervisi Fasilitatif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2188.	KS		3	Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi								
2189.	KS			1	Audit Maternal Perinatal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2190.	KS			2	Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2191.	KS			3	Tanda Bahaya pada Kehamilan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2192.	KS			4	Surveilans Kematian Ibu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2193.	KS		4	Keluarga Berencana								
2194.	KS			1	Pelayanan KB Pasca Persalinan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2195.	KS			2	Pelatihan KB Pasca Persalinan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2196.	KS		5	Perlindungan Kesehatan Reproduksi								
2197.	KS			1	Pelayanan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Reproduksi Terpadu (PKRT)							urusan
2198.	KS			2	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2199.	KS			3	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2200.	KS			4	Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2201.	KS	5	KESEHATAN ANAK									
2202.	KS		1	Kelangsungan Hidup Bayi								
2203.	KS			1	Pelayanan Kesehatan Neonatal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2204.	KS			2	Manajemen Asfeksia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2205.	KS			3	Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2206.	KS			4	Pencegahan Infeksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2207.	KS		2	Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah								
2208.	KS			1	Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2209.	KS			2	Rujukan Tumbuh Kembang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2210.	KS			3	Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2211.	KS		3	Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko								
2212.	KS			1	Screening Hypotheroid Congenital				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2213.	KS			2	Surveilance Kesehatan Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2214.	KS			3	Surveilance Kesehatan Bawaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2215.	KS		4	Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja								
2216.	KS			1	Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2217.	KS			2	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2218.	KS			3	Usaha Kesehatan Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2219.	KS		5	Perlindungan Kesehatan Anak								
2220.	KS			1	Korban kekerasan terhadap anak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2221.	KS			2	Anak dengan disabilitas				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2222.	KS			3	Anak terlantar/anak jalanan di panti				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2223.	KS			4	Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2224.	KS			5	Anak kelompok terasing/kelompok minoritas				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2225.	KS	6	KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER									
2226.	KS		1	Kesehatan Tradisional Keterampilan								
2227.	KS			1	Akupresure				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2228.	KS			2	Asuhan Mandiri Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Tradisional							urusan
2229.	KS			3	Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2230.	KS			4	Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2231.	KS		2	Kesehatan Tradisional Ramuan					√			
2232.	KS			1	Health Tourism				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2233.	KS			2	Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2234.	KS			3	Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2235.	KS			4	Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2236.	KS			5	Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2237.	KS		3	Kesehatan Alternatif dan Komplementer								
2238.	KS			1	Akupunktur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2239.	KS			2	Obat Herbal / Obat Tradisional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2240.	KS			3	Integrasi Yankestrad				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2241.	KS			4	Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2242.	KS		4	Penapisan dan Kemitraan								
2243.	KS			1	Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2244.	KS			2	Kelompok Kerja Nasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer						urusan
2245.	KS			3	Penapisan Pengobat Tradisional Asing			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2246.	KS			4	Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2247.	KS			5	Pengobat Tradisional (Lokal)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2248.	KS			6	Asosiasi Pengobat Tradisional			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2249.	KS	7	KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA								
2250.	KS		1	Pelayanan Kesehatan Kerja							
2251.	KS			1	Penyakit Akibat Kerja				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2252.	KS			2	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2253.	KS			3	Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2254.	KS		2	Kapasitas Kerja							
2255.	KS			1	Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2256.	KS			2	Kapasitas Kesehatan Kerja				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2257.	KS			3	TP ASI				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2258.	KS		3	Lingkungan Kerja							
2259.	KS			1	a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2260.	KS			2	b. K3 Perkantoran				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2261.	KS			3	c. K3 Rumah Sakit				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2262.	KS			4	d. Biomonitoring Efek Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2263.	KS			5	e. K3 Puskesmas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2264.	KS			6	f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2265.	KS		4	Kemitraan Kesehatan Kerja								
2266.	KS			1	Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2267.	KS			2	Kesehatan Nelayan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2268.	KS			3	Integrasi Pos UKK			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2269.	KS			4	Kabupaten/Kota Percontohan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2270.	KS			5	Penguatan Profesi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2271.	KS		5	Kesehatan Perkotaan								
2272.	KS			1	a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2273.	KS			2	b. Forum Kota				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2274.	KS		6	Kesehatan Olahraga								
2275.	KS			1	Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2276.	KS			2	Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2277.	KS			3	Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2278.	KS			4	Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2279.	KS			5	Olahraga Bagi Usia Lanjut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2280.	KS			6	Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2281.	KS	8	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN									
2282.	KS		1	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan &								
2283.	KS			1	Harga Jual Obat Generik			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2284.	KS			2	Harga Jual Obat Generik Berdagang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2285.	KS			3	Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2286.	KS		2	Pengadaan Obat								
2287.	KS			1	Pengadaan Vaksin Reguler				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2288.	KS			2	Obat <i>Esensial</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2289.	KS			3	Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2290.	KS			4	Obat Program Malaria				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2291.	KS			5	Obat Program Kesehatan Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2292.	KS			6	Obat Program Kesehatan Ibu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2293.	KS			7	Obat Program Gizi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2294.	KS			8	Obat Anti Tuberkulosis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2295.	KS			9	Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2296.	KS			10	Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2297.	KS			11	Obat Penderita <i>Thalassemia</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2298.	KS			12	Obat Psikotropika Generik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2299.	KS			13	Obat <i>Anti Retro Viral</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2300.	KS		3	Perbekalan Kesehatan								
2301.	KS			1	Gudang Farmasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2302.	KS			2	Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2303.	KS			3	Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2304.	KS			4	Pengadaan Reagen Screening Darah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2305.	KS			5	Obat <i>Buffer Stock</i>				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2306.	KS			6	Hasil <i>Stock Opname</i> Obat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2307.	KS	9	PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN									
2308.	KS		1	Alat Kesehatan								
2309.	KS			1	Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2310.	KS			2	Kopendium Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2311.	KS			3	Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2312.	KS			4	Post Market & Surveillance Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2313.	KS			5	Produk Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Elektromedik							urusan
2314.	KS			6	Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2315.	KS		2	Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat								
2316.	KS			1	Industri Farmasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2317.	KS			2	Pedagang Besar Farmasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2318.	KS			3	Pedagang Eceran Obat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2319.	KS			4	Penyalur Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2320.	KS			5	Toko Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2321.	KS			6	Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2322.	KS		3	Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)								
2323.	KS			1	Produk Diagnostik In Vitro				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2324.	KS			2	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2325.	KS			3	PKRT Klas III				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2326.	KS			4	PKRT Klas I dan II				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2327.	KS			5	Perusahaan Rumah Tangga PKRT				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2328.	KS			6	Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2329.	KS			7	Post Market & Surveillance PKRT				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
2330.	KS	10	KEFARMASIAN (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)									
2331.	KS		1	Pelayanan Kefarmasian								
2332.	KS		1	Visite untuk Apoteker					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2333.	KS		2	Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2334.	KS		3	Penulisan Resep					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2335.	KS		2	Farmasi Klinik								
2336.	KS		1	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2337.	KS		2	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2338.	KS		3	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2339.	KS		4	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2340.	KS		5	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2341.	KS		6	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2342.	KS		7	Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2343.	KS		8	Pharmaceutical Care Lainnya					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2344.	KS		9	Dispensing Sediaan Steril					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2345.	KS		10	Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2346.	KS		11	Pharmaceutical Care untuk					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom, koronwer akut							urusan
2347.	KS		3		Farmasi Komunitas							
2348.	KS			1	Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2349.	KS			2	Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2350.	KS			3	Kefarmasian untuk Pasien Pediatri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2351.	KS			4	Kefarmasian untuk Penyakit Malaria				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2352.	KS			5	Farmasi di Rumah Sakit				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2353.	KS		4		Penggunaan Obat Rasional							
2354.	KS			1	Obat Rasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2355.	KS			2	Informasi Obat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2356.	KS			3	Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2357.	KS			4	Pemantauan Terapi Obat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2358.	KS	11	PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN									
2359.	KS		1		Obat Tradisional							
2360.	KS			1	Farmakope Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2361.	KS			2	Farmakope Herbal Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2362.	KS			3	Suplemen I Farmakope Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2363.	KS			4	Suplemen II Farmakope Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2364.	KS			5	Suplemen II Farmakope Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2365.	KS			6	Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2366.	KS			7	Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2367.	KS			8	Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2368.	KS			9	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2369.	KS			10	Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2370.	KS			11	Usaha Jamu Gendong (UJG)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2371.	KS			12	Usaha Jamu Racik (UJR)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2372.	KS			13	Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2373.	KS		2	Kosmetik dan Makanan								
2374.	KS			1	a.Keamanan Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2375.	KS			2	b.Kosmetika bagi Petugas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2376.	KS			3	c.Industri Rumah Tangga bagi Petugas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2377.	KS			4	d.Makanan Jajanan Anak Sekolah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2378.	KS			5	e.Kodeks Kosmetika Indonesia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2379.	KS			6	f.Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2380.	KS		3	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Khusus						
2381.	KS		1	Narkotika dan Psikotropika			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2382.	KS		2	Prekursor Farmasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2383.	KS		3	Sediaan Farmasi Khusus			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2384.	KS		4	Persetujuan Impor dan Ekspor			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2385.	KS		5	Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2386.	KS		4	Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat						
2387.	KS		1	Indonesian Pharmaceutical Industry Directory			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2388.	KS	12	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN							
2389.	KS		1	Surat Keterangan						
2390.	KS		1	Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2391.	KS		2	Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2392.	KS		3	Surat Keterangan Alat Kesehatan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2393.	KS		4	Sertifikasi Produksi PKRT			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2394.	KS		5	Surat Keterangan PKRT			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2395.	KS		6	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2396.	KS		7	Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2397.	KS			8	Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2398.	KS			9	Perijinan Penyalur Alat Kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2399.	KS			10	Surat Keterangan Alat Kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2400.	KS			11	Sertifikasi Produksi PKRT			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2401.	KS			12	Surat Keterangan PKRT			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2402.	KS	13	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN									
2403.	KS		1	Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan								
2404.	KS			1	Pencegahan dan Mitigasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2405.	KS			2	Kesiapsiagaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2406.	KS		2	Tanggap Darurat dan Pemulihan								
2407.	KS			1	Tanggap Darurat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2408.	KS			2	Pemulihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2409.	KS		3	Pemantauan dan Informasi								
2410.	KS			1	Pemantauan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2411.	KS			2	Informasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2412.	KS		4	Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan				√		Tk. Eselon		
2413.	KS		5	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana					√	Staff		
2414.	KS	14	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
			KESEHATAN								
2415.	KS		1	Tersedianya data NHA Setiap Tahun			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2416.	KS		2	Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2417.	KS	15	INTELIGENSIA KESEHATAN								
2418.	KS		1	Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan							
2419.	KS		1	Inteligensia Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2420.	KS		2	Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2421.	KS		2	Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan							
2422.	KS		1	Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2423.	KS		2	Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2424.	KS	16	KESEHATAN HAJI								
2425.	KS		1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji							
2426.	KS		1	Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2427.	KS		2	Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2428.	KS		3	Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debakasi atau KKP				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2429.	KS		4	Pelayanan Kesehatan Embarkasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2430.	KS		5	Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					(PPIH)							
2431.	KS			6	Rekrutmen Tenaga Musiman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2432.	KS		2	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji								
2433.	KS			1	Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2434.	KS			2	Kesehatan Haji di Kab/kota			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2435.	KS			3	Kesehatan Haji Terpadu				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2436.	KS			4	Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2437.	KS			5	Vaksinasi jamaah Haji				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2438.	KS			6	Sanitasi Asrama Haji				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2439.	KS			7	Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2440.	KS	17	PROMOSI KESEHATAN									
2441.	KS		1	Sarana Promosi Kesehatan								
2442.	KS			1	Booklet				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2443.	KS			2	Poster				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2444.	KS			3	Leaflet				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2445.	KS			4	Pamflet				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2446.	KS			5	Lembar Balik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2447.	KS			6	Selebaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2448.	KS			7	Buletin				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2449.	KS			8	Festival				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2450.	KS			9	Lomba				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2451.	KS			10	Pameran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2452.	KS			11	Seminar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2453.	KS			12	Iklan Layanan Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2454.	KS			13	Film				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2455.	KS			14	Radio Spot				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2456.	KS		2	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran								
2457.	KS			1	Saka Bhakti Husada				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2458.	KS			2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2459.	KS			3	Lembaga Sosial/Organisasi Masyarakat di Bidang Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2460.	KS			4	Kawasan Tanpa Rokok				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2461.	KS			5	Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2462.	KS			6	Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2463.	KS			7	Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2464.	KS			8	Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak							
2465.	KS		3	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan								
2466.	KS			1	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2467.	KS			2	Kampanye Promosi Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2468.	KS			3	Video Animasi Promosi Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2469.	KS		4	Hari Kesehatan								
2470.	KS			1	Hari Kesehatan Nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2471.	KS			2	Hari Kesehatan Dunia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2472.	KS			3	Hari tanpa Tembakau se-Dunia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2473.	KS			4	Hari-hari Besar Kesehatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2474.	KS	18	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA									
2475.	KS		1	Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2476.	KS	19	DATA DAN INFORMASI									
2477.	KS		1	Statistik Kesehatan								
2478.	KS			1	Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2479.	KS			2	Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
					SR	R	T	B					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		
2480.	KS		2	Analisis dan Diseminasi Informasi									
2481.	KS			1	Analisis Data Kesehatan				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2482.	KS			2	Diseminasi Informasi Kesehatan				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2483.	KS		3	Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan									
2484.	KS			1	Pengembangan Sistem Informasi				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2485.	KS			2	Bank Data				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
	PM	URUSAN PENANAMAN MODAL											
2486.	PM	1	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL										
2487.	PM		1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya									
2488.	PM			1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2489.	PM			2	Kelautan, Perikanan dan Peternakan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2490.	PM			3	Energi Terbarukan					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2491.	PM			4	Energi Tak Terbarukan					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2492.	PM			5	Sumber Daya Mineral Logam					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2493.	PM			6	Sumber Daya Mineral Non Logam					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2494.	PM		2	Perencanaan Industri Manufaktur									
2495.	PM			1	Industri Logam dan Mesin					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2496.	PM			2	Industri Tekstil dan Aneka					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2497.	PM			3	Industri Kimia Dasar					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
2498.	PM			4	Industri Barang Kimia dan Farmasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2499.	PM			5	Industri Alat Transportasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2500.	PM			6	Industri Telematika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2501.	PM		3	Perencanaan Jasa dan Kawasan								
2502.	PM			1	Jasa Perdagangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2503.	PM			2	Jasa Pariwisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2504.	PM			3	Kawasan Ekonomi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2505.	PM			4	Kawasan Ekonomi Khusus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2506.	PM			5	Kawasan Ekonomi Lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2507.	PM		4	Perencanaan Infrastruktur								
2508.	PM			1	Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkertaapian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2509.	PM			2	Infrastruktur Jalan dan Jembatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2510.	PM			3	Infrastruktur Energi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2511.	PM			4	Infrastruktur Sumber Daya Air			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2512.	PM			5	Infrastruktur Transportasi Laut				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2513.	PM			6	Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2514.	PM	2	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
					SR	R	T	B					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		
2515.	PM		1	Deregulasi Penanaman Modal									
2516.	PM			1	Sektor Primer Pertanian, Kelautan dan Perikanan				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2517.	PM			2	Sektor Primer Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2518.	PM			3	Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2519.	PM			4	Sektor Sekunder Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2520.	PM			5	Sektor Tersier Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2521.	PM			6	Sektor Tersier Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2522.	PM		2	Pengembangan Peluang Potensi Daerah									
2523.	PM			1	Sektor Primer					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2524.	PM			2	Sektor Tersier					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2525.	PM			3	Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2526.	PM			4	Sektor Sekunder Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2527.	PM		3	Pemberdayaan Usaha									
2528.	PM			1	Pembinaan					√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2529.	PM			2	Penyuluhan						√		

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2530.	PM			3	Sektor Primer dan Tersier				√			
2531.	PM			4	Sektor Sekunder			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2532.	PM			5	Pelayanan Usaha Sektor Primer dan Tersier				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2533.	PM			6	Pelayanan Usaha Sektor Sekunder				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2534.	PM			7	Workshop dan Sosialisasi				√	Staff	Tidak beresiko	
2535.	PM	3	PROMOSI PENANAMAN MODAL									
2536.	PM		1	Pengembangan Promosi								
2537.	PM			1	Analisis Target Strategi Promosi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2538.	PM			2	Analisis Strategi Daya Saing Promosi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2539.	PM			3	Fasilitaslayah Promosi Wilayah Pasifik dan Afrika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2540.	PM			4	Fasilitasi Fromosi Wilayah Jawa Barat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2541.	PM		2	Promosi Sektoral								
2542.	PM			1	Promosi Industri Sumber Daya Alam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2543.	PM			2	Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2544.	PM			3	Industri Manufaktur Lainnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2545.	PM			5	Promosi Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2546.	PM			6	Promosi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2547.	PM		3	Fasilitasi Promosi Wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten					√	Staff		

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
2548.	PM		4	Pameran dan Sarana Promosi								
2549.	PM			1	Pameran Dalam Penyusunan Program dan Monitoring				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2550.	PM			2	Pameran Dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2551.	PM			3	Media Cetak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2552.	PM			4	Materi Promosi Media Cetak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2553.	PM			5	Publikasi dan Distribusi Media cetak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2554.	PM			6	Pameran Luar Negeri Publikasi dan Distribusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2555.	PM			7	Materi Promosi Media Elektronik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2556.	PM			8	Pelayanan Informasi Media Elektronik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2557.	PM	4	KERJA SAMA PENANAMAN MODAL									
2558.	PM		1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral								
2559.	PM			1	Kerja Wilayah Amerika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2560.	PM			2	Kerja Sama Wilayah Eropa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2561.	PM			3	Kerja Sama Wilayah Asia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2562.	PM			4	Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2563.	PM			5	Kerja Sama Organisasi PBB				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2564.	PM			6	Kerja Sama Organisasi Non PBB				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2565.	PM		2	Kerja Sama Regional ASEAN								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2566.	PM			1	Kerja Sama ASEAN			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2567.	PM			2	Kerja Sama Sub Regional ASEAN			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2568.	PM			3	Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia						Tidak beresiko	
2569.	PM			4	Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2570.	PM			5	Kerja Sama APEC			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2571.	PM			6	Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2572.	PM			7	Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2573.	PM		3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional								
2574.	PM			1	Asosiasi Bisnis			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2575.	PM			2	Lembaga Bisnis			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2576.	PM			3	Lembaga Perbankan			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2577.	PM			4	Lembaga Non Perbankan			√		Staff		Unit pelaksana urusan
2578.	PM	5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
2579.	PM		1	Pelayanan Aplikasi								
2580.	PM			1	Aplikasi Baru Sektor Primer dan Tersier			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2581.	PM			2	Aplikasi Perluasan Sektor Primer dan Tersier			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2582.	PM			3	Aplikasi Perubahan Sektor Primer dan Tersier			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2583.	PM			4	Aplikasi Baru Sektor Sekunder			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2584.	PM			5	Aplikasi Perluasan Sektor Sekunder			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2585.	PM			6	Aplikasi Perubahan Sektor Sekunder			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2586.	PM			7	Aplikasi Sektor Tersier			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2587.	PM			8	Pengolahan Data Penanaman Modal			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2588.	PM			9	Laporan PMPTSP			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2589.	PM		2	Pelayanan Perizinan								
2590.	PM			1	Perizinan Sektor Primer dan TersierPertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2591.	PM			2	Perizinan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2592.	PM			3	Perizinan Sektor Primer dan TersierPertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2593.	PM			4	Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2594.	PM			5	Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2595.	PM			6	Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2596.	PM			7	Verifikasi/Validasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2597.	PM			8	Pertimbangan Teknis		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2598.	PM			9	Tim Teknis			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2599.	PM			10	Penerbitan Naskah Izin			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2600.	PM			11	BKPRD			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2601.	PM		3	Pelayanan Fasilitas								
2602.	PM			1	Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2603.	PM			2	Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2604.	PM			3	Pelayanan Sektor Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2605.	PM			4	Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2606.	PM			5	Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2607.	PM			6	Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2608.	PM	6	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
2609.	PM		1	BAP Pemantauan Penanaman Modal			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2610.	PM		2	Laporan Triwulan/Semester Pemantauan Penanaman Modal			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2611.	PM		3	Helpdesk Pemantauan Penanaman Modal			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2612.	PM		4	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal dan PTSP				√	Staff	Unit pelaksana urusan
2613.	PM		5	Saksi Fasilitasi Penyelesaian PMPTSP			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2614.	PM		6	Pembelaan Fasilitasi Penyelesaian PMPTSP			√	Tk. Eselon		
2615.	PM		7	Pemberi Keterangan FSP			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2616.	PM		8	Analisis PMPTSP			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2617.	PM		9	Pengawasan Penanaman Modal 5 Tahun Musnah			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2618.	PM		10	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal				√	Staff	Tidak beresiko
2619.	PM		11	Naskah dan Dokumen Izin			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2620.	PM		12	Naskah dan Dokumen Izin Kadaluarsa			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2621.	PM		13	Izin Investasi Strategis Penanaman Modal			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2622.	PM		14	Perizinan lainya sesuai jenisnya			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2623.	PM		15	Pencabutan /Pembatalan/Perbaikan Perizinan Penanaman Modal			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2624.	PM		16	Administrasi PMPTSP			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
					SR	R	T	B					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		
2625.	PM		17	Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan		
2626.	PM		18	Workshop/Bintek/Diklat PMPTSP					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
	KOM	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2627.	KOM	1	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA										
2628.	KOM		1	PENATAAN SUMBER DAYA									
2629.	KOM			1	Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap,				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
2630.	KOM			2	Penataan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat,				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
2631.	KOM			3	Alokasi Dinas Bergerak Darat					√			
2632.	KOM			4	Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
2633.	KOM			5	Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
2634.	KOM			6	Pengelolaan Orbit Satelit Notifikasi dan Penataan Filing Satelit					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2635.	KOM			7	Pengelolaan Orbit Satelit Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
2636.	KOM			8	Ekonomi Sumber Daya Analisa Industri dan Ekonomi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2637.	KOM			9	Ekonomi Sumber Dya Penanganan Izin Pita					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2638.	KOM			10	Harmonisasi Teknik Spektrum Teknik Spektrum Antar lembaga					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2639.	KOM			11	Harmonisasi Teknik Spektrum Harmonisasi dan Notifikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2640.	KOM		2	OPERASI SUMBER DAYA								
2641.	KOM			1	Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Tetap				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2642.	KOM			2	Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2643.	KOM			3	Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2644.	KOM			4	PelayananAlokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2645.	KOM			5	Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpenduduk			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2646.	KOM			6	Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Operator Radio			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2647.	KOM			7	Penanganan Biaya Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2648.	KOM			8	Penanganan Biaya Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2649.	KOM			9	Konsultasi Dan Informasi Data Operasi Sumber Daya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2650.	KOM			10	Konsultasi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2651.	KOM		3	PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2652.	KOM			1	Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2653.	KOM			2	Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2654.	KOM			3	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2655.	KOM			4	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2656.	KOM			5	Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2657.	KOM			6	Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2658.	KOM			7	Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2659.	KOM			8	Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2660.	KOM			9	Monitoring Frekuensi Radio			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
2661.	KOM		4	STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA								
2662.	KOM			1	Teknik Pos Dan Telekomunikasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2663.	KOM			2	Teknik Komunikasi Radio		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2664.	KOM			3	Penerapan Standar Pos Dan Telekomunikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2665.	KOM			4	Kualitas Pelayanan Dan Harmonisasi Standar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2666.	KOM			5	Standar Dan Audit Perangkat Lunak		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2667.	KOM			6	Pengujian Perangkat Telekomunikasi				√			
2668.	KOM	2	PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA									
2669.	KOM		1	POS								
2670.	KOM			1	Layanan Pos Universal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2671.	KOM			2	Penerapan Layanan Pos Universal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2672.	KOM			3	Layanan Pos Komersial Tata Kelola Layanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2673.	KOM			4	Layanan Pos Komersial Data dan Informasi Layanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2674.	KOM			5	Prangko				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2675.	KOM			6	Filateli				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2676.	KOM			7	Iklm Usaha Pos Universal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2677.	KOM			8	Iklm Usaha Pos Komersial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2678.	KOM			9	Pentarifan Pos Layanan Pos Universal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2679.	KOM			10	Pentarifan Pos Komersial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2680.	KOM		2	TELEKOMUNIKASI								
2681.	KOM			1	Layanan Jaringan Telekomunikasi Akses				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2682.	KOM			2	Layanan Jaringan Telekomunikasi Backbone				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2683.	KOM			3	Layanan Jasa Telekomunikasi Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2684.	KOM			5	Penomoran Telekomunikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2685.	KOM			6	Penomoran Informatika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2686.	KOM			7	Tarif Telekomunikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2687.	KOM			8	Interkoneksi Telekomunikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2688.	KOM			9	Kelayakan Sistem Telekomunikasi Jaringan dan Jasa		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2689.	KOM			10	Kelayakan Penerapan Sistem Teknologi Telekomunikasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2690.	KOM		3	PENYIARAN								
2691.	KOM			1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2692.	KOM			2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2693.	KOM			3	Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2694.	KOM			4	Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2695.	KOM			5	Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2696.	KOM			6	Lembaga Penyiaran Swasta Radio			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2697.	KOM			7	Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Televisi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2698.	KOM			8	Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2699.	KOM			9	Lembaga Penyiaran Swasta Televisi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2700.	KOM			10	Iklim Usaha Penyiaran Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2701.	KOM			11	Iklim Usaha Penyiaran Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2702.	KOM		4	TELEKOMUNIKASI KHUSUS PENYIARAN PUBLIK DAN KEWAIBAN UNIVERSAL								
2703.	KOM			1	Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pemerintah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2704.	KOM			2	Pelayanan Telekomunikasi Khusus Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2705.	KOM			3	Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Non			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Pemerintah							
2706.	KOM			4	Pelayanan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2707.	KOM			5	Layanan Khusus Penyiaran Publik Radio				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2708.	KOM			6	Layanan Khusus Penyiaran Publik Televisi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2709.	KOM			7	Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kewajiban Universal			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2710.	KOM			8	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kewajiban Universal				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2711.	KOM			9	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2712.	KOM			10	Analisa Ekonomis Pengembangan Infrastruktur			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2713.	KOM		5	PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA								
2714.	KOM			1	Monitoring Pos				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2715.	KOM			2	Evaluasi Pos				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2716.	KOM			3	Analisa Ekonomis Infrastruktur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2717.	KOM			4	Monitoring Jasa Telekomunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2718.	KOM			5	Evaluasi Jasa telekomunikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2719.	KOM			6	Monitoring Penyiaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2720.	KOM			7	Evaluasi Penyiaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2721.	KOM			8	Pencegahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2722.	KOM			9	Penertiban				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2723.	KOM	3	APLIKASI INFORMATIKA									
2724.	KOM		1	E-GOVERNMENT								
2725.	KOM			1	Tata Kelola Program e-Government			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2726.	KOM			2	Tata Kelola Evaluasi e-Government			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2727.	KOM			3	Teknologi e-Government			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2728.	KOM			4	Infrastruktur e-Government			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2729.	KOM			5	Interoperabilitas e-Government			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2730.	KOM			6	Interkonektivitas e-Governmen			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2731.	KOM			7	Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2732.	KOM			8	Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2733.	KOM			9	Inisiasi Aplikasi Layanan Publik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2734.	KOM			10	Fasilitas Aplikasi Layanan Publik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2735.	KOM		2	E- BUSINESS								
2736.	KOM			1	Tata Kelola Program e-Business			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2737.	KOM			2	Tata Kelola Evaluasi e-Business			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2738.	KOM			3	Teknologi e-Business			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2739.	KOM			4	Interoperabilitas e-Business			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2740.	KOM			5	Interkonektivitas e-Business			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2741.	KOM			6	Aplikasi Layanan E-Business Bidang Usaha Kecil dan Mikro				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2742.	KOM			7	Aplikasi Layanan E-Business Bidang Usaha Menengah dan Besar				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2743.	KOM		3	PEMBERDAYAAN INFORMATIKA								
2744.	KOM			1	Perancangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2745.	KOM			2	Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2746.	KOM			3	Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2747.	KOM			4	Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2748.	KOM			5	Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan Dan Pulau Terluar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2749.	KOM			6	Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan Dan Pulau Terluar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2750.	KOM			7	Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2751.	KOM			8	Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2752.	KOM		4	PEMBERDAYAAN INDUSTRI INFORMATIKA								
2753.	KOM			1	Pemberdayaan Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2754.	KOM			2	Promosi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2755.	KOM			3	Pemberdayaan Industri Perangkat Informatika Pengguna			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2756.	KOM			4	Pengembangan Produk Industri Perangkat Informatika Pengguna			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2757.	KOM			5	Pemberdayaan Industri Perangkat Lunak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2758.	KOM			6	Pengembangan Produk Industri Perangkat Lunak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2759.	KOM			7	Pemberdayaan Industri Konten Multimedia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2760.	KOM			8	Pengembangan Produk Industri Konten Multimedia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2761.	KOM		5	KEAMANAN INFORMASI								
2762.	KOM			1	Tata Kelola Keamanan Informasi Kelembagaan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2763.	KOM			2	Tata Kelola Keamanan Informasi Manajemen Risiko		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2764.	KOM			3	Teknologi Keamanan Informasi Infrastruktur			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2765.	KOM			4	Teknologi Keamanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Informasi Aplikasi						urusan
2766.	KOM			5	Monitoring, Evaluasi Dan Tanggap Darurat Kemanan Informasi Infrastruktur			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2767.	KOM			6	Monitoring, Evaluasi Dan Tanggap Darurat Kemanan Informasi Aplikasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2768.	KOM			7	Penyidikan Dan Penindakan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2769.	KOM			8	Penyidikan Dan Penindakan Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2770.	KOM			9	Penyidikan Budaya Keamanan Informasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2771.	KOM			10	Penindakan Budaya Keamanan Informasi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2772.	KOM	4	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2773.	KOM		1	KOMUNIKASI PUBLIK							
2774.	KOM			1	Tata Kelola Program Komunikasi Publik			√		Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2775.	KOM			2	Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi			√		Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2776.	KOM			3	Pengelolaan Pengumpulan Opini Publik			√		Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2777.	KOM			4	Pengelolaan Pengolahan Opini Publik			√		Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2778.	KOM			5	Pengumpulan Data Layanan Komunikasi Publik			√		Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2779.	KOM			6	Pengolahan Data Layanan Komunikasi Publik			√		Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
2780.	KOM		2	PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI							
2781.	KOM			1	Informasi Politik dan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Kemanan							urusan
2782.	KOM			2	Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2783.	KOM			3	Informasi Perekonomian Keuangan, Perbankan, dan Jasa		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2784.	KOM			4	Informasi Perekonomian Industri dan Perdagangan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2785.	KOM			5	Informasi Kesejahteraan Agama, Sosial, dan Budaya		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2786.	KOM			6	Informasi Kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2787.	KOM		3	PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK								
2788.	KOM			1	Media Cetak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2789.	KOM			2	Media Online				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2790.	KOM			3	Media Audio Visual dan Luar Ruang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2791.	KOM		4	KEMITRAAN KOMUNIKASI								
2792.	KOM			1	Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2793.	KOM			2	Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah Dan Lembaga Negara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2794.	KOM			3	Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2795.	KOM			4	Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Media Dan Dunia Usaha			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2796.	KOM			5	Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					dan Profesi							
2797.	KOM			6	Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Dan Profesi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2798.	KOM		5	LAYANAN INFORMASI INTERNASIONAL								
2799.	KOM			1	Program Layanan Informasi Media Asing				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2800.	KOM			2	Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Media Asing				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2801.	KOM			3	Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2802.	KOM			4	Monitoring dan Evaluasi Informasi Perwakilan Negara Asing Dan Lembaga Internasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2803.	KOM			5	Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2804.	KOM			6	Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2805.	KOM	5	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA									
2806.	KOM		1	Infrastruktur Informatika								
2807.	KOM			1	Jaringan Infrastruktur Informatika		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2808.	KOM			2	Piranti Teknologi Infrastruktur Informatika		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2809.	KOM			3	Keamanan Infrastruktur Informatika		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2810.	KOM		2	Sistem dan Data								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2811.	KOM			1	Sistem Portal dan Konten		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2812.	KOM			2	Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2813.	KOM			3	Sistem Pengembangan Aplikasi		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2814.	KOM		3	Pusat Kerjasama Internasional								
2815.	KOM			1	Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2816.	KOM			2	Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2817.	KOM			3	Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2818.	KOM			4	Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2819.	KOM			5	Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2820.	KOM			6	Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					dan Komunikasi Regional							
2821.	KOM			7	Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2822.	KOM			8	Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2823.	KOM		4		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat							
2824.	KOM			1	Pelayanan Informasi Media Baru				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2825.	KOM			2	Pelayanan Informasi Media Konvensional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2826.	KOM			3	Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Perpustakaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2827.	KOM			4	Publikasi Hubungan Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2828.	KOM			5	Analisis Berita Hubungan masyarakat dan Pengelolaan Opini Publik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2829.	KOM			6	Hubungan Masyarakat Internal dan Eksternal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2830.	KOM			7	Bimbingan Teknis Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2831.	KOM			8	Bimbingan Teknis Informatika, Aplikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas							
2832.	KOM			9	Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	PDT	URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL										
2833.	PDT	1	Pengembangan Sumber Daya									
2834.	PDT		1	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya								
2835.	PDT			1	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan Ketrampilan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2836.	PDT			2	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Kesehatan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2837.	PDT			3	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Hayati				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2838.	PDT			4	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2839.	PDT			5	Teknologi dan Inovasi				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2840.	PDT		2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya						√	Staff	
2841.	PDT		3	Pemantauan dan evaluasi						√	Staff	Tidak beresiko
2842.	PDT	2	Peningkatan Infrastruktur									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
2843.	PDT		1	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur					Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2844.	PDT			1	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Transportasi				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2845.	PDT			2	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2846.	PDT			3	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Sosial				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2847.	PDT			4	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Ekonomi				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2848.	PDT			5	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Energi				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2849.	PDT		2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur					Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2850.	PDT		3	Pemantauan dan evaluasi				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2851.	PDT	3	Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha								
2852.	PDT		1	Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha							Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
2853.	PDT			1	Investasi Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2854.	PDT			2	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2855.	PDT			3	Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2856.	PDT			4	Kemitraan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2857.	PDT			5	Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha Pengembangan Komoditas Unggulan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2858.	PDT		2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha					√	Staff		Tidak beresiko
2859.	PDT		3	Pemantauan dan evaluasi					√	Staff		Tidak beresiko
2860.	PDT	4	Pembinaan Lembaga Sosial Dan Budaya									
2861.	PDT		1	Fasilitasi Pembinaan						Staff	Tidak beresiko	
2862.	PDT			1	Fasilitasi Pembinaan Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal				S t a f f	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan
2863.	PDT			2	Fasilitasi Pembinaan Penguatan Organisasi Masyarakat				S t a f f	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan
2864.	PDT			3	Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat				S t a f	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
									f			
2865.	PDT			4	Fasilitasi Pembinaan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya				S t a f f	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan
2866.	PDT			5	Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan				S t a f f	Tidak beresiko		Unit pelaksana urusan
2867.	PDT		2		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya				√	Staff	Tidak beresiko	
2868.	PDT		3		Pemantauan dan evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	
2869.	PDT	5			Pengembangan Daerah Khusus							
2870.	PDT		1		Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus							
2871.	PDT			1	Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus Perbatasan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2872.	PDT			2	Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus Daerah Rawan Konflik dan Bencana				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2873.	PDT			3	Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus Perdesaan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2874.	PDT			4	Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus Daerah Pulau Terpencil dan Terluar				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2875.	PDT			5	Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus Wilayah Strategis				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2876.	PDT		2		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus				√			
2877.	PDT		3		Pemantauan dan evaluasi				√	Tk. Eselon		

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	TK	URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
2878.	TK	1	PERENCANAAN TENAGA KERJA								
2879.	TK		1	Perencanaan Tenaga Kerja Makro							
2880.	TK			1	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2881.	TK			2	Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2882.	TK			3	Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2883.	TK			4	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2884.	TK			5	Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2885.	TK			6	Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2886.	TK		2	Perencanaan Tenaga Kerja Mikro							
2887.	TK			1	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2888.	TK			2	Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2889.	TK			3	Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
2890.	TK			4	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					KerjaPerusahaan Swasta							
2891.	TK			5	Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2892.	TK			6	Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
2893.	TK		3	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS								
2894.	TK			1	Penerapan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pogram Pelatihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2895.	TK			2	Bimbingan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2896.	TK			3	Program Pengembangan Standarisasi Kompetensi Pelatihan Ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2897.	TK			4	Penyusunan Materi Peltihan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2898.	TK			5	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2899.	TK			6	Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2900.	TK			7	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2901.	TK			8	Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Ketransmigrasian						
2902.	TK		4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja						
2903.	TK			1	Akreditasi Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2904.	TK			2	Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2905.	TK			3	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2906.	TK			4	Pengembangan Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2907.	TK			5	Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2908.	TK			6	Pengembangan Bimbingan Penerapan Standar Mutu			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2909.	TK			7	Sistem Pendanaan Pelatihan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2910.	TK			8	Kerjasama Antar Lembaga			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2911.	TK		5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan						
2912.	TK			1	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2913.	TK			2	Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2914.	TK			3	Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2915.	TK			4	Pengembangan Karir Instruktur Lembaga			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Pelatihan Swasta						
2916.	TK			5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2917.	TK			6	Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2918.	TK			7	Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2919.	TK			8	Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2920.	TK		6	Pelatihan 4 Bina Pemagangan							
2921.	TK			1	Bina Program Pemagangan Dalam Negeri			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2922.	TK			2	Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2923.	TK			3	Bina Program Pemagangan Luar Negeri			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2924.	TK			4	Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2925.	TK			5	Perizinan dan Rekomendasi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2926.	TK			6	Advokasi dan Perlindungan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2927.	TK			7	Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2928.	TK			8	Pemagangan Jejaring Pemagangan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2929.	TK		7	Produktivitas dan Kewirausahaan							
2930.	TK			1	Pengembangan Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2931.	TK			2	Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Kewirausahaan							
2932.	TK			3	Pengembangan Sistem dan Metode Produktivitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2933.	TK			4	Pengembangan Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2934.	TK			5	Pengembangan Pengukuran Produktivitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2935.	TK			6	Kajian Produktivitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2936.	TK			7	Pengembangan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2937.	TK			8	Pengembangan Bimbingan Konsultasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2938.	TK	2	PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA									
2939.	TK		1	Pengembangan Pasar Kerja								
2940.	TK			1	Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2941.	TK			2	Informasi Pasar Kerja Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2942.	TK			3	Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2943.	TK			4	Analisis Pasar Kerja Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2944.	TK			5	Bursa Kerja Dalam Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2945.	TK			6	Bursa Kerja Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2946.	TK			7	Analisis dan Informasi Jabatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2947.	TK			8	Pengembangan Sistem Analisis Jabatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2948.	TK		2	Penempatan Tenaga Kerja Dalam								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
				Negeri							
2949.	TK		1	Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL)				√	Staff	Tidak beresiko	
2950.	TK		2	Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2951.	TK		3	Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2952.	TK		4	Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2953.	TK		5	Penyuluhan Jabatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2954.	TK		6	Bimbingan Jabatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2955.	TK		7	Pengembangan pemberdayaan Kompetensi Pengantar Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2956.	TK		8	Kerjasama antar Lembaga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2957.	TK		3	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri							
2958.	TK		1	Perizinan Kelembagaan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2959.	TK		2	Evaluasi Kinerja				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2960.	TK		3	Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2961.	TK		4	Fasilitasi Penyediaan TKI				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2962.	TK		5	Perlindungan Advokasi dan Kepulangan TKI				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2963.	TK		6	Sarana dan Perlindungan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
2964.	TK			7	Kerjasama Bilateral			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2965.	TK			8	Kerjasama Regional dan Multilateral			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2966.	TK		4	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal								
2967.	TK			1	Tenaga Kerja Mandiri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2968.	TK			2	Tenaga Kerja Sektor Informal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2969.	TK			3	Pengembangan Padat Karya Perdesaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2970.	TK			4	Pengembangan Padat Karya Perkotaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2971.	TK			5	Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna							
2972.	TK			6	Penyebarluasan Terapan Teknologi Tepat Guna							
2973.	TK			4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga							
2974.	TK			7	Pemberdayaan Pendampingan				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2975.	TK			8	Kerjasama Antar Lembaga				√			
2976.	TK		5	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing								
2977.	TK			1	Analisis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2978.	TK			2	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2979.	TK			3	Analisis Rencana			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa							urusan
2980.	TK			4	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2981.	TK			5	Pengendalian			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2982.	TK			6	Kerjasama Kelembagaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2983.	TK		6	Standardisasi Profesi								
2984.	TK			1	Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2985.	TK			2	Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2986.	TK			3	Pembakuan Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2987.	TK			4	Pembakuan Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2988.	TK	3	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA									
2989.	TK		1	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi								
2990.	TK			1	Peraturan Perusahaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2991.	TK			2	Perjanjian Kerja Bersama			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2992.	TK			3	Perjanjian Kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2993.	TK			4	Program Kesejahteraan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
2994.	TK			5	Fasilitas Kesejahteraan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
2995.	TK			6	Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja				√	Staff		Unit pelaksana urusan
2996.	TK			7	Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2997.	TK		2	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial								
2998.	TK			1	Organisasi Pekerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
2999.	TK			2	Organisasi Pengusaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3000.	TK			3	Lembaga Kerjasama BIPARTIT				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3001.	TK			4	Lembaga Kerjasama TRIPARTIT				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3002.	TK			3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial							
3003.	TK			5	Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3004.	TK			6	Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3005.	TK		3	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial								
3006.	TK			1	Penerapan Standar Pengupahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3007.	TK			2	Pengurusan Pengupahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3008.	TK			3	Pengurusan Jamsostek				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Dalam Hubungan Kerja							urusan
3009.	TK			4	Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3010.	TK			4	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial							
3011.	TK			1	Pencegahan Dini Perselisihan Hubungan Industrial				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3012.	TK			2	Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3013.	TK			5	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial							
3014.	TK			1	Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3015.	TK			2	Evaluasi dan Pelaporan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3016.	TK			6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial							
3017.	TK			1	Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3018.	TK			2	Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3019.	TK	4	PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN									
3020.	TK			1	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							
3021.	TK			1	Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3022.	TK			2	Pengawasan Norma Pengupahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3023.	TK			3	Pengawasan Norma Hubungan Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3024.	TK			4	Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3025.	TK			5	Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3026.	TK			6	Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3027.	TK		2	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak								
3028.	TK			1	Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3029.	TK			2	Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3030.	TK			3	Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3031.	TK			4	Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3032.	TK			5	Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3033.	TK			6	Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3034.	TK			7	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3035.	TK			8	Advokasi Tenaga Kerja Anak				√			
3036.	TK		3	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
3037.	TK			1	Pengawasan Norma Mekanik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3038.	TK			2	Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3039.	TK			3	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3040.	TK			4	Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3041.	TK			5	Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3042.	TK			6	Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3043.	TK			7	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3044.	TK			8	Pengawasan Norma Bahan Berbahaya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3045.	TK			9	Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3046.	TK			10	Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3047.	TK		4	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan					√	Tk. Eselon		
3048.	TK		5	Bina Penegakan Hukum								
3049.	TK			1	Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3050.	TK			2	Penindakan Norma Ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3051.	TK			3	Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3052.	TK			4	Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3053.	TK			5	Pengembangan Pempemberdayaan PPNS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3054.	TK			6	Pengembangan Sarana dan Prasarana PPNS				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3055.	TK			7	Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3056.	TK			8	Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3057.	TK	5	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA									
3058.	TK		1	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)								
3059.	TK			1	Analisis dan Standardisasi bidang K3			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3060.	TK			2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3061.	TK			3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3062.	TK		2	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3								
3063.	TK			1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3064.	TK			2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3065.	TK			3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3066.	TK			4	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3067.	TK			5	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	PSM	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
3068.	PSM	1	Pengembangan program dan pembinaan diklat									
3069.	PSM		1	Standarisasi					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3070.	PSM		2	Akreditasi						Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3071.	PSM			1	Institusi Penilai Akreditasi				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3072.	PSM			2	Program/Institusi yang dinilai				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3073.	PSM		3	Kurikulum dan Modul					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3074.	PSM		4	Sistem Informasi					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3075.	PSM		5	Monitoring dan evaluasi					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3076.	PSM		6	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3077.	PSM	2	Pembinaan Widyaiswara									
3078.	PSM		1	Seleksi dan pengembangan								
3079.	PSM			1	Seleksi Widyaiswara 1				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3080.	PSM			2	Pengembangan Widyaiswara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3081.	PSM		2	Sertifikasi Widyaiswara					√	Tk. Eselon		
3082.	PSM		3	Monitoring dan Evaluasi								
3083.	PSM			1	Monitoring Widyaiswara				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3084.	PSM			2	Evaluasi Widyaiswara				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
											urusan
3085.	PSM		4	Penilaian Widyaiswara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3086.	PSM		5	Konsultasi, advokasi dan asistensi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3087.	PSM		6	Sistem Informasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3088.	PSM	3	Penyelenggaraan Diklat								
3089.	PSM		1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3090.	PSM		2	Penyelenggaraan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3091.	PSM		3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3092.	PSM		4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran							
3093.	PSM		1	Pengembangan bahan ajar diklat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3094.	PSM		2	Pengembangan metodologi pembelajaran diklat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3095.	PSM		5	Sistem informasi diklat				√	Staff		Tidak beresiko
3096.	PSM		6	Monitoring dan Evaluasi							
3097.	PSM		1	Penyelenggara				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3098.	PSM		2	Pasca diklat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3099.	PSM		7	Alumni				√	Staff		Tidak beresiko
	PA	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
3100.	PA	1	PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)								
3101.	PA		1	Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan PUG			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
3102.	PA		2	Data Gender			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3103.	PA		3	Sosialisasi Kebijakan PUG				√	Staff	Unit pelaksana urusan
3104.	PA		4	Advokasi Pelaksanaan PUG				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
3105.	PA		5	Fasilitasi dan Koordinasi PUG				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
3106.	PA		6	Monitoring , Evaluasi dan Analisa Kebijakan PUG			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3107.	PA	2	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN							
3108.	PA		1	Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3109.	PA		2	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan				√	Staff	Unit pelaksana urusan
3110.	PA		3	Data Perlindungan Perempuan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3111.	PA		4	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan				√	Staff	Unit pelaksana urusan
3112.	PA		5	Penanganan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus				√	Staff	Unit pelaksana urusan
3113.	PA		6	Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3114.	PA		7	Advokasi Perlindungan Perempuan						
3115.	PA		1	Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
3116.	PA		2	Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
3117.	PA		3	Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
3118.	PA		8	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan							
3119.	PA			1	Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3120.	PA		9	Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3121.	PA		10	Analisis dan penyajian informasi gender				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3122.	PA	3	PERLINDUNGAN ANAK								
3123.	PA		1	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)							
3124.	PA			1	Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak			√	Tk. Eselon		
3125.	PA			2	Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Tumbuh Kembang Anak			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3126.	PA			3	Data Perlindungan Anak			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3127.	PA			4	Data Tumbuh Kembang Anak			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3128.	PA		2	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)							
3129.	PA			1	Sosialisasi Kebijakan PA			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3130.	PA			2	Sosialisasi Kebijakan TKA			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3131.	PA		3	Advokasi Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang							
3132.	PA			1	Advokasi PA			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
3133.	PA			2	Advokasi TKA				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3134.	PA		4		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)							
3135.	PA			1	Fasilitasi dan koordinasi Bidang Perlindungan Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3136.	PA			2	Fasilitasi dan koordinasi Bidang Tumbuh Kembang Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3137.	PA		5		Monitoring dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)							
3138.	PA			1	Monev Bidang Perlindungan Anak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3139.	PA			2	Monev Bidang Tumbuh Kembang Anak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3140.	PA		6		Pemetaan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)							
3141.	PA			1	Pemetaan Perlindungan Anak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3142.	PA			2	Pemetaan Perlindungan Tumbuh Kembang Anak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3143.	PA	4	PARTISIPASI MASYARAKAT									
3144.	PA		1		Penyusunan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat				√			
3145.	PA		2		Sosialisasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3146.	PA		3		Advokasi Bidang Partisipasi Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3147.	PA		4		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Partisipasi Masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3148.	PA		5		Monitoring dan Evaluasi Bidang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
				Partisipasi Masyarakat							urusan
3149.	PA	5		KAJIAN TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
3150.	PA		1	Telaah dan Kajian							
3151.	PA		1	Bidang Pembangunan Keluarga				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3152.	PA		2	Bidang Hubungan Antar Lembaga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3153.	PA		3	Bidang Penanggulangan Kemiskinan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3154.	PA		4	Bidang Komunikasi Pembangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3155.	PA		2	Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan				√	Staff		Tidak beresiko
	DG	URUSAN PERDAGANGAN									
3156.	DG	1		PERDAGANGAN DALAM NEGERI							
3157.	DG		1	Bina Usaha							
3158.	DG		1	Kelembagaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3159.	DG		2	Penguatan usaha			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3160.	DG		3	Jasa Perdagangan berbasis elektronik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3161.	DG		4	Jasa Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3162.	DG		5	Usaha dagang asing				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3163.	DG		6	Keagenan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3164.	DG		7	Informasi Pendaftaran perusahaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3165.	DG			8	Informasi Seksi analisa LKTP				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3166.	DG			9	Pelaku pasar Pengecer			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3167.	DG			10	Pelaku pasar Pemasok			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3168.	DG		2		Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri							
3169.	DG			1	iklim usaha			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3170.	DG			2	bimbingan teknis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3171.	DG			3	fasilitasi usah produktif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3172.	DG			4	fasilitasi usaha dan pemasaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3173.	DG			5	Penelaahan potensi produk dalam rangka pengembangan produk lokal			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3174.	DG			6	Fasilitasi penguatan produk dalam rangka pengembangan potensi produk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3175.	DG			7	kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri pencitraan produk dalam negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3176.	DG			8	peningkatan promosi pencitraan produk dalam negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3177.	DG		3		Logistik dan Sarana Distribusi							
3178.	DG			1	Perencanaan Pengembangan sarana distribusi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3179.	DG			2	Bimbingan teknis Pengembangan sarana distribusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3180.	DG			3	Bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3181.	DG			4	Evaluasi pengelolaan sarana distribusi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3182.	DG			5	kerja sama pengembangan sistem logistik dengan Pemerintah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3183.	DG			6	kerja sama pengembangan sistem logistik dengan lembaga non pemerintah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3184.	DG			7	Informasi logistik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3185.	DG			8	bimbingan teknis penyedia jasa logistik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3186.	DG		4		Bahan Pokok dan Barang Strategis							
3187.	DG			1	Informasi Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3188.	DG			2	Informasi Non Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3189.	DG			3	Hasil Industri berupa gula dan tepung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3190.	DG			4	Hasil industri berupa minyak goreng dan garam				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3191.	DG			5	Barang strategis hasil agro				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3192.	DG			6	Barang strategis hasil industri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3193.	DG			7	Barang pokok agro serelia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3194.	DG			8	Barang pokok agro hewan dan non serelia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3195.	DG	2			STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
3196.	DG		1		Standardisasi							
3197.	DG			1	hubungan kelembagaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3198.	DG			2	informasi standar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3199.	DG			3	kerjasama standarisasi regional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3200.	DG			4	kerjasama standarisasi bilateral dan multilateral				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3201.	DG			5	Penetapan standar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3202.	DG			6	Perumusan Standar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3203.	DG			7	Tata Usaha kepegawaian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3204.	DG			8	Tata usaha keuangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3205.	DG			9	tata usaha perencanaan dan program				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3206.	DG			10	Tata usaha inventaris kantor/BMAN				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3207.	DG		2		Pemberdayaan Konsumen							
3208.	DG			1	kerjasama			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3209.	DG			2	informasi, dan publikasi				√	Staff		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
3210.	DG			3	konsultasi hukum analisa penyelenggara perlindungan konsumen			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3211.	DG			4	analisis penyelenggara perlindungan konsumen			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3212.	DG			5	bimbingan konsumen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3213.	DG			6	bimbingan pelaku usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3214.	DG			7	fasilitas pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3215.	DG			8	fasilitas pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3216.	DG		4		Pengawasan Barang Beredar dan Jasa							
3217.	DG			1	produk pertambangan dan olahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3218.	DG			2	produk aneka industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3219.	DG			3	produk pertanian dan kehutanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3220.	DG			4	produk kimia dan olahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3221.	DG			5	jasa distribusi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3222.	DG			6	jasa bisnis			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3223.	DG			7	kerjasama lembaga pemerintah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3224.	DG			8	kerjasama lembaga non			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					pemerintah						urusan	
3225.	DG		5		Metrologi							
3226.	DG			1	Sarana metrologi legal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3227.	DG			2	Kerjasama metrologi legal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3228.	DG			3	Kelembagaan metrologi legal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3229.	DG			4	Penilaian metrologi legal			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3230.	DG			5	Bsaran massa, listrik, tekanan dan suhu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3231.	DG			6	Besaran arus, panjang dan volume				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3232.	DG			7	Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3233.	DG			8	Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3234.	DG			9	Bimbingan Mutu Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3235.	DG			10	Pelayanan Teknis Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3236.	DG			11	Bimbingan Mutu Balai Pengujian UTTP				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3237.	DG			12	Pelayanan Teknis Balai Pengujian UTTP				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3238.	DG			13	Bimbingan Kemetrologian Bali SML Regional 1 Medan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3239.	DG			14	Pelayanan Kemetrolgian Bali SML Regional 1 Medan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3240.	DG			15	Bimbingan Kemetrolgian Bali SML Regional 1 Jogjakarta				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3241.	DG			16	Pelayanan Kemetrolgian Bali SML Regional 1 Jogjakarta				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3242.	DG			17	Bimbingan Kemetrolgian Bali SML Regional 1 Makassar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3243.	DG			18	Pelayanan Kemetrolgian Bali SML Regional 1 Makassar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3244.	DG	3			PERDAGANGAN LUAR NEGERI							
3245.	DG		1		Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan							
3246.	DG			1	Ekspor produk tanaman pangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3247.	DG			2	Ekspor produk perikanan, dan peternakan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3248.	DG			3	Tanaman Perkebunan Tahunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3249.	DG			4	Tanaman Perkebunan Musiman			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3250.	DG			5	Hortikultura			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3251.	DG			6	Rempah-rempah dan tanaman obat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3252.	DG			7	Hasil hutan berupa kayu dan produk kayu			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3253.	DG			8	Hasil hutan bukan kayu			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3254.	DG		2		Ekspor Produk Industri dan Pertambangan							
3255.	DG			1	Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3256.	DG			2	Produk Aneka dan jasa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3257.	DG			3	Produk Logam dan mesin				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3258.	DG			4	Produk alat transportasi dan elektronika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3259.	DG			5	Produk industri agro				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3260.	DG			6	Produk kimia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3261.	DG			7	Produk migas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3262.	DG			8	Produk pertambangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3263.	DG		3		Impor							
3264.	DG			1	Impor Barang Modal Mesin dan peralatan mesin				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3265.	DG			2	Impor Barang Modal alat angkut				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3266.	DG			3	Barang pertanian dan kehutanan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3267.	DG			4	Barang kelautan, dan perikanan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3268.	DG			5	Barang aneka industri				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3269.	DG			6	Barang bahan baku industri				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3270.	DG			7	Barang konsumsi tahan lama				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3271.	DG			8	Barang konsumsi tidak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					tahan lama						urusan
3272.	DG			9	Barang kimia dan bahan berbahaya			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3273.	DG			10	Barang tambang dan limbah			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3274.	DG		4		Fasilitasi Ekspor dan Impor					Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3275.	DG			1	Kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3276.	DG			2	Pembiayaan perdagangan dalam kerjasama internasional			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3277.	DG			3	Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3278.	DG			4	Prosedur ekspor dan impor			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3279.	DG			5	Dokumen ekspor dan impor			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3280.	DG			6	Sarana dan prasarana Penunjang Perdagangan Internasional			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3281.	DG			7	Regulasi Penunjang Perdagangan Internasional				√	Staff	Unit pelaksana urusan
3282.	DG			8	Analisa pelayanan perdagangan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3283.	DG			9	Fasilitasi pelayanan perdagangan				√	Staff	Unit pelaksana urusan
3284.	DG		5		Pengamanan Perdagangan						
3285.	DG			1	Monitoring Hambatan Perdagangan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3286.	DG			2	Evaluasi Monitoring Hambatan Perdagangan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
3287.	DG			3	Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3288.	DG			4	Penanganan Tuduhan Dumping			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3289.	DG			5	Penanganan Tuduhan Subsidi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3290.	DG			6	Penanganan Tuduhan Safeguard			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3291.	DG	4			KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL							
3292.	DG		1		Multilateral							
3293.	DG			1	Tarif barang pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3294.	DG			2	Non Tarif barang pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3295.	DG			3	Tarif barang non pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3296.	DG			4	Non Tarif barang non pertanian				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3297.	DG			5	Akses pasar barang non pertanian			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3298.	DG			6	Aturan perdagangan				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3299.	DG			7	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan investasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3300.	DG			8	Lingkungan dan isu baru				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3301.	DG			9	Tinjauan Ketentuan perdagangan				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3302.	DG			10	Notifikasi							
3303.	DG		2		ASEAN							
3304.	DG			1	Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3305.	DG			2	Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3306.	DG			3	Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3307.	DG			4	Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3308.	DG			5	ASEAN mitra dialog				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3309.	DG			6	Kerjasama antar dan sub regional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3310.	DG		3		APEC dan Organisasi Internasional Lainnya							
3311.	DG			1	Akses perdagangan Barang APEC			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3312.	DG			2	Akses investasi APEC			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3313.	DG			3	Fasilitasi perdagangan APEC				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3314.	DG			4	Fasilitasi investasi APEC				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3315.	DG			5	Badan-badan PBB dan Non PBB			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3316.	DG			6	Organisasi komoditi internasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3317.	DG		4		Bilateral							
3318.	DG			1	Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3319.	DG		5		Perundingan Perdagangan Jasa					Staff		Unit pelaksana urusan
3320.	DG			1	Jasa bisnis dan distribusi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3321.	DG			2	Jasa keuangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3322.	DG			3	Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3323.	DG			4	Jasa transportasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3324.	DG			5	Jasa pendidikan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3325.	DG			6	Jasa kesehatan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3326.	DG			7	Jasa komunikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3327.	DG			8	Jasa lingkungan dan jasa lainnya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3328.	DG			9	Rules dan peraturan domestik			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3329.	DG			10	Penyusunan analisis informasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3330.	DG	5			PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL							
3331.	DG		1		Pasar dan Informasi Ekspor							
3332.	DG			1	Pengembangan pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3333.	DG			2	Pengelolaan data pada sistem informasi ekspor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3334.	DG			3	Pengembangan sistem informasi ekspor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3335.	DG			4	Pelayanan pelaku usaha ekspor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3336.	DG			5	Publikasi informasi ekspor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3337.	DG		2		Produk ekspor dan ekonomi kreatif							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3338.	DG			1	Hasil industri manufaktur berupa Mesin, logam, elektronika dan telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3339.	DG			2	Hasil industri manufaktur berupa Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3340.	DG			3	Produk agro berupa kehutanan dan perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3341.	DG			4	Produk agro berupa pertanian dan perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3342.	DG			5	Jasa bisnis dan profesi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3343.	DG			6	jasa konstruksi dan distribusi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3344.	DG			7	media dan iptek Ekonomi kreatif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3345.	DG			8	seni budaya dan desain ekonomi kreatif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3346.	DG		3		Kerja Sama Pengembangan Ekspor							
3347.	DG			1	Pemerintah luar negeri				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3348.	DG			2	Non pemerintah luar negeri				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3349.	DG			3	Pemerintah dalam negeri				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3350.	DG			4	Non pemerintah dalam negeri				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3351.	DG		4		Promosi dan Citra							
3352.	DG			1	promosi				√			
3353.	DG			2	Perencanaan citra				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3354.	DG			3	Pemantauan dan evaluasi				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					citra							urusan
3355.	DG			4	Penerapan citra dalam dan luar negeri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3356.	DG	6			PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI							
3357.	DG		1		Perniagaan							
3358.	DG			1	Bina Usaha kelembagaan dan pelaku penunjang				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3359.	DG			2	Bina Usaha pelaku pasar				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3360.	DG			3	Pengawasan Transaksi kelembagaab dan pelaku penunjang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3361.	DG			4	Pengawasan Transaksi pelaku pasar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3362.	DG			5	Pemantauan dan evaluasi keuangan dalam rangka Pengawasan keuangan dan audit			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3363.	DG			6	audit kepatuhan dan keuangan dalam rangka Pengawasan keuangan dan audit		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3364.	DG		2		Analisis Pasar							
3365.	DG			1	Pengkajian pasar fisik dan penyerahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3366.	DG			2	Posisi dan pelaporan pengkajian pasar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3367.	DG			3	Kelembagaan dan produk Pengembangan pasar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3368.	DG			4	Tata tertib dan kontrak pengembangan pasar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3369.	DG			5	Teknologi Informasi pada Sistem informasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3370.	DG			6	Data pada Sistem Informasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3371.	DG		3		Pasar Fisik dan Jasa							
3372.	DG			1	Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3373.	DG			2	Pembinaan pelaku sistem resi gudang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3374.	DG			3	Pengawasan transaksi pasar lelang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3375.	DG			4	Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3376.	DG			5	Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi pada sistem resi gudang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3377.	DG			6	Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual pada sistem resi gudang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3378.	DG	7			BIMBINGAN TEKNIS				√			
3379.	DG	8			EVALUASI			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
	BP	BINA PEMBANGUNAN										
3380.	BP	1			PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL							
3381.	BP		1		Musyawah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang							
3382.	BP			1	Musrenbang nasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3383.	BP			2	Musrenbang provinsi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3384.	BP		2		Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga							
3385.	BP			1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra-			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					KL							
3386.	BP			2	Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (Renja-KL)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3387.	BP			3	Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3388.	BP			4	Program kerja tahunan Unit Kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3389.	BP			5	Program Kerja Tahunan Lembaga			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3390.	BP			6	Penetapan/Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3391.	BP			7	Penetapan/Kontrak Kinerja Ketua/Menteri/Kepala Lembaga Negara da Badan Pemerintah/Instansi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3392.	BP		3		Laporan							
3393.	BP			1	Laporan Triwulan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3394.	BP			2	Laporan Semesteran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3395.	BP			3	Laporan Tahunan Unit Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3396.	BP			4	Laporan Tahunan Lembaga/Instansi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3397.	BP			5	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3398.	BP			6	Laporan Insidental				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3399.	BP		4		Evaluasi Program							
3400.	BP			1	Unit Kerja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3401.	BP			2	Lembaga/Instansi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
3402.	BP		5		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3403.	BP		6		Konsultasi perencanaan pembangunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3404.	BP		7		Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3405.	BP		8		Aksi Strategis Nasional							
3406.	BP			1	Rancangan awal perencanaan aksi strategis nasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3407.	BP			2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3408.	BP			3	Sosialisasi dengan K/L				√			
3409.	BP			4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategis nasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3410.	BP			5	Penetapan perencanaan aksi strategis nasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3411.	BP		9		Perencanaan Pendanaan Pembangunan							
3412.	BP			1	Pendanaan Luar Negeri dan Hibah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3413.	BP			2	Pendanaan Dalam Negeri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3414.	BP			3	Kerjasama Pembangunan Internasional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3415.	BP			4	Surat Berharga Syariah Negara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3416.	BP			5	Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
	PI	URUSAN PERINDUSTRIAN										

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
3417.	PI	1	Iklim Usaha Dan Kerjasama									
3418.	PI		1	Industri Manufaktur								
3419.	PI			1	Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)			√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan		
3420.	PI			2	Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)			√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan		
3421.	PI			3	Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)			√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan		
3422.	PI			4	Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka)			√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan		
3423.	PI		2	Industri Agro								
3424.	PI			1	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3425.	PI			2	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3426.	PI			3	Industri Minuman Dan Tembakau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3427.	PI		3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi						Staff		
3428.	PI			1	Alat Transportasi Darat					√		
3429.	PI			2	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3430.	PI			3	Elektronika Dan Telematika				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3431.	PI			4	Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian				√	Staff		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
3432.	PI		4	Industri Kecil Dan Menengah								
3433.	PI			1	Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3434.	PI			2	Industri Kerajinan Dan Sandang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3435.	PI			3	Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3436.	PI	2	Promosi Industri									
3437.	PI		1	Industri Manufaktur								
3438.	PI			1	Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3439.	PI			2	Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3440.	PI			3	Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3441.	PI			4	Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3442.	PI		2	Industri Agro								
3443.	PI			1	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3444.	PI			2	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3445.	PI			3	Industri Minuman Dan Tembakau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3446.	PI		3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi								
3447.	PI			1	Alat Transportasi Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3448.	PI			2	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3449.	PI			3	Industri Elektronika Dan Telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3450.	PI			4	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3451.	PI		4	Industri Kecil Dan Menengah								
3452.	PI			1	Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3453.	PI			2	Industri Kerajinan Dan Sandang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3454.	PI			3	Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3455.	PI	3	Standarisasi Dan Teknologi									
3456.	PI		1	Industri Manufaktur								
3457.	PI			1	Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3458.	PI			2	Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3459.	PI			3	Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3460.	PI			4	Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3461.	PI		2	Industri Agro								
3462.	PI			1	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3463.	PI			2	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3464.	PI			3	Industri Minuman Dan Tembakau				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3465.	PI		3		Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi							
3466.	PI			1	Alat Transportasi Darat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3467.	PI			2	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3468.	PI			3	Elektronika Dan Telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3469.	PI			4	Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3470.	PI		4		Industri Kecil Dan Menengah							
3471.	PI			1	Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3472.	PI			2	Industri Kerajinan Dan Sandang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3473.	PI			3	Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3474.	PI	4	Hak dan Kekayaan Intelektual									
3475.	PI		1	Industri Manufaktur								
3476.	PI			1	Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3477.	PI			2	Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3478.	PI			3	Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3479.	PI			4	Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3480.	PI		2		Industri Agro							
3481.	PI			1	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3482.	PI			2	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3483.	PI			3	Industri Minuman Dan Tembakau			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3484.	PI		3		Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi							
3485.	PI			1	Alat Transportasi Darat			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3486.	PI			2	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3487.	PI			3	Elektronika Dan Telematika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3488.	PI			4	Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3489.	PI		4		Industri Kecil Dan Menengah							
3490.	PI			1	Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3491.	PI			2	Industri Kerajinan Dan Sandang			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3492.	PI			3	Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3493.	PI	5			Industri Hijau							
3494.	PI		1		Industri Manufaktur							
3495.	PI			1	Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Besi, dan Logam Lainnya)							
3496.	PI			2	Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3497.	PI			3	Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3498.	PI			4	Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3499.	PI		2	Industri Agro								
3500.	PI			1	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan							
3501.	PI			2	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan							
3502.	PI			3	Industri Minuman Dan Tembakau							
3503.	PI		3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi								
3504.	PI			1	Alat Transportasi Darat				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3505.	PI			2	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3506.	PI			3	Elektronika Dan Telematika				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3507.	PI			4	Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3508.	PI		4	Industri Kecil Dan Menengah								
3509.	PI			1	Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3510.	PI			2	Industri Kerajinan Dan Sandang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3511.	PI			3	Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3512.	PI	5	Analisis Industri Unggulan Provinsi									
3513.	PI		1	Kerjasama Industri Unggulan Provinsi								
3514.	PI			1	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3515.	PI			2	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri II			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3516.	PI			3	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri III			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3517.	PI	6	Monitoring Dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi Dan Kab/Kota)									
3518.	PI		1	Kerjasama Industri Unggulan Provinsi								
3519.	PI			1	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3520.	PI			2	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri II			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3521.	PI			3	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri III			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3522.	PI		2	Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota								
3523.	PI			1	Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri I			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3524.	PI			2	Kerja sama Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri II							urusan
3525.	PI			3	Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri III			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3526.	PI	7	Pengembangan Infrastruktur Pendukung									
3527.	PI		1		Kawasan Industri Wilayah Industri I			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3528.	PI		2		Kawasan Industri Wilayah Industri II			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3529.	PI		3		Kawasan Industri Wilayah Industri III			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3530.	PI	8	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri									
3531.	PI		1		Kawasan Industri Wilayah Industri I			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3532.	PI		2		Kawasan Industri Wilayah Industri II			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3533.	PI		3		Kawasan Industri Wilayah Industri III			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3534.	PI	9	Kerja sama Industri Internasional									
3535.	PI		1	Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, Dan Fora Multilatera								
3536.	PI			1	Akses Industri Wilayah Amerika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3537.	PI			2	Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3538.	PI			3	Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3539.	PI			4	Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timus Tengah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3540.	PI			5	Kerjasama Multilateral dengan WTO dan Organisasi Komoditas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3541.	PI			6	Fora Multilateral Lainnya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3542.	PI		2		Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, Dan							
3543.	PI			1	Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3544.	PI			2	Akses Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3545.	PI			3	Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3546.	PI			4	Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3547.	PI			5	Kerjasama Regional APEC dan Regional Lainnya			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3548.	PI			6	Kerjasama Regional ASEAN dan Mitra Dialog			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3549.	PI		3		Ketahanan Industri							
3550.	PI			1	Penanganan Hambatan Industri Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3551.	PI			2	Penanganan Hambatan Industri Wilayah I I(Asia Timur, Asia Barat, Asia			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Multilateral)							
3552.	PI			3	Pengamanan Basis Industri Manufaktur			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3553.	PI			4	Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3554.	PI			5	Pengamanan Industri Agro			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3555.	PI			6	Pengamanan Industri Kecil dan Menengah			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3556.	PI	10	Standarisasi									
3557.	PI		1	Standar								
3558.	PI			1	Standar Industri Manufaktur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3559.	PI			2	Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3560.	PI		2	Penyiapan Penerapan								
3561.	PI			1	Penyiapan Penerapan Standar			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3562.	PI			2	Kerja sama Standarisasi			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3563.	PI		3	Infrastruktur Standar								
3564.	PI			1	Pengembangan Infrastruktur Standar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3565.	PI			2	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3566.	PI	11	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri									
3567.	PI		1	Kebijakan Industri			√	Tk. Eselon			Unit pelaksana urusan	
3568.	PI			1	Kebijakan Sektoral			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
3569.	PI			2	Kebijakan Kewilayahan							
3570.	PI		2	Perpajakan dan Tarif								
3571.	PI			1	Perpajakan dan Tarif				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3572.	PI			2	Tarif dan Non Tarif				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3573.	PI		3	Pengembangan Model Industrial								
3574.	PI			1	Pemrograman Model				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3575.	PI			2	Aplikasi Model				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3576.	PI	12	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup									
3577.	PI		1	Industri Hijau								
3578.	PI			1	Pengembangan Industri Hijau				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3579.	PI			2	Kerja Sama Industri Hijau				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3580.	PI		2	Lingkungan Hidup								
3581.	PI			1	Lingkungan Global				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3582.	PI			2	Pengendalian Lingkungan Hidup				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3583.	PI		3	Energi								
3584.	PI			1	Konservasi Energi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3585.	PI			2	Diversifikasi Energi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3586.	PI	13	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual									
3587.	PI		1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri								
3588.	PI			1	Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri				√	Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3589.	PI			2	Penerapan Kebijakan Teknologi Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3590.	PI		2		Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri							
3591.	PI			1	Pengkajian Inovasi Teknologi Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3592.	PI			2	Penerapan Inovasi Teknologi Industri			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3593.	PI		3		Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual							
3594.	PI			1	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3595.	PI			2	Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3596.	PT	URUSAN PERTANIAN										
3597.	PT	1	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									
3598.	PT		1	Perbibitan Ternak								
3599.	PT			1	Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3600.	PT			2	Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3601.	PT			3	Produksi Bibit Ternak Unggas				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3602.	PT			4	Produksi Bibit Aneka Ternak				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3603.	PT			5	Penilaian Bibit ternak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3604.	PT			6	Pelepasan Bibit ternak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3605.	PT			7	Sertifikasi Bibit Ternak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3606.	PT			8	Pengawasan Mutu Bibit Ternak			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
3607.	PT			9	Analisis Pengembangan Bibit Ternak			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3608.	PT			10	Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak				√			
3609.	PT			11	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3610.	PT		2	Pakan Ternak								
3611.	PT			1	Bahan Pakan Asal Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3612.	PT			2	Bahan Pakan Asal Tumbuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3613.	PT			3	Budidaya Pakan Hijauan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3614.	PT			4	Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3615.	PT			5	Produksi Pakan Olahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3616.	PT			6	Pengolahan Pakan Olahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3617.	PT			7	Sertifikasi Pakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3618.	PT			8	Pengawasan Pakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3619.	PT			9	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3620.	PT		3	Budidaya Ternak								
3621.	PT			1	Ternak Sapi dan Kerbau Potong				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3622.	PT			2	Ternak Kambing dan Domba Potong				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3623.	PT			3	Ternak Sapi dan Kerbau Perah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3624.	PT			4	Ternak Kambing Perah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3625.	PT			5	Ternak Unggas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3626.	PT			6	Aneka Ternak dan Monogastrik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3627.	PT			7	Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3628.	PT			8	Sarjana Membangun Desa (SMD)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3629.	PT		4	Kesehatan Hewan								
3630.	PT			1	Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner				√			
3631.	PT			2	Penyidikan Penyakit Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3632.	PT			3	Pencegahan Penyakit Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3633.	PT			4	Pemberantasan Penyakit Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3634.	PT			5	Perlindungan Hewan dengan Analisis Risiko Penyakit Ekstotik			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3635.	PT			6	Perlindungan Hewan dengan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3636.	PT			7	Kelembagaan Kesehatan Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3637.	PT			8	Sumber Daya Kesehatan Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3638.	PT			9	Laporan THL				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3639.	PT			10	Proposal Poskeswan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3640.	PT			11	Mutu Obat Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
3641.	PT			12	Peredaran Obat Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3642.	PT			13	Pendaftaran Obat Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3643.	PT			14	Rekomendasi Obat Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3644.	PT		5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen								
3645.	PT			1	Teknologi Pascapanen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3646.	PT			2	Sarana Pascapanen				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3647.	PT			3	Penerapan Higiene Sanitasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3648.	PT			4	Inspeksi Higiene Sanitasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3649.	PT			5	Pengawasan Sanitary			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3650.	PT			6	Pengawasan Keamanan Produk Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3651.	PT			7	Zoonosis			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3652.	PT			8	Kesejahteraan Hewan				√			
3653.	PT			9	Pengujian Produk Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3654.	PT			10	Sertifikasi Produk Hewan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3655.	PT			11	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3656.	PT	2	PERKEBUNAN									
3657.	PT		1	Tanaman Semusim								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
3658.	PT			1	Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3659.	PT			2	Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3660.	PT			3	Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3661.	PT			4	Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3662.	PT			5	Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3663.	PT			6	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3664.	PT			7	Pemberdayaan Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3665.	PT			8	Kelembagaan Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3666.	PT		2	Tanaman Rempah & Penyegar								
3667.	PT			1	Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3668.	PT			2	Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3669.	PT			3	Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3670.	PT			4	Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Rempah & Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3671.	PT			5	Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3672.	PT			6	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					& Penyegar						
3673.	PT			7	Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3674.	PT			8	Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3675.	PT		3	Tanaman Tahunan							
3676.	PT			1	Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3677.	PT			2	Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3678.	PT			3	Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3679.	PT			4	Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3680.	PT			5	Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3681.	PT			6	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3682.	PT			7	Pemberdayaan Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3683.	PT			8	Kelembagaan Tanaman Tahunan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3684.	PT		4	Perlindungan Perkebunan							
3685.	PT			1	Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3686.	PT			2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3687.	PT			3	Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3688.	PT			4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3689.	PT			5	Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3690.	PT			6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3691.	PT			7	Dampak Perubahan Iklim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3692.	PT			8	Pencegahan Kebakaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3693.	PT		5	Pascapanen dan Pembinaan Usaha								
3694.	PT			1	Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3695.	PT			2	Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3696.	PT			3	Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3697.	PT			4	Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3698.	PT			5	Bimbingan Usaha Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3699.	PT			6	Bimbingan Perkebunan Berkelanjutan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3700.	PT			7	Gangguan Usaha			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3701.	PT			8	Penanganan Konflik			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
3702.	PT	3	HORTIKULTURA								
3703.	PT		1	Perlindungan hortikultura							
3704.	PT			1	Teknologi Perlindungan Tanaman Buah			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3705.	PT			2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3706.	PT			3	Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3707.	PT			4	Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3708.	PT			5	Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3709.	PT			6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3710.	PT			7	Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3711.	PT			8	Informasi dan Persyaratan Teknis			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3712.	PT		2	Perbenihan Hortikultura							
3713.	PT			1	Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3714.	PT			2	Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3715.	PT			3	Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3716.	PT			4	Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3717.	PT			5	Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3718.	PT			6	Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3719.	PT			7	Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3720.	PT			8	Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3721.	PT			9	Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3722.	PT	4	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN									
3723.	PT		1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan								
3724.	PT			1	Identifikasi Lahan untuk Basis Data Lahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3725.	PT			2	Analisis dan Penyajian Data Lahan				√			
3726.	PT			3	Identifikasi dan Analisis Pengenadalian Lahan				√			
3727.	PT			4	Rekomendasi Teknis pengendalian lahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3728.	PT			5	Identifikasi dan Analisis				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.							urusan
3729.	PT			6	Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3730.	PT			7	Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3731.	PT			8	Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3732.	PT			9	Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3733.	PT			10	Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3734.	PT		2	Pengelolaan Air Irigasi								
3735.	PT			1	Pengembangan Sumber Air Permukaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3736.	PT			2	Pengembangan Sumber Air Tanah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3737.	PT			3	Pengembangan Jaringan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3738.	PT			4	Optimasi Air				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3739.	PT			5	Iklim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3740.	PT			6	Konservasi Air dan Lingkungan Hidup				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3741.	PT			7	Identifikasi Kelembagaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3742.	PT			8	Pengembangan Kelembagaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3743.	PT		3		Pembiayaan Pertanian							
3744.	PT			1	Data dan Informasi pembiayaan program				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3745.	PT			2	Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3746.	PT			3	Pembiayaan Syariah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3747.	PT			4	Kerja Sama Pembiayaan Syariah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3748.	PT			5	Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3749.	PT			6	Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3750.	PT			7	Kelembagaan Agribisnis				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3751.	PT			8	Pemberdayaan Agribisnis				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3752.	PT		4		Pupuk Pestisida							
3753.	PT			1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah Tanaman Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3754.	PT			2	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah Hortikultura dan Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3755.	PT			3	Pupuk Anorganik Tanaman Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3756.	PT			4	Pupuk Anorganik Hortikultura dan Perkebunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3757.	PT			5	Pestisida Kimia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
3758.	PT			6	Pestisida Hayati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3759.	PT			7	Pengawasan Pupuk				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3760.	PT			8	Pengawasan Pestisida				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3761.	PT		5	Alat dan Mesin Pertanian								
3762.	PT			1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3763.	PT			2	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3764.	PT			3	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3765.	PT			4	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3766.	PT			5	Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3767.	PT			6	Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3768.	PT	5	TANAMAN PANGAN									
3769.	PT		1	Perbenihan Tanaman Pangan								
3770.	PT			1	Penilaian Varietas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3771.	PT			2	Pengawasan Mutu Benih				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3772.	PT			3	Produksi Benih Serealia Padi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3773.	PT			4	Produksi Benih Serelia Non Padi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3774.	PT			5	Produksi Benih Aneka Kacang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3775.	PT			6	Produksi Benih Umbi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3776.	PT			7	Kelembagaan Produksi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3777.	PT			8	Kelembagaan Pengawasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3778.	PT		2	Budidaya Serealia								
3779.	PT			1	Padi Irigasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3780.	PT			2	Padi Rawa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3781.	PT			3	Padi Tadah Hujan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3782.	PT			4	Padi Tadah Lahan Kering				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3783.	PT			5	Intensifikasi Jagung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3784.	PT			6	Pengembangan Jagung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3785.	PT			7	Intensifikasi Serealia Lain				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3786.	PT			8	Pengembangan Serealia Lain				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3787.	PT		3	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi								
3788.	PT			1	Intensifikasi Kedelai				√	Staff		Unit pelaksana urusan
3789.	PT			2	Pengembangan Kedelai				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3790.	PT			3	Intensifikasi Ubi Kayu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
3791.	PT			4	Pengembangan Ubi Kayu				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3792.	PT			5	Intensifikasi Aneka Kacang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3793.	PT			6	Pengembangan Aneka Kacang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3794.	PT			7	Intensifikasi Aneka Umbi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3795.	PT			8	Pengembangan Aneka Umbi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3796.	PT		4	Perlindungan Tanaman Pangan								
3797.	PT			1	Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3798.	PT			2	Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3799.	PT			3	Adaptasi Dampak Perubahan Iklim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3800.	PT			4	Mitigasi dampak perubahan iklim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3801.	PT			5	Identifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3802.	PT			6	Verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3803.	PT			7	Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3804.	PT			8	Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3805.	PT		5	Pascapanen Tanaman Pangan								
3806.	PT			1	Teknologi pascapanen padi.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3807.	PT			2	Sarana pascapanen padi.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3808.	PT			3	Teknologi pascapanen jagung dan serealialia lain.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3809.	PT			4	Sarana pascapanen jagung dan serealialia lain.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3810.	PT			5	Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3811.	PT			6	Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3812.	PT			7	Teknologi pascapanen aneka umbi.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3813.	PT			8	Sarana pascapanen aneka umbi.				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3814.	PT	6	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN									
3815.	PT		1	Pengolahan Hasil Pertanian								
3816.	PT			1	Tanaman Pangan Serelia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3817.	PT			2	Tanaman Pangan Aneka Kacang dan Aneka Umbi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3818.	PT			3	Tanaman Buah dan Sayuran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3819.	PT			4	Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3820.	PT			5	Tanaman Perkebunan Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3821.	PT			6	Tanaman Perkebunan Tahunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3822.	PT			7	Peternakan Ruminansia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3823.	PT			8	Peternakan Non Ruminansia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3824.	PT		2	Mutu dan Standarasi								
3825.	PT			1	Standardisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3826.	PT			2	Standardisasi Perkebunan dan Peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3827.	PT			3	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3828.	PT			4	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Perkebunan dan Peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3829.	PT			5	Akreditasi dan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3830.	PT			6	Akreditasi dan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3831.	PT			7	Kerjasama dan Harmonisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3832.	PT			8	Kerjasama dan Harmonisasi Perkebunan dan Peternakan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3833.	PT		3	Pengembangan Usaha dan Investasi								
3834.	PT			1	Kemitraan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3835.	PT			2	Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3836.	PT			3	Investasi Tanaman Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					dan Hortikultura						urusan	
3837.	PT			4	Investasi Perkebunan dan Peternakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3838.	PT			5	Daya Saing Promosi Dalam Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3839.	PT			6	Eksibisi dan Ekspo Promosi Dalam Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3840.	PT			7	Daya Saing Promosi Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3841.	PT			8	Eksibisi dan Ekspo Promosi Luar Negeri				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3842.	PT		4	Pemasaran Domestik								
3843.	PT			1	Analisis Informasi Pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3844.	PT			2	Deseminasi Informasi Pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3845.	PT			3	Pemantauan Pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3846.	PT			4	Stabilisasi Harga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3847.				5	Sarana Pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3848.	PT			6	Kelembagaan Pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3849.	PT			7	Akses Pasar untuk Jaringan Pemasaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3850.	PT			8	Sarana Pemasaran untuk Jaringan Pemasaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3851.	PT		5	Pemasaran Internasional								
3852.	PT			1	Analisis Ekspor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3853.	PT			2	Pengembangan Ekspor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3854.	PT			3	Pemasaran Bilateral				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3855.	PT			4	Pemasaran Regional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3856.	PT			5	Pemasaran Multilateral				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3857.	PT			6	Kerjasama Komoditi Regional			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3858.	PT			7	Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral			√		Tk. Eselon		
3859.	PT	7	PENELITIAN , PENGKAJIAN ,DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN									
3860.	PT		1	Administrasi								
3861.	PT			1	Rencana Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3862.	PT			2	TOR/ Proposal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3863.	PT			3	Pembentukan Tim Kerja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3864.	PT			4	Surat menyurat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3865.	PT		2	Hasil Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan								
3866.	PT			1	Hasil Penelitian dan Pengembangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3867.	PT			2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3868.	PT		3	Diseminasi					√	Staff	Tidak beresiko	
3869.	PT		4	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian						Staff	Tidak beresiko	
3870.	PT			1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop				S t a f		Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
									f			
3871.	PT			2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya				S t a f f		Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3872.	PT		5		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				√	Staff	Tidak beresiko	
3873.	PT		6		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan				√	Staff	Tidak beresiko	
3874.	PT		7		Data Penelitian dan Pengembangan			√		Tk. Eselon		
3875.	PT		8		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan				√	Staff		
3876.	PT	8	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)									
3877.	PT			1	Hak Cipta				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3878.	PT			2	Hak Paten Sederhana				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3879.	PT			3	Hak Paten Biasa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3880.	PT			4	Hak Merek				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3881.	PT			5	Pendaftaran Varietas Tanaman				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3882.	PT			6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3883.	PT			7	Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3884.	PT			8	Permohonan HKI yang ditolak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3885.	PT		9		Forum Komunikasi Penelitian dan				√	Staff		Tidak beresiko

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
				SR	R	T	B					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
				Pengembangan								
3886.	PT		10	Data Penelitian dan Pengembangan				√	Staff	Tidak beresiko		
3887.	PT	9	KETAHANAN PANGAN									
3888.	PT		1	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan								
3889.	PT			1	Analisis Ketersediaan Pangan			√		Unit pelaksana urusan		
3890.	PT			2	Sumberdaya Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3891.	PT			3	Analisis Akses Pangan			√			Unit pelaksana urusan	
3892.	PT			4	Pengembangan Akses Pangan				√		Unit pelaksana urusan	
3893.	PT			5	Analisis Kerawanan Pangan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3894.	PT			6	Penanggulangan Kerawanan Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3895.	PT		2	Distribusi dan Cadangan Pangan								
3896.	PT			1	Analisis Distribusi Pangan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3897.	PT			2	Kelembagaan Distribusi Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3898.	PT			3	Analisis Harga Pangan Produsen			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3899.	PT			4	Analisis Harga Pangan Konsumen			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3900.	PT			5	Cadangan Pangan Pemerintah			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3901.	PT			6	Cadangan Pangan Masyarakat			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
3902.	PT		3	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3903.	PT			1	Pola Konsumsi Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3904.	PT			2	Kebutuhan Konsumsi Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3905.	PT			3	Pengembangan Pangan Lokal				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3906.	PT			4	Promosi Penganekaragaman Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3907.	PT			5	Pengawasan Keamanan Pangan Segar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3908.	PT			6	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3909.	PT		4	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan								
3910.	PT			1	Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3911.	PT			2	Dewan Ketahanan Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3912.	PT			3	SOLID				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3913.	PT			4	Penghargaan Ketahan Pangan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3914.	PT	10	KARANTINA PERTANIAN									
3915.	PT		1	Data karantina Hewan								
3916.	PT			1	Data Penyakit Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3917.	PT			2	Teknik dan Metode				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3918.	PT			3	Data Kualitatif dan Kuantitatif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3919.	PT			4	Data Sarana/Laboratorium/Lokasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3920.	PT			5	Laporan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH			
					SR	R	T	B						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10			
											urusan			
3921.	PT		2	Data Karantina Tumbuhan										
3922.	PT			1	Data Penyakit Tumbuhan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan	
3923.	PT			2	Teknik dan Metode						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3924.	PT			3	Data Kualitatif dan Kuantitatif						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3925.	PT			4	Data Sarana/Laboratorium/Lokasi						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3926.	PT			5	Laporan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3927.	PT		3	Inventarisasi Penyakit Hewan										
3928.	PT			1	Survei						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3929.	PT			2	Determinasi Penyakit/Daerah Pencar						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3930.	PT			3	pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3931.	PT		4	Inventarisasi Penyakit Tumbuhan										
3932.	PT			1	Survei						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3933.	PT			2	Determinasi Penyakit/Daerah Pencar						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3934.	PT			3	pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3935.	PT		5	Tindakan Karantina Hewan										
3936.	PT			1	Pemeriksaan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3937.	PT			2	Pengasingan						√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
3938.	PT			3	Pengamatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3939.	PT			4	Perlakuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3940.	PT			5	Penahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3941.	PT			6	Penolakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3942.	PT			7	Pemusnahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3943.	PT			8	Pembebasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3944.	PT		6	Tindakan Karantina Tumbuhan								
3945.	PT			1	Pemeriksaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3946.	PT			2	Pengasingan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3947.	PT			3	Pengamatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3948.	PT			4	Perlakuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3949.	PT			5	Penahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3950.	PT			6	Penolakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3951.	PT			7	Pemusnahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3952.	PT			8	Pembebasan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3953.	PT		7	Sertifikasi Pelepasan Karantina								
3954.	PT			1	Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
3955.	PT			2	Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3956.	PT		8	Pemberantasan Penyakit Hewan								
3957.	PT			1	Penutupan Satu Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3958.	PT			2	Pembatasan Gerak HPHK			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3959.	PT			3	Pembinaan HPHK			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3960.	PT		9	Pemberantasan Penyakit Tumbuhan								
3961.	PT			1	Penutupan Satu Daerah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3962.	PT			2	Pembatasan Gerak OPHK			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3963.	PT			3	Pembinaan OPHK			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3964.	PT		10	Keamanan Pangan								
3965.	PT			1	Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3966.	PT			2	Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3967.	PT		11	Tertib Operasional Karantina Hewan								
3968.	PT			1	Penelitian Data Laporan Operasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3969.	PT			2	Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3970.	PT		12	Tertib Operasional Karantina Tumbuhan								
3971.	PT			1	Penelitian Data Laporan Operasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
3972.	PT			2	Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3973.	PT	11	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN								
3974.	PT		1	Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman							
3975.	PT			1	Permohonan Perlindungan Varietas Tananm			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3976.	PT			2	Pengujian Perlindungan Varietas Tananm			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3977.	PT			3	Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3978.	PT		2	Pelayanan Perijinan Pertanian							
3979.	PT			1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3980.	PT			2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian,teknis pangan segar asal tumbuhn, teknis pengalihan saham perkebunan)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3981.	PT			3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3982.	PT		3	Pelayanan Hukum							
3983.	PT			1	Sertifikasi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
3984.	PT			2	Pertimbangan Hukum			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
3985.	PT	12	BIMBINGAN TEKNIS					√	Staff	Tidak beresiko	
3986.	PT	13	EVALUASI					√	Staff	Tidak beresiko	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
	ST	URUSAN STATISTIK										
3987.	ST	1			Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi							
3988.	ST		1		Perencanaan							
3989.	ST			1	Master Plan dan Network planing			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3990.	ST			2	Penyiapan bahan penyusunan rancangan sensus			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3991.	ST			3	Penyusunan metode pencacahan sensus			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3992.	ST			4	Penentuan volume sensus			√		Unit pelaksana urusan	Unit pelaksana urusan	
3993.	ST			5	Penyusunan desain penarikan sampel			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3994.	ST			6	Penyusunan kerangka sampel			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3995.	ST			7	Studi pendahuluan (<i>desk study</i>)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3996.	ST		2		Persiapan					Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3997.	ST			1	Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3998.	ST			2	Penyusunan Kuesioner			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
3999.	ST			3	Penyusunan konsep dan definisi			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
4000.	ST			4	Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
4001.	ST			5	Inventarisasi, penyusunan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan							urusan
4002.	ST			6	Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4003.	ST			7	Penyusunan buku pedoman pencacahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4004.	ST			8	Penyusunan buku pedoman pengawasan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4005.	ST			9	Penyusunan buku pedoman pengolahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4006.	ST			10	Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4007.	ST			11	Penyusunan pedoman sosialisasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4008.	ST			12	Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4009.	ST			13	Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4010.	ST			14	Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4011.	ST			15	Pelaksanaan pelatihan petugas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4012.	ST			16	Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4013.	ST			17	Pelatihan petugas pengolahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4014.	ST			18	Perancangan tabel			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4015.	ST			19	Pelaksanaan Ujicoba kuesioner sensus (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4016.	ST			20	Pelaksanaan Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4017.	ST		3		Pelaksanaan Lapangan					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4018.	ST			1	Pelaksanaan listing			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4019.	ST			2	Pemilihan sampel			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4020.	ST			3	Pengumpulan data			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4021.	ST			4	Pemeriksaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4022.	ST			5	Pengawasan Lapangan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4023.	ST			6	Monitoring kualitas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4024.	ST		4		Pengolahan					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4025.	ST			1	Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4026.	ST			2	Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4027.	ST			3	Perekaman data (entri, scanner)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4028.	ST			4	Tabulasi Data			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4029.	ST			5	Pemeriksaan tabulasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4030.	ST			6	Laporan konsistensi tabulasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4031.	ST		5		Analisis dan Penyajian Hasil Sensus					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4032.	ST			1	Pembahasan angka hasil pengolahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4033.	ST			2	Penyusunan angka sementara			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4034.	ST			3	Penyusunan angka tetap			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4035.	ST			4	Penyusunan/pembahasan draft publikasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4036.	ST			5	Analisis data			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4037.	ST			6	Penyusunan publikasi hasil sensus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4038.	ST		6		Diseminasi hasil sensus							
4039.	ST			1	Penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet							
4040.	ST			2	Penyusunan bahan diseminasi berupa website				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4041.	ST			3	Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan CD dan sejenisnya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4042.	ST			4	Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4043.	ST			5	Layanan dan promosi statistik				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4044.	ST	2			Survei							
4045.	ST		1		Perencanaan							
4046.	ST			1	Master Plan dan Network planing			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4047.	ST			2	Penyiapan bahan penyusunan rancangan survei			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4048.	ST			3	Penyusunan metode pencacahan survei			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4049.	ST			4	Penentuan volume survei			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4050.	ST			5	Penyusunan desain penarikan sampel			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4051.	ST			6	Penyusunan kerangka sampel			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4052.	ST			7	Studi pendahuluan (desk study)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4053.	ST		2		Persiapan							
4054.	ST			1	Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4055.	ST			2	Penyusunan Koesioner			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4056.	ST			3	Penyusunan konsep dan definisi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4057.	ST			4	Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4058.	ST			5	Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4059.	ST			6	Penyusunan daftar nama			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					dan kode pembagian wilayah administrasi							urusan
4060.	ST			7	Penyusunan buku pedoman pencacahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4061.	ST			8	Penyusunan buku pedoman pengawasan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4062.	ST			9	Penyusunan buku pedoman pengolahan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4063.	ST			10	Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4064.	ST			11	Penyusunan pedoman sosialisasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4065.	ST			12	Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4066.	ST			13	Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4067.	ST			14	Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4068.	ST			15	Pelaksanaan pelatihan petugas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4069.	ST			16	Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4070.	ST			17	Pelatihan petugas pengolahan				√	Staff		Unit pelaksana urusan
4071.	ST			18	Perancangan tabel				√	Staff		Unit pelaksana urusan
4072.	ST			19	Pelaksanaan Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan)				√	Staff		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4073.	ST			20	Pelaksanaan Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4074.	ST		3		Pelaksanaan Lapangan					Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4075.	ST			1	Pelaksanaan listing				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4076.	ST			2	Pemilihan sampel				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4077.	ST			3	Pengumpulan data				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4078.	ST			4	Pemeriksaan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4079.	ST			5	Pengawasan Lapangan				√			Unit pelaksana urusan
4080.	ST			6	Monitoring kualitas			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4081.	ST		4		Pengolahan							Unit pelaksana urusan
4082.	ST			1	Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4083.	ST			2	Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4084.	ST			3	Perekaman data (entri, scanner)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4085.	ST			4	Tabulasi Data			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4086.	ST			5	Pemeriksaan tabulasi			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4087.	ST			6	Laporan konsistensi tabulasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
4088.	ST		5		Analisis dan Penyajian Hasil Survei						
4089.	ST			1	Pembahasan angka hasil pengolahan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4090.	ST			2	Penyusunan angka sementara			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4091.	ST			3	Penyusunan angka tetap			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4092.	ST			4	Penyusunan/pembahasan draft publikasi			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4093.	ST			5	Analisis data			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4094.	ST			6	Penyusunan publikasi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4095.	ST		6		Diseminasi hasil survei				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4096.	ST			1	Penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4097.				2	Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan website			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4098.	ST			3	Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan CD dan sejenisnya			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4099.	ST			4	Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4100.	ST	3			Konsolidasi Data Statistik				Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4101.	ST		1		Kompilasi Data			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4102.	ST		2		Analisis data			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4103.	ST		3		Penyusunan Publikasi				√			Unit pelaksana urusan
4104.	ST	4			Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
	SS	URUSAN SOSIAL										
4105.	SS	1	Rehabilitasi Sosial									
4106.	SS		1	Kesejahteraan sosial anak								
4107.	SS			1	Pengangkatan Kesejahteraan Anak Balita			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4108.	SS			2	Kesejahteraan Pengasuhan Anak Balita			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4109.	SS		2	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar								
4110.	SS			1	Kesejahteraan Pengasuhan Anak dalam Keluarga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4111.	SS			2	Kesejahteraan Pengasuhan Anak dalam Lembaga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4112.	SS		3	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum								
4113.	SS			1	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4114.	SS			2	Pengembangan Remaja			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4115.	SS		4	Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan								
4116.	SS			1	Kelembagaan dan Penguatan Keluarga				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4117.	SS			2	Akselerasi anak dengan kecacatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4118.	SS		5	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4119.	SS			1	Kelembagaan Perlindungan Anak				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4120.	SS			2	Advokasi dan Perlindungan Khusus				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4121.	SS		6	Rehabilitasi Sosial								
4122.	SS			1	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental dalam panti				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4123.	SS			2	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental luar panti				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4124.	SS			3	Kelembagaan dan advokasi sosial			√		Tk. Eselon		
4125.	SS			4	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4126.	SS		7	Rehabilitasi sosial tuna sosial								
4127.	SS			1	Gelandangan, pengemis dan pemulung				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4128.	SS			2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4129.	SS			3	Penyiapan Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4130.	SS			4	Reintegrasi Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4131.	SS			5	Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4132.	SS		8	Rehabilitasi Sosial Korban								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
				Penyalahgunaan NAPZA								
4133.	SS		1	Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4134.	SS		2	Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4135.	SS		9	Pelayanan sosial lanjut usia								
4136.	SS		1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4137.	SS		2	Pembinaan Pengembangan kelembagaan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4138.	SS		3	Kerjasama Pengembangan Lembaga					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4139.	SS		4	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4140.	SS	2	Perlindungan dan Jaminan Sosial									
4141.	SS		1	Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial								
4142.	SS		1	Bimbingan dan standardisasi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4143.	SS		2	Perizinan dan pengumpulan					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4144.	SS		2	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran								
4145.	SS		1	Perlindungan dan pemulihan sosial korban tindak kekerasan					√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4146.	SS		2	Pemulangan dan Reintegrasi sosial korban tindak kekerasan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4147.	SS		3	Perlindungan penampungan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					dan pemulihan sosial pekerja migran						urusan	
4148.	SS			4	Pemulangan dan Reintegrasi pekerja migran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4149.	SS		3		Evaluasi dan pelaporan							
4150.	SS			1	Evaluasi dan pelaporan Kerjasama				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4151.	SS			2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4152.	SS		4		Perlindungan sosial korban bencana sosial							
4153.	SS			1	Ketahanan sosial masyarakat (Keserasian sosial, penguatan sumber daya)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4154.	SS			2	Tanggap Darurat (Bantuan darurat, Advokasi sosial)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4155.	SS			3	Pemulihan sosial (penguatan sosial, advokasi sosial)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4156.	SS			4	Kerja samapemerintah dan non pemeintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4157.	SS		5		Perlindungan sosial korban bencana alam							
4158.	SS			1	Kesiapsiagaan dan mitigasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4159.	SS			2	Bantuan Tanggap darurat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4160.	SS			3	Advokasi Sosial Tanggap Darurat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4161.	SS			4	Pemulihan sosial dan penguatan sosial				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4162.	SS			5	Kerja sama pemerintahan dan non pemerintahan				√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
4163.	SS		5	Jaminan sosial							
4164.	SS			1	Seleksi dan verifikasi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4165.	SS			2	Asuransi kesejahteraan sosial kelembagaan dan pengelolaan premi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4166.	SS			3	Pendampingan Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4167.	SS			4	Penyaluran Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4168.	SS			5	Kerja sama pemerintah dan non pemerintah			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4169.	SS	3		Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan							
4170.	SS		1	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial							
4171.	SS			1	Bimbingan kesejahteraan sosial ketahanan keluarga			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4172.	SS			2	Konsultasi dan advokasi ketahanan keluarga			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4173.	SS			3	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4174.	SS			4	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4175.	SS			5	Kerja sama Kemitraan dunia usaha			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4176.	SS			6	Kerja sama Bimbingan Sosial			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4177.	SS			7	Kelembagaan Karang Taruna			√	Staff		Unit pelaksana urusan
4178.	SS			8	Pengembangan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Kapasitas Karang taruna						urusan
4179.	SS		2		Pemberdayaan komunitas adat terpencil						
4180.	SS			1	Identitas Persiapan pemberdayaan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4181.	SS			2	Analisis Persiapan pemberdayaan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4182.	SS		3		Pemberdayaan sumber daya manusia						
4183.	SS			1	Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4184.	SS			2	Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4185.	SS		4		Penggalian dan pengembangan potensi						
4186.	SS			1	Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4187.	SS			2	Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4188.	SS			3	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil (keserasian sosial, penguatan sosial)			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4189.	SS			3	Kerja sama kelembagaan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4190.	SS			4	Kerja sama Pemantauan, evaluasi dan pelaporan			√	Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4191.	SS		5		Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan						
4192.	SS			1	Identifikasi dan analisis			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4193.	SS			2	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4194.	SS			3	Pengembangan kapasitas usaha				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4195.	SS			4	Bimbingan Penataan sosial lingkungan kumuh				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4196.	SS			5	Pengembangan Penataan sosial lingkungan kumuh				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4197.	SS			6	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4198.	SS			7	Pengembangan aksesibilitas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4199.	SS		6	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial								
4200.	SS			1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan (pengangkatan, penghargaan, kesejahteraan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4201.	SS			2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan(identifikasi, pendayagunaan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4202.	SS			3	Pengembangan kesetiakawanan sosial (penggalian nilai, pelestarian nilai)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4203.	SS			4	Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4204.	SS			5	Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	PAR	URUSAN PARIWISATA										
4205.	PAR	1	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA									

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				SR	R	T	B			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
4206.	PAR		1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
4207.	PAR			1	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)				√	Staff Unit pelaksana urusan
4208.	PAR			2	Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4209.	PAR			3	Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4210.	PAR			4	Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4211.	PAR			5	Pengembangan Potensi dan Promosi Investasi Pariwisata				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4212.	PAR		2	Pengembangan Daya Tarik Wisata						
4213.	PAR			1	Bimtek Daya Tarik Wisata 5 Tahun				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4214.	PAR			2	Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4215.	PAR			3	Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4216.	PAR			4	Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4217.	PAR			5	Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4218.	PAR		3	Industri Pariwisata						
4219.	PAR			1	Sarana Pariwisata				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4220.	PAR				usaha daya tarik wisata dan				√	Staff Tidak beresiko Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
					kawasan pariwisata						urusan	
4221.	PAR				penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4222.	PAR			2	Jasa Pariwisata							
4223.	PAR				- jasa transportasi wisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4224.	PAR				- jasa informasi pariwisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4225.	PAR				- penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4226.	PAR				- jasa perjalanan wisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4227.	PAR				- jasa konsultan pariwisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4228.	PAR				- jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4229.	PAR				- insentif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4230.	PAR				konvensi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4231.	PAR				pameran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4232.	PAR			3	Pengembangan Produk dan Pelayanan							
4233.	PAR		4		Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata							
4234.	PAR			1	Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4235.	PAR			2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4236.	PAR			3	Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat				√			

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
4237.	PAR		5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan	
4238.	PAR			1	Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4239.	PAR			2	Pengembangan Rekreasi dan Hiburan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4240.	PAR			3	Pengembangan Wisata Alam dan Budaya				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4241.	PAR			4	Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4242.	PAR	2	PEMASARAN PARIWISATA									
4243.	PAR		1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata								
4244.	PAR			1	Informasi Pasar Dalam Negeri		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4245.	PAR				Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4246.	PAR			2	Informasi Pasar Luar Negeri		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4247.	PAR			3	Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4248.	PAR			4	Perancangan Pemasaran Pariwisata		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4249.	PAR		2	Promosi Pariwisata Luar Negeri								
4250.	PAR			1	Wilayah ASEAN		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4251.	PAR			2	Wilayah Asia		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4252.	PAR			3	Wilayah Timur Tengah dan Afrika		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4253.	PAR			4	Wilayah Amerika dan Pasifik		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4254.	PAR			5	Wilayah Eropa		√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
					SR	R	T	B				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
											urusan	
4255.	PAR		3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri								
4256.	PAR		4	Pencitraan Indonesia								
4257.	PAR			1	Strategi Pencitraan Indonesia (Perencanaan Pencitraan Indonesia, Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia	√				Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
4258.	PAR			2	Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4259.	PAR				Promosi Media				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4260.	PAR				Sarana dan Distribusi Media				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4261.	PAR			3	Kerjasama dan Kemitraan Antar lembaga Pemerintah dan non Lembaga Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4262.	PAR		5	Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus								
4263.	PAR			1	Promosi KIE Korporasi							
4264.	PAR				Korporasi Dalam Negeri		√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
4265.	PAR				Korporasi Luar Negeri		√			Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan	
4266.	PAR			2	Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4267.	PAR			3	Promosi Minat Khusus wisata bahari dan wisata non bahari				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	EKSB			EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA								

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
4268.	EKSB		1	Pengembangan industri Perfilman							
4269.	EKSB			1	Fasilitasi Industri Perfilman			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4270.	EKSB			2	Festival dan Eksibisi Film			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4271.	EKSB			3	Produksi			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4272.	EKSB			4	Pemasaran Film			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4273.	EKSB		2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik							
4274.	EKSB			1	Pengembangan Seni Pertunjukan			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4275.	EKSB			2	Pengembangan Industri Musik			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4276.	EKSB			3	Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4277.	EKSB			4	Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4278.	EKSB		3	Pengembangan Seni Rupa							
4279.	EKSB			1	Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi						
4280.	EKSB				Kreasi dan Produksi Karya Seni			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4281.	EKSB				Fasilitasi Pengembangan Seni			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4282.	EKSB			2	Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi						
4283.	EKSB				Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4284.	EKSB				Apresiasi Karya Seni Rupa			√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
	EKM		EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK									
4285.	EKM		1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media								
4286.	EKM		1	Pengembangan Film Animasi dan Komik					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4287.	EKM		2	Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4288.	EKM		3	Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4289.	EKM		4	Pengembangan Karya Kreatif Periklanan iklan cetak dan elektronik					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4290.	EKM		2	Desain dan Arsitektur								
4291.	EKM		1	Arsitektur dan Desain Interior					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4292.	EKM		2	Komunikasi Visual					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4293.	EKM		3	Desain Produk dan Kemasan					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4294.	EKM		4	Mode					√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4295.	EKM		3	Kerjasama dan Fasilitas								
4296.	EKM		1	Lisensi Teknologi, pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4297.	EKM		2	Sentra Inovasi dan Inkubator bisnis			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4298.	EKM		3	Pengembangan Sentra Kreatif dan pengelolaan sentra kreatif			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4299.	EKM		4	Akses Pembiayaan bank dan			√			Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
				non bank							urusan
	PSDP		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
4300.	PSDP		1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata							
4301.	PSDP		1	Program dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4302.	PSDP		2	Data dan Publikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4303.	PSDP		2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif							
4304.	PSDP		1	Program dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4305.	PSDP		2	Data dan Publikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4306.	PSDP		3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif							
4307.	PSDP		1	Program dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4308.	PSDP		2	Penyelenggaraan dan Kerjasama				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4309.	PSDP		4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif							
4310.	PSDP		1	Program dan Evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4311.	PSDP		2	Evaluasi dan Kerjasama				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	IT	PERIKANAN TANGKAP									
4312.	IT		1	Sumber Daya Ikan							
4313.	IT		1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap (pengumpulan dan pengolahan, analisis dan penyajian)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4314.	IT			2	Sumber Daya Ikan Perairan Umum Pemulihan sumber daya ikan perairan umum, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan)							
4315.	IT			3	Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4316.	IT			4	Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4317.	IT				01. identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4318.	IT				02. tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4319.	IT			5	Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan, analisis pengelolaan sumber daya ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4320.	IT		2	Pelabuhan Perikanan				√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4321.	IT			1	Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan (identifikasi dan analisis, penyiapan bangunan)				√	Staff	Unit pelaksana urusan	
4322.	IT			2	Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (tata laksana pelabuhan perikanan,					Staff	Unit pelaksana urusan	

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					SR	R	T	B			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					pengusahaan dan pelayanan)						
4323.	IT			3	Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan (bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP, bimbingan pembangunan PPI dan Pelabuhan swasta)				√	Staff	Unit pelaksana urusan
4324.	IT			4	Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (tata laksana dan sarana, keselamatan pelayaran)				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4325.	IT			5	Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan (pemantauan dan evaluasi PPS, PPN, dan PPP, pemantauan dan evaluasi PPI dan peabuhan swasta)				√	Staff	Tidak beresiko Unit pelaksana urusan
4326.	IT		3		Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan						
4327.	IT			1	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan rancang bangun kapal perikanan, kelaikan kapal perikanan)			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
4328.	IT			2	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan			√		Tk. Eselon	Unit pelaksana urusan
4329.	IT			3	Pendaftaran Kapal Perikanan (identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasi)				√	Staff	Unit pelaksana urusan
4330.	IT			4	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan						

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4331.	IT			5	Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan pelaporan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4332.	IT		4		Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan				√	Staff		
4333.	IT			1	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan (verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan, pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4334.	IT			2	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan (verifikasi perusahaan penangkapan ikan, administrasi perusahaan penangkapan ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4335.	IT			3	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan (verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadan hukum , verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan, pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4336.	IT			4	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					(pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan)							
4337.	IT			5	Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4338.	IT		5	Pengembangan Usaha Penangkapan								
4339.	IT			1	Kelembagaan Usaha (tata laksana kelembagaan, kerja sama usaha)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4340.	IT			2	Investasi dan Pemodalan Usaha (tata laksana investasi dan pemodalan usaha, imbingan investasi dan pemodalan usaha)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4341.	IT			3	Kenelayanan (identifikasi dan kapasitas nelayan, bimbingan nelayan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4342.	IT			4	Pembinaan pengelolaan usaha (bimbingan pengelolaan usaha, bimbingan diversifikasi usaha)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4343.	IT			5	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	IB	PERIKANAN BUDIDAYA										
4344.	IB		1	Prasarana dan Sarana Budidaya								
4345.	IB			1	Lahan dan Air (identifikasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					potensi, penataan)							urusan
4346.	IB			2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4347.	IB			3	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4348.	IB			4	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4349.	IB			5	Minapolitan Budidaya (identifikasi potensi, pemanfaatan potensi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4350.	IB		2	Perbenihan								
4351.	IB			1	Induk (pengelolaan induk ikan air tawar, pengelolaan induk ikan air payau dan laut)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4352.	IB			2	Perbenihan Skala Kecil ikan air tawar dan ikan air laut				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4353.	IB			3	Perbenihan Skala Besar (perbenihan skala besar ikan air tawar, perenihan skala besar ikan air payau dan laut)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4354.	IB			4	Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4355.	IB			5	Informasi dan Distribusi Perbenihan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4356.	IB		3	Produksi								
4357.	IB			1	budidaya air tawar			√		Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					(standarisasi dan penerapan teknologi budidaya air tawar)							urusan
4358.	IB			2	budidaya air payau dan laut (standarisasi, penerapan teknologi budidaya air payau dan laut)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4359.	IB			3	budidaya ikan hias (standarisasi, penerapan teknologi budidaya ikan hias)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4360.	IB			4	sertifikasi (monitoring dan evaluasi sertifikasi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4361.	IB			5	data dan statistik perikanan budidaya (pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan penyajian data statistik)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4362.	IB		4	Kesehatan Ikan dan Lingkungan								
4363.	IB			1	Hama dan penyakit ikan (metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit, monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4364.	IB			2	perlindungan lingkungan budidaya (pengendalian lingkungan budaya, rehabilitasi lingkungan budidaya)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4365.	IB			3	Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan (dan standarisasi mode uji kesehatan ikan dan lingkungan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4366.	IB			4	Obat ikan, kimia, dan bahan biologi (monitoring dan evaluasi obat ikan kimia dan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					bahan biologi)							
4367.	IB			5	Pengendalian residu (Perencanaan dan tindak lanjut pengendalian residu)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4368.	IB			5	Usaha Budidaya							
4369.	IB			1	investasi dan permodalan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4370.	IB			2	kewirausahaan (bimbingan usaha dan kemitraan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4371.	IB			3	pelayanan usaha (perizinan, pemantauan dan evaluasi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4372.	IB			4	kelembagaan dan ketenagakerjaan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4373.	IB			5	infomasi usaha dan promosi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4374.	IB			PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
4375.	IB			1	Pengolahan Hasil			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4376.	IB			1	Standarisasi (analisis standar, penerapan standar)							
4377.	IB			2	Pengembangan produk (skala mikro, kecil, menengah, pengembangan produk skala besar)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4378.	IB			3	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, kerja sama usaha mikro, kecil dan menengah)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4379.	IB			4	Industri pengolahan (bimbingan teknis industri pengolahan, kerjasama				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					asosiasi dan industri penolahan)							
4380.	IB			5	Sarana dan prasarana			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4381.	IB		2	Pengembangan Produk Non Konsumsi								
4382.	IB			1	standarisasi (analisis standar, penerapan standar)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4383.	IB			2	promosi dan jaringan pasar ikan hias				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4384.	IB			3	pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4385.	IB			4	pengembangan industri (kerja sama industri)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4386.	IB			5	sarana dan prasarana			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4387.	IB		3	Pemasaran Dalam Negeri								
4388.	IB			1	Kelembagaan (kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan, kelembagaan pasar hasil perikanan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4389.	IB			2	Analisis dan informasi pasar dalam negeri				√	Staff		Unit pelaksana urusan
4390.	IB			3	Jaringan distribusi dan kemitraan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4391.	IB			4	Promosi dan kerja sama							Unit pelaksana urusan
4392.	IB				1. Promosi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4393.	IB				2. Kerjasama			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
												urusan
4394.	IB			5	Sarana dan prasarana			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4395.	IB		4	Pemasaran Luar Negeri								
4396.	IB			1	Kelembagaan (analisis kelembagaan, kerjasama kelembagaan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4397.	IB			2	Analisis dan informasi pasar luar negeri dan kebutuhan import				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4398.	IB			3	Pengembangan ekspor peningkatan akses pasar, pengamanan dan perlindungan akses pasar				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4399.	IB			4	Pengendalian impor, analisis kebutuhan impor, pemantauan evaluasi impor				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4400.	IB			5	Promosi dan kerjasama							
4401.	IB				1. Promosi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4402.	IB				2.Kerjasama			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4403.	IB		5	Usaha dan investasi								
4404.	IB			1	Pelayanan usaha (mikro, kecil dan menengah, pelayanan usaha besar)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4405.	IB			2	Kemitraan usaha (usaha kecil dan menengah, kemitraan usaha besar)							
4406.	IB			3	Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4407.	IB			4	Investasi dan permodalan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4408.	IB			5	Informasi dan promosi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	KL		KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL									
4409.	KL		1	Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil								
4410.	KL			1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi (rencana tata ruang laut nasional, rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4411.	KL			2	Rencana tata ruang dan zona wilayah I Jawa, sumatera dan leuseur sunda			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4412.	KL			3	Rencana tata ruang dan zona wilayah II (kalimantan dan maluku, zonasi wilayah sulawesi dan papua)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4413.	KL			4	Informasi dan evaluasi spasial			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4414.	KL		2	Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan				√		Tk. Eselon		
4415.	KL			1	Jejaring, data, dan informasi konservasi					Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4416.	KL			2	Konservasi wawasan (perancangan konservasi kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4417.	KL			3	Konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan plestarian jenis ikan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4418.	KL			4	Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis ikan)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4419.	KL		3		Pesisir dan Lautan							
4420.	KL			1	Mitigasi bencana lingkungan (mitigasi bencana pesisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4421.	KL			2	Pendayagunaan sumber daya kelautan (benda muatan kapal tenggelam, jasa kelautan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4422.	KL			3	penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir, penanggulangan pencemaran sumber daya laut)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4423.	KL		4		rehabilitasi dan reklamasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4424.	KL			1	Identifikasi pulau-pulau terkecil			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4425.	KL			2	Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil (rehabilitasi, mitigasi dan adaptasi)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4426.	KL			3	Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil				√			
4427.	KL			4	Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4428.	KL		5		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4429.	KL			1	Akses permodalan (akses perbankan, akses non Bank)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4430.	KL			2	Akses ilmu pengetahuan dan teknologi (identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4431.	KL			3	Sosial budaya masyarakat (penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4432.	KL			4	Pengembangan usaha (pelayanan usaha, usaha mikro)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	PSDK		PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
4433.	PSDK		1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan								
4434.	PSDK			1	Pengawasan penangkapan wilayah Barat (pengawasan penangkapan ikan wilayah barat I, pengawasan penangkapan ikan wilayah barat II)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4435.	PSDK			2	Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur (pengawasan penangkapan ikan wilayah timur I dan II)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4436.	PSDK			3	Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pngangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah barat, pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					dan pemasaran wilayah timur)							
4437.	PSDK			4	Pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4438.	PSDK		2		Pengawasan Sumber Daya Kelautan				√			
4439.	PSDK			1	pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4440.	PSDK			2	pengawasan pencemaran perairan (pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai, pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4441.	PSDK			3	pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4442.	PSDK			4	pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4443.	PSDK		3		Kapal Pengawas							
4444.	PSDK			1	Logistik dan operasional wilayah Barat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4445.	PSDK			2	Logistik operasional wilayah Timur				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4446.	PSDK			3	Perawatan kapal pengawas (wilayah barat dan timur)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4447.	PSDK			4	Pengawakan kapal pengawas (wilayah barat dan timur)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4448.	PSDK		4		Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur							Tidak beresiko
4449.	PSDK			1	Sistem pemantauan (√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
					pengembangan sistem pemantauan, kerja sama pemantauan)							urusan
4450.	PSDK			2	Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (opersional sistem pemantauan pemanfaatan sumber , analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4451.	PSDK			3	Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan)				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4452.	PSDK			4	Pengembangan infrastruktur pengawasan (penyiapan infrastruktur, evaluasi infrastruktur)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4453.	PSDK		5	Penanganan pelanggaran								
4454.	PSDK			1	Penyidikan (wilayah barat dan timur)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4455.	PSDK			2	Penanganan barang bukti dan awak kapal (wilayah barat dan timur)			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4456.	PSDK			3	Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4457.	PSDK			4	Pemantauan dan evaluasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
	KI		KARANTINA IKAN									
4458.	KI		1	Tindak Karantina Ikan								
4459.	KI			1	Pemeriksaan ikan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SR	R	T	B			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
4460.	KI			2	Penahanan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4461.	KI			3	Pengasingan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4462.	KI			4	Pengamatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4463.	KI			5	Pengamatan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4464.	KI			6	Penolakan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4465.	KI			7	Pemusnahan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4466.	KI			8	Pelepasan/pembebasan				√			
4467.	KI		2	Tertib Operasional								
4468.	KI			1	Persyaratan lalu lintas pemasukan			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4469.	KI			2	Persyaratan lalu lintas pengeluaran			√		Tk. Eselon		Unit pelaksana urusan
4470.	KI			3	Permohonan sertifikat				√	Staff		Unit pelaksana urusan
4471.	KI			4	Pemasukan formulir				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4472.	KI			5	Pemasukan sertifikat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4473.	KI			6	Evaluasi dan monitoring sertifikat				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4474.	KI			7	Surat perintah				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4475.	KI			8	Rekomendasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4476.	KI		3	Pencegahan Penyakit				√		Tk. Eselon		
4477.	KI			1	Penutupan suatu area							
4478.	KI			2	Pelanggaran lalu lintas ikan							

No.	KODE KLAS.	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN				HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				SR	R	T	B				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
4479.	KI		4	Pengawasan Karantina Ikan				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4480.	KI			1	Pengawasan peraturan perkarantinaan						
4481.	KI			2	Pengawasan pelaksanaan operasional						
4482.	KI		5	Instalasi				√	Staff	Tidak beresiko	Unit pelaksana urusan
4483.	KI			1	Instalasi karantina sementara						
4484.	KI			2	Lokasi karantina						

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

